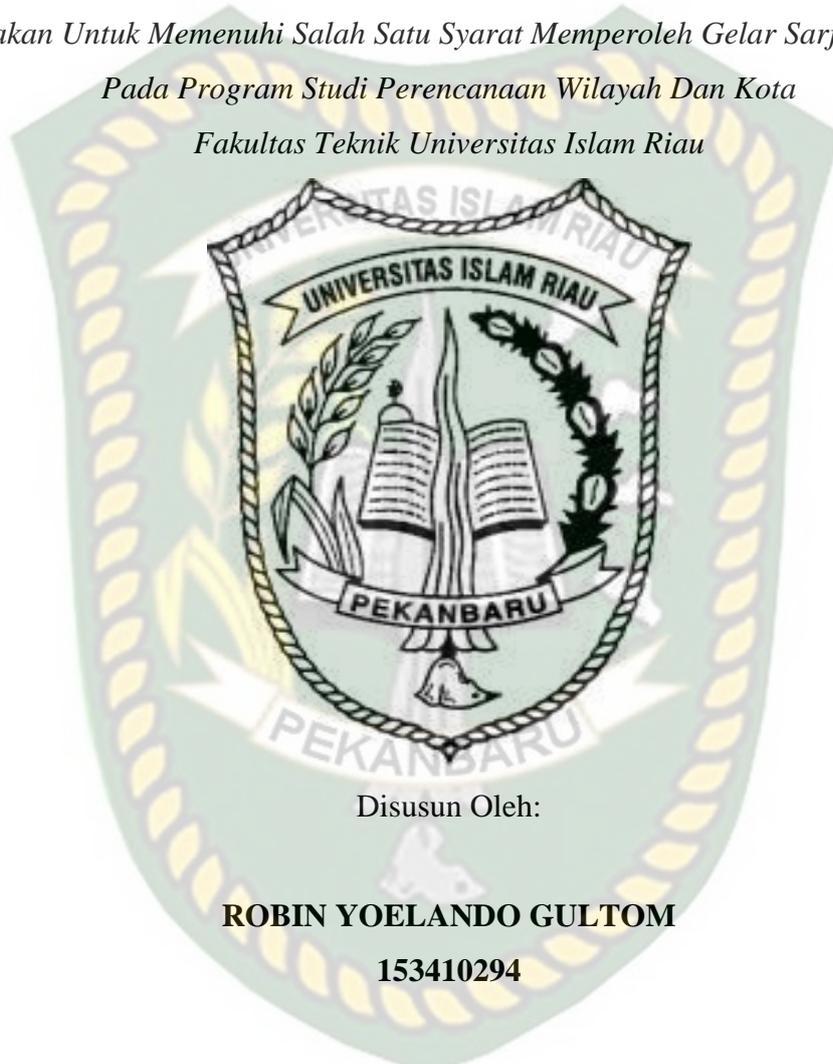


**EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN STRATEGI SANITASI
KOTA (SSK) KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN TAMPAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh:

ROBIN YOELANDO GULTOM

153410294

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

**EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN STRATEGI
SANITASI KOTA (SSK) KOTA PEKANBARU DI
KECAMATAN TAMPAN**

ROBIN YOELANDO GULTOM

153410294

ABSTRAK

Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru merupakan suatu dokumen yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sanitasi dan untuk memberikan layanan sanitasi bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan termasuk salah satu kecamatan yang menerapkan pelaksanaan SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di kecamatan Tampan. Adapun sasarannya (a) mengidentifikasi pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018, (b) mengidentifikasi kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada dokumen SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018, (c) mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan pendekatan deduktif dan jenis penelitian evaluasi sumatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, literature, observasi, dan kuesioner. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada teknik purposive sampling dan teknik simple random sampling.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pelaksanaan SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018 telah sesuai dengan mekanisme tahapan pelaksanaan PPSP yang diawali dengan tahap pengenalan program sampai pada tahap implementasi/pelaksanaan, (b) kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sub sektor air limbah domestik setelah dilakukan penilaian masuk dalam kategori cukup baik dengan skor nilai 258, sedangkan untuk kondisi eksisting sanitasi berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada sub sektor persampahan di Kecamatan Tampan setelah dilakukan penilaian masuk dalam kategori baik dengan total skor penilaian 414, (c) tingkat efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan, berdasarkan efektivitas menurut Sutrisno (2007) berada pada kategori cukup berhasil dengan skor gabungan 58,35 %.

Kata Kunci : Evaluasi, Efektivitas, Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
IMPLEMENTATION OF THE CITY SANITATION STRATEGY
(SSK) IN PEKANBARU CITY IN TAMPAN DISTRICT**

ROBIN YOELANDO GULTOM

153410294

ABSTRAK

The City Sanitation Strategy (SSK) for the city of Pekanbaru is a document that is used as a guideline for the implementation of sanitation development and for providing sanitation services for the entire community of Pekanbaru City. Tampan District is one of the districts that implemented the implementation of the Pekanbaru City SSK in 2014-2018. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the implementation of the Pekanbaru City SSK in 2014-2018 in the Tampan sub-district. The targets are (a) to identify the implementation of the Pekanbaru City SSK in 2014-2018, (b) to identify the existing sanitation conditions in Tampan District based on the sanitation aspects in the Pekanbaru City SSK document for 2014-2018, (c) to identify the effectiveness of the Pekanbaru City SSK implementation in 2014-2018. 2014-2018 in Tampan District.

The method used in this research is descriptive qualitative-quantitative with a deductive approach and the type of research is summative evaluation. Data collection techniques used interviews, literature, observation, and questionnaires. The sampling technique was based on purposive sampling technique and simple random sampling technique.

Based on the results of the study, it showed that (a) the implementation of the Pekanbaru City SSK in 2014-2018 was in accordance with the mechanism of the PPSP implementation stages starting with the program introduction stage to the implementation/implementation stage, (b) the existing sanitation conditions in Tampan District based on the aspects of anticipation. in the Pekanbaru City SSK document for 2014-2018 in the domestic wastewater sub-sector after the assessment it was in the fairly good category with a score of 258, while for the existing sanitation conditions based on sanitation aspects in the solid waste sub-sector in Tampan District after the assessment it was included in the good category with a total assessment score of 414, (c) the level of effectiveness of the implementation of the Pekanbaru City SSK in 2014-2018 in Tampan District, based on effectiveness according to Sutrisno (2007) is in the moderately successful category with a combined score of 58.35%.

Keywords: *Evaluation, Effectiveness, Implementation Of City Sanitation Strategy (SSK).*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, Penulis telah banyak memperoleh berbagai dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sangat tulus kepada :

1. Kedua orangtua yang terkasih dan terhormat yaitu bapak Jonni Robinson Gutom dan ibu Dosma Sormin yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material, dan senantiasa memberikan do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Keluarga yang terkasih yaitu Friska Esratrina Gultom A.Md. Keb (Kakak) / Lae Felicia (Abang Ipar) dan Yulimpi Ristriani Gultom A.Md. Keb (Kakak) / Lae Timoty (Abang Ipar) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa sekaligus materi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini serta untuk keponakan yang Penulis sayangi (Felicia, Felixander, Timoty, Fergio, Ebenezer, Mikha, Doly, dan Mikhaela).
3. Kepada nenek terkasih Hotmian Br Pakpahan yang senantiasa mendoakan Penulis.
4. Kepada seluruh keluarga besar dari Ayah dan Ibu, yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada Penulis.
5. Bapak Prof Dr. H. Syarfinaldi. SH. M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.

6. Bapak Dr. Eng. Muslim, ST, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
7. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Progam Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
8. Ibu Febby Asteriani, ST, MT, Selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan saran, koreksi dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Faizan Dalilla, ST, MSi selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan saran, koreksi dan arahan dalam membimbing Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Bapak Muhammad Sofwan ST, MT selaku Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan ilmu kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Bapak Ir. H. Firdaus Agus, MP Selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan ilmu kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan.
13. Staf Tata Usaha (TU) dan karyawan dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
14. Kepada Seluruh Narasumber yang telah memberikan informasi mengenai Tugas Akhir ini yaitu “*Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan*” (Bapak Yenni Mulyadi, ST, MT Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Provinsi Riau; Bapak Arafik, ST selaku Tenaga ahli Pendamping implementasi SSK Program PPSP; Abang Said Qodri; Ibu Dede Afrianti, ST selaku Tenaga ahli Pendamping implementasi SSK Program PPSP; Bapak Kautsar Selaku Sub Kabid. Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah (P3W) di Bappeda Kota Pekanbaru; Bapak Dody Rinaldi selaku Sub Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Pekanbaru; Bapak Sulaiman selaku kasi Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perkim kota Pekanbaru; Bapak Sufari selaku Kasi Perencanaan Cipta Karya dinas PUPR Kota Pekanbaru; Bapak Nanda Selaku Seksi Pendataan dan Perencanaan PSU dinas Perkim kota Pekanbaru; Bapak Novan selaku Kasi penanganan dan pemrosesan akhir sampah bidang pengelolaan sampah di DLHK Kota Pekanbaru; dan Bapak Tri Joko Waluyo ketua pengurus TPS 3R; dan Bapak Lurah Tobek Godang, Seklur Sialang mungu dan Seklur Tuah Karya.

15. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, terkhusus Planology angkatan 2015 kelas B terimakasih atas bantuannya dan kerjasamanya dalam banyak hal selama proses masa perkuliahan.
16. Serta seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan. Untuk itu sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, Penulis berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya serta meridhai kita semua dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 2021

Robin Yoelando Gultom

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan sasaran penelitian	6
1.3.1 Tujuan.....	6
1.3.2 Sasaran.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5.1 Ruang Lingkup Materi	7
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran Studi	10
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Sanitasi Lingkungan	15
2.1.1 Definisi Air Limbah Domestik.....	16
2.1.2 Definisi Persampahan	17
2.2 Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru	17
2.2.1 Tahapan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	18
2.2.2 Aspek-Aspek Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru	19
2.2.2.1 Aspek Kelembagaan dan Peraturan	19
2.2.2.2 Aspek Peran Stakeholders	20

2.2.2.3 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan	21
2.2.2.4 Aspek Keuangan	32
2.3 Evaluasi.....	33
2.3.1 Definisi Evaluasi	33
2.3.2 Konsep Evaluasi Program	33
2.3.3 Model Evaluasi Formatif dan Sumatif	35
2.3.3.1 Evaluasi formatif.....	35
2.3.3.2 Evaluasi Sumatif	35
2.3.3.3 Evaluasi Outcame Menggunakan Skala Likert	36
2.4 Teori Efektivitas.....	36
2.4.1 Pendekatan efektivitas.....	38
2.4.2 Ukuran Efektivitas	39
2.5 Penelitian terdahulu	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.2.1 Data primer.....	48
3.2.2 Data Sekunder	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.4 Populasi.....	51
3.5 Sampel Penelitian.....	52
3.5.1 Perhitungan Jumlah Sampel.....	53
3.5.2 Teknik Pengambilan Sampel	55
3.6 Tahapan Penelitian	57
3.6.1 Tahapan Persiapan	57
3.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	58
3.7 Teknik Analisis Data.....	58
3.7.1 Identifikasi Pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018	58
3.7.2 Identifikasi kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek sanitasi dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018.....	59

3.7.3 Identifikasi Efektivitas Pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan	65
3.8 Variabel Penelitian	68
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	72
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	72
4.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	74
4.3 Kependudukan Kota Pekanbaru.....	77
4.4 Gambaran umum Kecamatan Tampan.....	79
4.4.1 Letak Dan Geografis Kecamatan Tampan.....	79
4.4.2 Pemerintahan Kecamatan Tampan.....	84
4.4.3 Kependudukan Kecamatan Tampan	84
4.5 Gambaran umum sanitasi Kecamatan Tampan.....	86
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	88
5.1 Identifikasi Penerapan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	88
5.1.1 Pengenalan Program PPSP.....	89
5.1.2 Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan	96
5.1.3 Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru 2014-2018.....	96
5.1.3.1 Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS).....	97
5.1.3.2 Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru Tahun 2014-2018	04
5.1.4 Pelaksanaan/Implementasi SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018	114
5.1.4.1 Aspek kelembagaan dan peraturan.....	114
5.1.4.2 Aspek Peran Serta Stakeholders.....	115
5.1.4.3 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan	116
5.1.4.4 Aspek Pembiayaan	117
5.2 Identifikasi Kondisi Eksisting Sanitasi Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Aspek-Aspek Sanitasi Dokumen SSK Kota Pekanbaru .	118
5.2.1 Aspek Kelembagaan dan Peraturan.....	118

5.2.1.1 Aspek Kelembagaan dan Peraturan Sub Sektor Air Limbah Domestik.....	118
5.2.1.2 Aspek Kelembagaan dan Peraturan Sub Sektor Persampahan	122
5.2.2 Aspek Peran Serta Stakeholders.....	126
5.2.2.1 Aspek Peran Serta Stakeholders Sub Sektor Air Limbah Domestik	126
5.2.2.2 Aspek Peran Serta Stakeholders Sub Sektor Persampahan	129
5.2.3 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan Sektor Air Limbah Domestik	130
5.2.3.1 Ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik	130
5.2.3.2 Tingkat pengelolaan dengan akses dasar	131
5.2.3.3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	132
5.2.3.4 Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan.....	142
5.2.4 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan Sub Sektor Persampahan.....	143
5.2.4.1 Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga	143
5.2.4.2 Sampah Tidak Tertangani	143
5.2.4.3 Sistem Pengelolaan Persampahan	144
5.2.4.4 Sarana dan Prasarana Persampahan di Kecamatan Tampan.....	160
5.2.5 Aspek Pembiayaan Sub Sektor Air Limbah Domestik Dan Sub Sektor Persampahan	161
5.2.6 Evaluasi Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan	164
5.3 Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.....	179
5.3.1 Indikator Pemahaman Program.....	180
5.3.2 Indikator Tepat Sasaran.....	185
5.3.3 Indikator Ketepatan Waktu	190
5.3.4 Indikator Tercapainya Tujuan	194

5.3.5 Indikator Perubahan Nyata.....	201
5.4 Tingkat Pencapaian Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan.....	207
BAB VI PENUTUP	210
6.1 Kesimpulan	210
6.2 Saran.....	214
DAFTAR PUSTAKA	216
LAMPIRAN.....	219



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	52
Tabel 3.2 Pembagian Jumlah Sampel Per Kelurahan	55
Tabel 3.3 Langkah Pelaksanaan	58
Tabel 3.4 Indikator Kondisi Eksisting Sub sektor air limbah domestik	60
Tabel 3.5 Indikator Kondisi Eksisting Sub Sektor Persampahan	60
Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Sub Sektor Air Limbah Domestik	61
Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Sub Sektor Persampahan	63
Tabel 3.8 Indikator Efektivitas	65
Tabel 3.9 Indeks Skala Likert	66
Tabel 3.10 Variabel Penelitian	69
Tabel 3.11 Desain Survei	70
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2019	75
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2017	77
Tabel 4.3 Status Pemerintahan, Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Tampan 2018.....	84
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan Tahun 2018	85
Tabel 5.1 Wawancara Informan Tahapan Pengenalan Program PPSP di Kota Pekanbaru	94
Tabel 5.2 Permasalahan Sub Sektor Air Limbah Domestik dan Permasalahan Sub Sektor Persampahan	99
Tabel 5.3 Visi dan Misi Sanitasi Kota Pekanbaru	106
Tabel 5.4 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Pada Sub Sektor Air Limbah Domestik Dan Sub Sektor Persampahan	107
Tabel 5.5 Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi pada sub Sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan	108
Tabel 5.6 Program Dan Kegiatan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik	110
Tabel 5.7 Program Dan Kegiatan Sanitasi Sub Sektor Persampahan	112

Tabel 5.8 Kondisi Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2020	131
Tabel 5.9 Gambar Ipal Komunal / MCK di Kecamatan Tampan	133
Tabel 5.10 Frekuensi pengurusan tangki septik individual yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan Truk Tinja	138
Tabel 5.11 Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan.....	142
Tabel 5.12 Kebiasaan melakukan pemilahan sampah	145
Tabel 5.13 Kondisi tempat sampah rumah tangga di Kecamatan Tampan yang memenuhi persyaratan teknis	146
Tabel 5.14 Kondisi TPS Resmi Di Kecamatan Tampan yang memenuhi kriteria teknis	148
Tabel 5.15 Sistem Pengumpulan sampah di Kecamatan	150
Tabel 5.16 Jenis Dan Kapasitas Sarana Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Tampan	152
Tabel 5.17 Frekuensi Ritasi Pengangkutan di Kecamatan Tampan	153
Tabel 5.18 Frekuensi Tingkat Masyarakat Menggunakan Layanan Pengangkut Sampah Di Kecamatan Tampan	156
Tabel 5.19 Kondisi TPS 3R KSM Mandiri Bersama Di Kecamatan Tampan Yang Memenuhi Kriteria Terknis	157
Tabel 5.20 Sarana dan Prasarna Persampahan di Kecamatan Tampan	160
Tabel 5.21 Penilaian Kondisi Eksisting sanitasi sektor air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan Berdasarkan aspek-aspek sanitasi	165
Tabel 5.22 Penilaian Kondisi Eksisting sanitasi Sektor Persampahan di Kecamatan Tampan Berdasarkan aspek-aspek Sanitasi	172
Tabel 5.23 Indikator pemahaman program pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan	181
Tabel 5.24 Skor Gabungan Kriteria Pemahaman Program Dan Kegiatan Pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan	184
Tabel 5.25 Indikator Tepat Sasaran dalam pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan	186

Tabel 5.26 Skor Gabungan Indikator Tepat Sasaran Pelaksanaan SSK kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan	189
Tabel 5.27 Indikator Tepat Waktu dalam pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan	190
Tabel 5.28 Skor Gabungan Indikator Tepat waktu dalam pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan	194
Tabel 5.29 Indikator Tercapainya Tujuan Pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan	195
Tabel 5.30 Skor Gabungan Indikator Tercapainya Tujuan pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan	200
Tabel 5.31 Indikator Perubahan Nyata Pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan	201
Tabel 5.32 Skor Gabungan Indikator Perubahan Nyata pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2015-2019 di Kecamatan Tampan	206
Tabel 5.33 Rekapitulasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2015-2018 di Kecamatan Tampan Berdasarkan Skala Likert	208

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Tampan	12
Gambar 2.1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	24
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	76
Gambar 4.2 Peta Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru	78
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kecamatan Tampan	81
Gambar 4.4 Peta Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru	82
Gambar 4.5 Peta Kawasan Permukiman Kecamatan Tampan.....	83
Gambar 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan Dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan Tahun 2018	85
Gambar 5.1 Pengenalan Program PPSP Kepada Kepala Daerah Di Kota Pekanbaru	89
Gambar 5.2 Peta Area Beresiko Sub Sektor Air Limbah Domestik	102
Gambar 5.3 Peta Area Beresiko Sanitasi Sub Sektor Persampahan	102
Gambar 5.4 Sampul Buku Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru .	113
Gambar 5.5 Pengolahan Setempat Skala individual	133
Gambar 5.6 Kondisi Bangunan TPS 3R KSM Mandiri.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Hingga saat ini banyak perkotaan yang ada di Indonesia berpacu dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Seringkali pembangunan itu dilakukan tanpa memperhatikan secara serius terhadap keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ditempati. Hal inilah yang menyebabkan kesadaran stakeholders pembangunan untuk menjaga pembangunan dan keseimbangan lingkungan hidup menjadi rendah sehingga mengakibatkan kelestarian lingkungan menjadi kurang prioritas dan tidak terjaga. Contoh dampak dalam pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti longsor, banjir, sampah perkotaan yang menumpuk, dan pencemaran limbah yang bersumber dari pusat-pusat kegiatan seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, permukiman, pendidikan, industri, dan pusat kegiatan lainnya.

Salah satu pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan ialah pembangunan dalam sektor sanitasi. Namun di berbagai daerah, pembangunan sektor sanitasi selama ini masih belum menjadi prioritas. Berdasarkan World Health Organisation (2018), pada tahun 2017 negara Indonesia menduduki urutan ketiga yang memiliki sanitasi yang buruk atau tidak layak, sementara urutan pertama diduduki negara India dan di urutan kedua negara Tiongkok. Melihat kondisi Indonesia yang menduduki peringkat ketiga negara yang memiliki sanitasi buruk atau tidak layak yang berada diposisi bawah diantara negara-negara tetangga di Asia Tenggara, hal ini dapat menjadikan sebuah

kesimpulan bahwa pemahaman penduduk Indonesia mengenai pentingnya sanitasi masih sangat rendah (www.solopos.com). Dengan demikian sangat penting menjadikan prioritas dalam penanganan kondisi sanitasi saat ini serta harus adanya keterpaduan dan keberlanjutan dari berbagai program dan kegiatan penanganan sanitasi agar sanitasi di Indonesia dapat lebih baik.

Dalam hal mengutamakan penyeimbangan pembangunan, Indonesia banyak menciptakan program-program maupun kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Diantara program-program tersebut salah satunya adalah program pemerintah pada bidang sanitasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 yaitu Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) yang merupakan program yang terencana dan terintegrasi dari pemerintah pusat yang memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah untuk sektor sanitasi yang mana implementasinya sudah direncanakan secara terintegrasi agar berjalan sesuai dengan rencana sehingga sanitasi dapat dilaksanakan sesuai harapan. Program ini di laksanakan pada tahun 2006 hingga tahun 2010 yang memiliki fokus dalam perbaikan sanitasi di perkotaan. Hingga Terdapat lebih dari 300 kota pada tahun 2010 sampai pada tahun 2014 yang melaksanakan program ini, yang dimulai dengan strategi pembangunan sanitasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (www.ampl.or.id).

Belajar melalui pengalaman yang terjadi, penanganan dalam mengatasi masalah sanitasi tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Adanya perencanaan yang tumpang tindih yang tidak berkelanjutan dan tidak tepat sasaran adalah gambaran buram dari masalah. Permasalahan sanitasi harus ditangani secara

multistakeholder dan komprehensif. Kebiasaan yang kurang baik dari manusia dalam pengelolaan sanitasi merupakan salah satu penghambat untuk tercapainya kesehatan lingkungan. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi ialah tindakan yang disengaja dengan tujuan masyarakat tidak berkontak langsung dengan kotoran dan zat kimia yang berbahaya. Sebagai kelanjutan dari program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), terdapat program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), program ini telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan bertahap dan berkelanjutan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 yang memiliki target pencapaian minimal 330 Kabupaten/Kota di Indonesia yang rawan dengan masalah-masalah sanitasi seperti masalah air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan (www.usdp.or.id/). Dengan kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru agar turut serta bergabung kedalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi pembangunan sanitasi permukiman pada skala kota.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ialah program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah diseluruh tingkatan (MPP PPSP, 2012) dan salah satu dari penerapan pelaksanaan adalah dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Berdasarkan buku Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2014 Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan bagian dari tahapan proses penerapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pada dasarnya tahapan ini merupakan tahapan akhir dari

proses rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang terdapat dalam program PPSP.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dijadikan panduan maupun pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kota Pekanbaru secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif yang memiliki tujuan memberikan layanan sanitasi yang layak kepada seluruh penduduk di Kota Pekanbaru. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru juga berisi visi misi sanitasi, tujuan dan sasaran, kebijakan, strategi dan program atau kegiatan dalam pembangunan sektor sanitasi dan hal ini adalah program dari Walikota Herman Abdullah yang dilanjutkan oleh Walikota Firdaus, ST, MT hingga sekarang masih dilaksanakan.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada sebelumnya. Meskipun masa implementasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 telah berakhir. Apabila dilihat lebih mendetail dengan pembagian sektor sanitasi ke dalam tiga sub-sektor yakni air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan, maka hingga kini masih terdapat berbagai permasalahan dalam masing-masing sub-sektor. Misalkan pada sub sektor air limbah domestik masih terdapatnya permasalahan pada aspek teknis seperti perilaku BABS yang masih terjadi ditengah-tengah masyarakat, jamban yang kurang layak, truk tinja yang belum dimiliki oleh pemko Pekanbaru, dan IPLT yang tidak berfungsi, dilain sisi pada aspek non teknis dari sub sektor persampahan juga terdapat permasalahan seperti perda mengenai pengolahan sampah rumah tangga belum tersosialisasi

dengan baik sehingga perda belum berjalan optimal dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah.

Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru tahun 2014-2018 telah diterapkan diseluruh kecamatan Kota Pekanbaru tidak terkecuali di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan memiliki luas wilayah 59,81 km² dan termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP) 5 yang mana pertambahan jumlah penduduknya paling tinggi diantara kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Pekanbaru, diketahui jumlah seluruh penduduk di Kecamatan Tampan pada tahun 2017 sebesar 287.801 jiwa, angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,96 persen dari tahun 2016, sehingga kepadatan penduduk dikecamatan Tampan mencapai 4.811 jiwa/km², hal ini juga akan memicu berbagai permasalahan sanitasi lingkungan yang terjadi di Kecamatan Tampan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sanitasi dan untuk memberikan layanan sanitasi bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang menerapkan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang telah dilaksanakan dalam pembangunan dan peningkatan akses pelayanan sanitasi kepada seluruh masyarakat kecamatan Tampan melalui kegiatan-kegiatan atau program yang terdapat di dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018.

Untuk mengetahui keberhasilan penerapan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “*Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan*”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan melalui uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang terjadi seperti berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimanakah aspek sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 ?
3. Apakah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 sudah efektif di Kecamatan Tampan ?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di kecamatan Tampan.

1.3.2. Sasaran

Mengacu pada rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018.
2. Mengidentifikasi aspek sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018.

3. Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 dikecamatan Tampan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai sanitasi lingkungan dalam penerapan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i, pemerintah, masyarakat, maupun perguruan tinggi dengan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sekaligus kontribusi dari penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja terhadap pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan sanitasi.
2. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai bahan referensi dalam memahami penelitian mengenai pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru.
3. Bagi perguruan tinggi, yaitu sebagai bahan referensi untuk memperkaya khasanah penelitian dibidang sanitasi lingkungan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam hal ini dibagi atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup materi bertujuan untuk membatasi materi pembahasan. Sedangkan ruang lingkup spasial bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Studi ini di batasi pada penerapan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sektor air limbah domestik dan

sektor persampahan yang telah di terapkan di seluruh kecamatan kota di Pekanbaru dan merupakan bagian dari tahapan-tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Pengenalan program PPSP,
2. Pengembangan kelembagaan dan peraturan,
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK),
4. Penyusunan Memorandum Program (MP),
5. Pelaksanaan/implementasi,
6. Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan.

Namun, dalam melakukan analisis peneliti hanya membatasi tahapan-tahapan yang memiliki fokus pada penerapan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 saja, sehingga tahapan-tahapan yang akan di analisis adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan program PPSP,
2. Pengembangan kelembagaan dan peraturan.
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).
4. Pelaksanaan / implementasi.

Setelah di lakukan analisis terhadap pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kota Pekanbaru, kemudian di lakukan identifikasi terhadap kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek cakupan pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 lalu diberi penilaian terhadap kondisi eksisting sanitasi tersebut.

Adapun aspek-aspek cakupan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di kecamatan Tampan pada sektor air limbah domestik dan sektor persampahan meliputi :

1. Aspek kelembagaan dan peraturan,
2. Aspek peran stakeholders,
3. Aspek teknis sistem pengelolaan, dan
4. Aspek keuangan.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan pada sektor air limbah domestik dan sektor persampahan. Evaluasi efektivitas yang di gunakan berdasarkan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) dengan menggunakan alat analisis skala likert, adapun indikatornya meliputi :

1. Pemahaman program.
2. Tepat sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

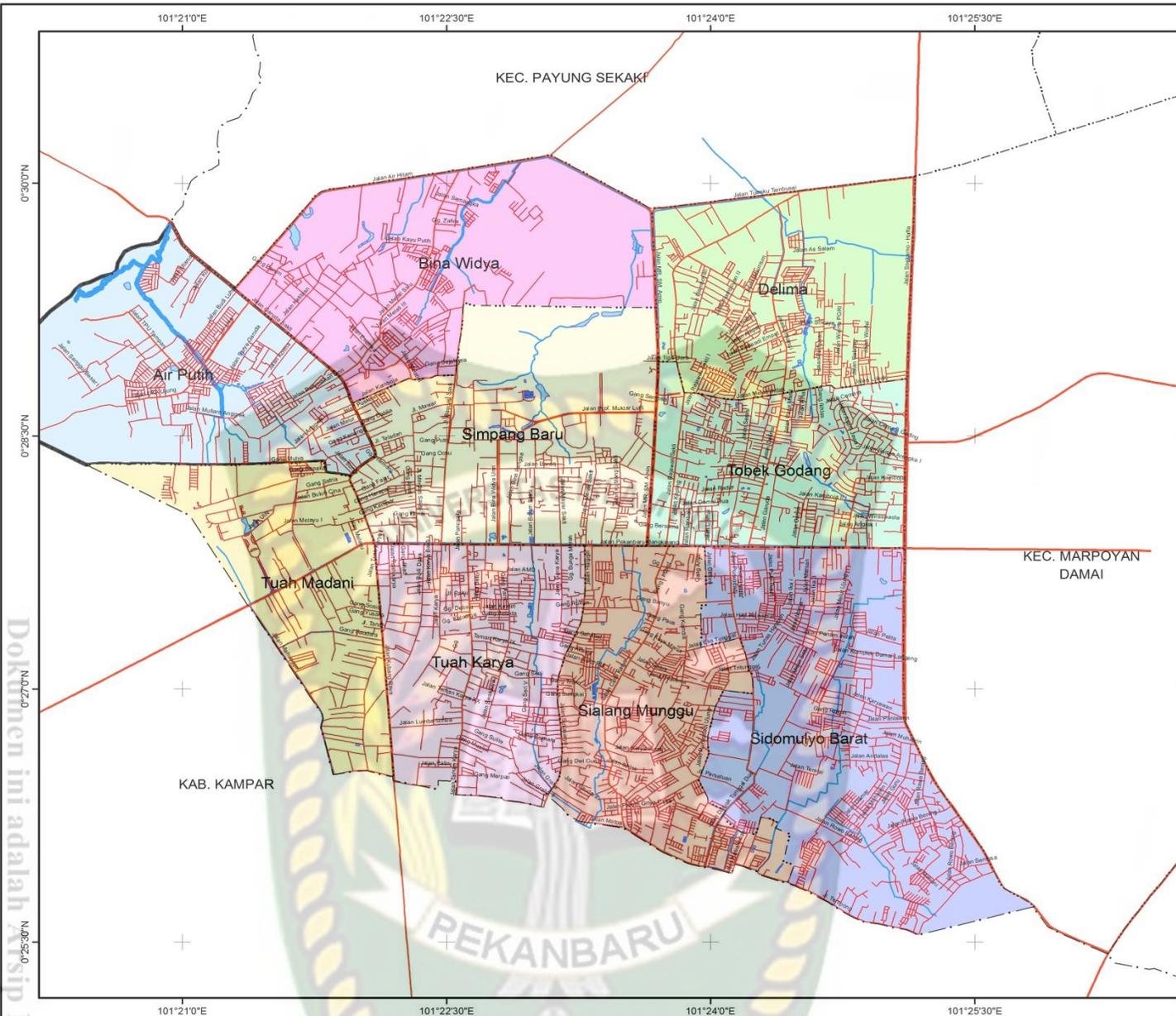
Ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan total luas wilayah Kecamatan Tampan ialah 59,81 km² yang terdiri dari 9 Kelurahan antara lain Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Delima, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tobek Gadang, Kelurahan Sialang Munggu dan Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan pada Kecamatan Tampan Mulai

mekar pada tahun 2017, di tahun sebelumnya di Kecamatan Tampan hanya terdapat 4 kelurahan saja.

Batas Administrasi Kecamatan Tampan kota Pekanbaru adaalah sebagai berikut :

1. Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
2. Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

1.6 Kerangka Pemikiran Studi

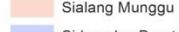
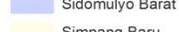
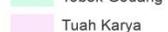
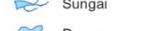


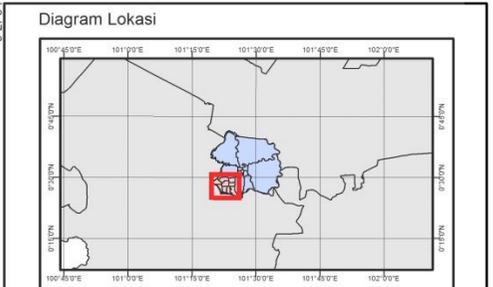
GAMBAR 1.1 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN TAMPAN


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Legenda:

Batas Administrasi	Kelurahan
--- Kabupaten	 Air Putih
--- Kecamatan	 Bina Widya
--- Kelurahan	 Delima
Jaringan Jalan	 Sialang Munggu
 Jalan Arteri	 Sidomulyo Barat
 Jalan Kolektor	 Simpang Baru
 Jalan Lokal	 Tobek Godang
Perairan	 Tuan Karya
 Sungai	 Tuan Madani
 Danau	



Sumber Data:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50.000
 2. Draft RTRW Kota Pekanbaru

Dibuat Oleh :
 Zulfrinaldi / 143410610

LATAR BELAKANG

Indonesia banyak mencetuskan program pembangunan yang menjaga keseimbangan lingkungan, salah satunya program di bidang sanitasi yaitu Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga 2010, kemudian di lanjutkan pada program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2010 yang penerapan pelaksanaannya pada Strategi Sanitasi Kota (SSK).

SSK kota Pekanbaru adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Sanitasi dikota Pekanbaru secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memberikan layanan Sanitasi bagi seluruh masyarakat kota Pekanbaru.

Masa implementasi SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 telah berakhir. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang menerapkan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018, maka dari itu perlu di lakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018.



RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimanakah kondisi eksisting sanitasi di kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 ?
3. Apakah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 sudah efektif di Kecamatan Tampan ?



TUJUAN PENELITIAN

Mengevaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan.



SASARAN PENELITIAN



1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi studi penelitian, permasalahan-permasalahan yang ada serta tujuan dan manfaat didalam peneltian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan hasil-hasil penelitian terdahulu, teori-teori dan konsep-konsep yang relevan di dlam objek penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

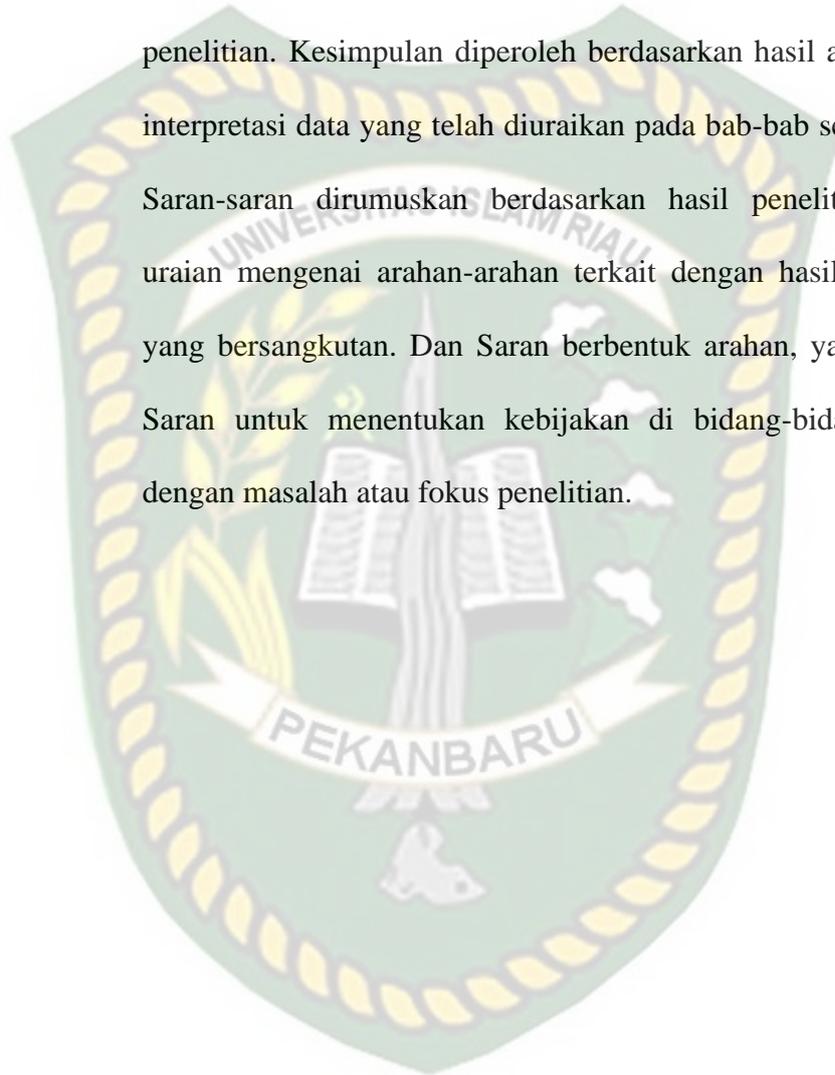
BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai arahan-arahan terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Dan Saran berbentuk arahan, yang dimana Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo,2007). Lanjut menurut Notoadmojo, sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Melihat gambaran dan kenyataan diatas maka sesungguhnya orang yang tidak memperhatikan dan menjaga lingkungannya dengan baik akan berdampak pada manusia itu sendiri, sedangkan dalam Agama Islam *Allah* telah menyampaikan firmanNya dalam Q.S. Al-Baqarah/2:195

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahanya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Departemen Agama RI, Tahun 1989:195).

Dari kutipan ayat diatas dapat digambarkan bahwa masyarakat yang kurang memperhatikan kondisi sanitasi lingkungan sekitar otomatis media penyebaran penyakit semakin luas dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang berada pada lingkungannya. Dengan demikian jika

manusia ingin terhindar dari ancaman penyakit akibat sanitasi yang buruk dari lingkungan sekitarnya, manusia harus menjaga lingkungannya dengan sebaik-baiknya. Dengan akal pemikiran manusia yang seharusnya lebih cerdas, seharusnya pula manusia bisa menjaga kelestarian alam ini, tetapi pada kenyataannya seperti yang kita lihat hari ini, kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana, masih ada waktu untuk manusia mengembalikan keadaan lingkungan menjadi lebih baik dari hari ini.

Menurut UN Water (2008) dalam Jovanni (2016) elemen sanitasi terdiri atas sanitasi dasar rumah tangga, manajemen limbah padat rumah tangga, drainase air limbah rumah tangga dan air hujan serta pengelolaan limbah industri. Dimana masalah sanitasi lingkungan permukiman disebabkan oleh kondisi drainase, penyaluran limbah dan persampahan yang buruk. Sanitasi lingkungan dalam hal ini adalah sanitasi pada air limbah domestik dan persampahan.

2.1.1 Definisi Air Limbah Domestik

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017, Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). Air limbah domestik berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tetapi tidak termasuk tinja (UU No 18 Tahun 2018). Sumber air limbah domestik dari rumah tangga adalah sebagai berikut (kementerian PUPR) :

1. WC/kakus/jamban. Air limbah domestik yang berasal dari sumber ini sering disebut dengan istilah black water.

2. Kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak (dapur). Air limbah domestik yang berasal dari sumber ini sering disebut dengan istilah grey water

2.1.2 Definisi Persampahan

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, sedangkan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013).

2.2 Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru

Salah satu program pemerintah dalam bidang sanitasi adalah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga kedaerah hingga melibatkan pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non pemerintah diseluruh tingkatan. Program ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 dan salah satu penerapan pelaksanaannya adalah dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) (www.sanitasi.or.id). Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah suatu dokumen berisi tentang rencana dan tata cara pelaksanaan Sanitasi yang baik sehingga pada pelaksanaan SSK dapat berjalan sesuai rencana dengan apa yang di harapkan.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan

pembangunan Sanitasi Kota Pekanbaru secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memberikan layanan Sanitasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru berisikan visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan sektor sanitasi (2010-2026) dan hal ini merupakan program Walikota Herman Abdullah dan dilanjutkan oleh Walikota Firdaus, ST, MT sampai saat ini masih diterapkan.

2.2.1 Tahapan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Berdasarkan Ditjen Cipta Karya dalam pedoman penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2014, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP, dimana selanjutnya Kabupaten/Kota juga akan menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS). (Ditjen Cipta Karya dalam pedoman penyusunan SSK, 2014).

Adapun tahap pelaksanaan Program PPSP di daerah adalah sebagai berikut: 1) pengenalan program PPSP, 2) pengembangan kelembagaan dan peraturan 3). penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) 4) penyiapan Memorandum Program (MP) 5) Pelaksanaan/implementasi 6) pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan. Adapun bagian dari tahapan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) pada pelaksanaan PPSP terdapat pada tahapan 3 dan 5.

2.2.2 Aspek-Aspek Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru

Terdapat 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam sanitasi pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru khususnya pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan. Ke 4 (empat) aspek tersebut yang terdiri dari (1) aspek kelembagaan dan peraturan; (2) aspek peran stakeholders; (3) aspek sistem pengelolaan; dan (4) aspek keuangan. Aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sehingga agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya, tidak boleh mengabaikan salah satu aspek yang ada dalam pengelolaan kualitas lingkungan tersebut.

2.2.2.1 Aspek Kelembagaan dan Peraturan

Kelembagaan sebagai unsur utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, menjadi penentu keadaan daerah dan pemajuan pembangunan daerah tersebut dimasa mendatang. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY). Hal penting tentang lembaga adalah landasan hukum kelembagaan yang terdiri dari seperangkat perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan yang hendak di capai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi.

Peraturan atau regulasi dibuat untuk mengatur apa-apa saja yang harus diolah dan dikelola, siapa yang menjadi target dari regulasi tersebut, kapan harus dilakukan pengelolaan dan pengolahan, dimana lokasi pengelolaan dan

pengolahan, mengapa harus dilakukan pengelolaan dan pengolahan serta bagaimana mekanisme kerjanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Menurut Lydia Harlina Martono, Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.

2.2.2.2 Aspek Peran Stakeholders

Konsep Peran Soekanto (2002) mengartikan peran sebagai aspek dinamis dari status (kedudukan), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan ia telah menjalankan suatu peran. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang mempunyai status (kedudukan) tertentu.

Stakeholder adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positive atau negative) oleh suatu kegiatan program pembangunan” Hertifah (2003). Gonsalves et al. yang dikutip oleh Iqbal (2007) mendeskripsikan stakeholder sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Menurut Nugroho (2014) stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu :

- a. Policy creator, stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
- c. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. Implementer, stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

2.2.2.3 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan

Dalam melakukan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan, dibutuhkan perencanaan yang didalamnya sudah memuat berbagai hal teknis lain yang ingin dicapai dalam masing- masing pengelolaannya. Husnan & Suwarsono (2000) menyatakan bahwa aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan pengembangan kegiatan program/proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah kegiatan tersebut selesai di jalankan.

A. Aspek Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik

Berdasarkan DepKes RI, 1993 SPAL yang baik adalah SPAL yang dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat sarana yang tidak memadai. SPAL yang memenuhi syarat kesehatan sebagai berikut :

1. Tidak menimbulkan genangan air yang menjadi sarang serangga/nyamuk.

2. Tidak menimbulkan bau.
3. Tidak menimbulkan becek, kelembaban dan pandangan yang tidak menyenangkan.
4. Mengalir lancar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2017, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. sistem pengolahan dan komponen air limbah domestik dapat dilakukan secara setempat ataupun terpusat. Berikut penjelasannya.

1. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik setempat (on-site)

Dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) salah satu pengolahan awal dari SPAL-S yang paling sederhana adalah cubluk, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk. Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah. Contoh infrastruktur yang termasuk kedalam kategori akses dasar adalah cubluk dan plengsengan. Akses dasar hanya boleh diterapkan di kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Penerapan akses dasar di perkotaan sudah tidak boleh lagi dilakukan dan masuk dalam kategori tidak layak.

Berdasarkan Permen PUPR No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, SPALD Setempat adalah sistem

pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik dilokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sistem sanitasi setempat adalah sistem pembuangan air limbah yang tidak mengumpulkan air limbah ke saluran yang membawanya ke tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, melainkan dibuang di tempat (Ayi Fajarwati, 2000). Pengelolaan air limbah domestik perkotaan sistem setempat terdiri dari 5 komponen yaitu:

1. Buangan air limbah domestik dari hasil kegiatan rumah tangga seperti dapur, kamar mandi, tempat cuci, dan WC.
2. Penampungan dan pengolahan air limbah domestik dalam sarana tangki septik yang kedap dan sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia).
3. Penyedotan air limbah maupun lumpur tinja secara berkala menggunakan jasa penyedotan resmi yang diakui atau terdaftar pada pemerintah setempat. Secara teknis bahwa penyedotan septic tank tidak lebih dari 3 tahun sekali. Penyedotan lumpur tinja umumnya dilakukan 2-3 tahun sekali (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2016).
4. Transportasi lumpur tinja ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) untuk diolah lebih lanjut. Transportasi lumpur tinja harus memenuhi standar yang menjamin tidak terjadi tumpahan atau ceceran lumpur tinja selama perjalanan ke IPLT.
5. Pengolahan lumpur tinja di IPLT sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure).

Gambar 2.1 : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat



Sumber : Kementerian PUPR

Pada gambar di atas hanya membahas komponen 1 dan komponen 2 dari 5 komponen sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan – setempat. Pada sistem tercampur ini, semua sumber air limbah yang masuk ke tangki septik merupakan campuran antara black water dan grey water. Komponen 2 menjelaskan sistem pengolahan setempat menggunakan tangki septik dengan up-flow filter. Tangki septik dengan up-flow filter merupakan tangki septik berbentuk bulat dan perencanaannya mengikuti SNI.

2) Cakupan Pelayanan Sistem SPAL setempat (on-site)

Cakupan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik Setempat / SPALD-S terdiri dari 3 jenis :

1. Cakupan layanan SPAL Setempat dengan skala individual, yaitu cakupan pelayanan skala individual meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
2. Cakupan layanan SPAL Setempat dengan skala komunal, yaitu :
 - a) Lingkup rumah tinggal yaitu meliputi layanan untuk lingkup 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.

- b) Lingkup Mandi Cuci Kakus (MCK), yaitu meliputi layanan untuk lingkup 10 (sepuluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa.

3. Komponen Sistem SPAL setempat (on-site)

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik setempat / SPALD-S terdiri dari :

- 1) Sub-sistem Pengolahan Setempat, unit pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi sumber. Kapasitas pengolahan terdiri atas :
 - a) Skala Individual di peruntukan untuk 1 unit rumah tinggal Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.
 - b) Skala Komunal diperuntukkan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet).
- 2) Sub-sistem pengangkutan, sub-sistem pengangkutan merupakan sarana yang berfungsi untuk melakukan penyedotan/pengurasan memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- 3) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT atau merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

- 4) Sub-sistem Pengolahan akhir, Unit Pembuangan Akhir berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.

B. Aspek Teknis Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam buku pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2018, sistem sanitasi pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah tidak tertangani adalah sampah yang tidak ditangani maupun diangkut ke TPA. Contoh sampah yang tidak tertangani adalah sampah yang dibakar, dibuang ke laut, dibuang ke lahan terbuka, dan dibuang ke sungai.
2. Sampah tertangani skala rumah tangga adalah sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat baik dalam skala individual maupun komunal dengan cara 3R, ditimbun, maupun dikompos. Penanganan skala rumah tangga dengan cara ditimbun disarankan untuk diterapkan di wilayah perdesaan dan tidak disarankan untuk diterapkan di wilayah perkotaan karena keterbatasan lahan. .
3. Sampah tertangani ke pemrosesan akhir adalah sampah yang diangkut dari sumber timbulan ke tempat pemrosesan akhir baik melalui pengangkutan langsung maupun tidak langsung. Pengangkutan langsung adalah pengangkutan sampah langsung dari sumber timbulan ke tempat pemrosesan akhir, sementara pengangkutan tidak langsung adalah pengangkutan sampah dari timbulan sampah dengan sebelumnya melalui TPS terlebih dahulu hingga akhirnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

4. Pengurangan sampah adalah pengelolaan sampah yang diterapkan dengan upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah baik di fasilitas TPS 3R, TPST, maupun bank sampah.

Secara umum sampah yang berasal dari rumah hunian, ada yang langsung dibakar dan ada yang ditaruh ditong sampah/diatas pagar rumah hunian. Lalu, sampah tersebut diangkut menggunakan gerobak. Sampah tersebut diangkut menuju ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS), setelah sampah terkumpul kemudian sampah tersebut dibuang menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Mardianto, Anna Rumia, Febby Asteriani, dan Puji Astuti, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah meliputi :

1. Pemilahan/pewadahan

Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. Dengan adanya pemilahan di sumber diharapkan masyarakat dapat memilih sampah yang dapat di daur ulang kembali. Pemilahan di sumber biasanya dilakukan pada tempat sampah yang telah terbagi, misalnya tempat sampah organik dan nonorganik. Sehingga petugas dapat membedakan sampah yang dapat di daur ulang dan tidak.

Sedangkan kegiatan pewadahan sampah merupakan kegiatan penyimpanan sampah sementara yang dilakukan sendiri oleh masyarakat atau pemilik rumah, sebelum sampah dikumpulkan ditempat penampungan sementara atau diangkut

ketempat pembuangan akhir. Jenis wadah yang digunakan antara lain: kantong plastik, keranjang plastik, tong sampah, bak sampah, kontainer.

Kriteria Wadah sampah diuraikan dalam SNI No 19-2454-2002 adalah (a) tidak mudah rusak dan kedap air (b) ekonomis, mudah diperoleh dibuat oleh masyarakat, (c) mudah dikosongkan.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Menurut Pramono (dalam Suparmi A.Asipian 2009), proses pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan sistem *door to door*, *pick up the container* atau partisipasi masyarakat. Sistem *door to door* adalah sistem pengumpulan yang langsung datang dari satu rumah ke rumah lainnya dengan mengetuk pintu dan penghuni rumah langsung menyambutnya dengan membawa bungkus sampah. Sedangkan sistem *pick up the container* adalah sistem pengumpulan sampah dengan mengambil sampah yang berada di tempat sampah depan rumah. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

- a. Pola individual langsung. Proses pengumpulan dengan cara mengumpulkan sampah dari setiap sumber sampah (*door to door*) dan diangkut langsung ke TPA tanpa melalui proses pemindahan.
- b. Pola individual tak langsung. Proses pengumpulan dengan cara mengumpulkan sampah dari setiap sumber sampah (*door to door*) dan

diangkut ke TPA melalui proses pemindahan ke tempat pembuangan sementara atau stasiun pemindahan (*transfer depo*).

- c. Pola komunal langsung. Proses pengumpulan dengan cara mengumpulkan sampah dari setiap sumbernya dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga dan lain sebagainya) kemudian dibuang ke pewadahan komunal berupa tong/bak/kontainer sampah komunal, yang telah disediakan. Kemudian dari setiap titik pewadahan komunal langsung diangkut ke TPA oleh petugas, tanpa proses pemindahan.
- d. Pola komunal tak langsung. Proses pengumpulan sampah dari setiap sumbernya dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga dan lain sebagainya) kemudian dibuang ke pewadahan komunal berupa tong/bak/kontainer sampah komunal, yang telah disediakan. Selanjutnya dari setiap titik pewadahan komunal, sampah dipindahkan oleh petugas ke tempat pembuangan sementara atau stasiun pemindahan (*transfer depo*), yang kemudian diangkut ke TPA.

3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir (SK SNI 19-2454-2002). Untuk menunjang kelancaran dalam dalam pengangkutan sampah diperlukan sarana pengangkutan sampah seperti dump truck/tipper truck, armroll truck, compactor truck, street sweeper vehicle dan trailer (Permen PU nomor 3 tahun 2013). Jenis peralatan atau sarana pengguna dapat berupa :

1. Dump Truck Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk mengangkat bak dan membongkar muatannya. Truk ini memiliki kapasitas yang bervariasi yaitu 6 m³, 8 m³, 10 m³, 14 m³.
2. Arm Roll Truck Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk mengangkat bak dan membongkar muatannya. Truk ini memiliki kapasitas yang bervariasi yaitu 6 m³, 8 m³, dan 10 m³..
3. Compactor Truck Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk memadatkan dan membongkar muatannya. Truk ini memiliki kapasitas yang bervariasi yaitu 6 m³, 8 m³, dan 10 m³.
4. Trailer Truck Merupakan kendaraan angkut berdaya besar sehingga mampu mengangkut sampah dalam jumlah besar hingga 30 ton.

Pola pengangkutan sampah dapat dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampah. Jika pengumpulan dan pengangkutan sampah menggunakan sistem pemindahan (TPS/TPS 3R) atau sistem tidak langsung, proses pengangkutannya dapat menggunakan sistem kontainer angkat (Hauled Container System = HCS) ataupun sistem kontainer tetap (Stationary Container System = SCS). Sistem kontainer tetap dapat dilakukan secara mekanis maupun manual. Sistem mekanis menggunakan compactor truck dan kontainer yang kompetibel dengan jenis truknya. Sedangkan sistem manual menggunakan tenaga kerja dan kontainer dapat berupa bak sampah atau jenis penampungan lainnya.

Frekuensi pengangkutan perlu ditetapkan dengan teratur, disamping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi dapat diperkirakan.

Frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan kegiatannya. Frekuensi pelayanan dapat dilakukan 3 hari sekali atau maksimal 2 kali seminggu.

4. Tempat penampungan sementara (TPS)

TPS adalah fasilitas yang terletak dekat dari daerah perumahan atau daerah komersial (Yudithia, 2012). TPS digunakan untuk menerima dan menampung sampah dari kendaraan pengumpul hingga dapat dipindahkan ke kendaraan transfer yang lebih besar untuk dibuang kembali ke TPA, (Eshet dkk, 2007). TPS harus memenuhi kriteria teknis antara lain:

- a. Luas TPS, sampai dengan 200 m²
- b. Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen
- c. Sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam
- d. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas
- e. TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA

5. Pengolahan sampah

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan skala kawasan dapat dilakukan TPS 3R (Permen PU nomor 3 tahun 2013). Persyaratan TPS 3R yaitu :

- a. Luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²
- b. Jenis pembangunan penampung residu/sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen

- c. Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km
 - d. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas
 - e. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah.
6. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Menurut Gidaracos (2005) dalam faizan dkk (2020) secara umum pemilihan TPA didasarkan pada kesamaan karakteristik kota mengingat sampah padat yang dihasilkan dalam suatu kota bervariasi sebagai konsekuensi dari musim, gaya hidup, demografis, geografis, dan dampak perundang-undangan. Pemrosesan akhir sampah merupakan kegiatan tahap akhir dari system pengelolaan sampah dimana sampah diamankan disuatu tempat (TPA) agar dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan

2.2.2.4 Aspek Keuangan

Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga pengelola, dibutuhkan adanya dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang memadai untuk Pemerintah Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memadai untuk pemerintah daerah. Salah satu elemen penting yang dapat menunjang keberhasilan pengelolaan sanitasi lingkungan adalah dengan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai dalam proses pelaksanaannya. Tanpa anggaran yang memadai, akan susah mencapai hasil optimal yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Dibutuhkannya kepedulian Pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai dalam

pengelolaan limbah tinja mengingat teknologi pengolahan limbah yang mahal dan bersifat kontinu dalam penggunaannya.

Selain mendapatkan anggaran dari Pemerintah, perlu mempertimbangkan pendanaan dari pihak lain seperti swasta. Peluang pendanaan dari swasta cukup besar, mengingat adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.3 Evaluasi

2.3.1 Definisi Evaluasi

Menurut Islamy (Dalam Akbar 2018), evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilai atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya. Menurut Aprilia (2009), kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, atau perlu diperbaiki, atau dihentikan kegiatan tersebut.

2.3.2 Konsep Evaluasi Program

Program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu sebagai berikut.

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Suharsmi Arikunto (2004:14) “Evaluasi program yaitu proses penetapan yang sistematis mengenai nilai, tujuan, efektifitas / kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu sebagai berikut.

- a. Indikator masukan (*input*),
- b. Proses (*process*)
- c. Keluaran (*output*),
- d. Indikator dampak atau (*outcome*)

Berdasarkan P.P No 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan

pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program

2.3.3 Model Evaluasi Formatif dan Sumatif

2.3.3.1 Evaluasi formatif

The Program Evaluation Standards (1994) mendefinisikan evaluasi formatif sebagai evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Sepanjang pelaksanaan kebijakan, program atau proyek dapat dilakukan sejumlah evaluasi formatif sesuai dengan kebutuhan atau kontrak kerja evaluasi.

2.3.3.2 Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya untuk mengukur indikator-indikator sebagai berikut : (a) Hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program - Mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program, (b) menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan program, (c) menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai, (d) menentukan apakah klien mendapatkan manfaat dari program, (e) menentukan

komponen yang mana yang paling efektif dalam program, (f) melakukan keluaran yang tidak diantisipasi dari program, (g) menentukan *cost* dan *benefit program*, (h) mengkomunikasikan temuan evaluasi kepada para pemangku kepentingan, (i) mengambil keputusan apakah, program harus dihentikan, dikembangkan, atau dilaksanakan ditempat lain.

2.3.3.3 Evaluasi Outcame Menggunakan Skala Likert

Evaluasi digunakan sebagai pengukuran dari konsenkuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan dari suatu tindakan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang akan dinilai. Dalam melakukan sebuah evaluasi perlu mempertimbangkan pendekatan yang akan digunakan. Pada dasarnya terdapat tiga pendekatan evaluasi yang bisa dipertimbangkan, antara lain : (1) *Goal-based evaluation* (berkaitan dengan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan), (2) *Process-based evaluation* (pedekatan yang digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu program berjalan), dan (3) *Outcame-based evaluation* (pendekatan yang digunakan untuk mengukur sejauh maana kinerja yang sudah dilakukan serta dampak yang ditimbulkan). Mengenai outcame-based evaluation yang lebih dikenal dengan evaluasi outcame didalam melakukan suatu evaluasi perencanaan..

2.4 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingat S. (1994) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa ,“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar ontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. Soewarno Handayani (1983) dalam Ade Gunawan (2003) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Setiap program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh organisasi manapun pasti memiliki tingkat keberhasilan atau pencapaian target tertentu. Tak terkecuali kegiatan atau program yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan, yang memiliki target tertentu. Pencapaian target ini salah satunya dapat diukur dengan melihat efektivitas dari pelaksanaan kegiatan atau program tersebut. Secara

singkat, Drucker (1954) mendefinisikan efektivitas sebagai “melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*)” (Saputra, 2008).

Dari beberapa definisi atau pengertian mengenai konsep efektivitas di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa efektivitas dapat diketahui melalui pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diukur jika sudah terdapat hasil atau pencapaian dari berbagai kegiatan atau proyek yang dilakukan. Dengan berpijak pada teori-teori yang digunakan di atas, maka yang dimaksud dengan efektivitas dalam tulisan ini adalah tingkat pencapaian tujuan atau target dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Dalam mengukur efektivitas ini digunakan beberapa indikator yang bisa memberikan gambaran dari pencapaian atas program atau kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Dalam hal ini, jika indikator tersebut menunjukkan semakin mendekati sasaran atau target, maka semakin efektif pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.4.1 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan Efektivitas Menurut Martani dan Lubis (1987:55), ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

2.4.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2001). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi dikatakan efektif bila tujuan suatu organisasi tersebut tercapai. Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu organisasi tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh (campbell, 1989:121). Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata (Sutrisno, 2007 : 125-126).

Efektif lebih mengarah pada pencapaian sasaran, organisasi dikatakan efektif bila tujuan suatu organisasi tersebut tercapai. Soewarno Handayani S. (2006) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi efektivitas dalam penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan Perubahan nyata. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *skala likert* dalam mengelolah data yang didapat dari teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner). Berikut indikator efektivitas sebagai berikut

Variabel efektivitas mengacu pada teori efektivitas menurut Sutrisno (2007 : 125-126), yaitu :

1. Pemahaman Program. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan.
2. Tepat Sasaran. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Apakah pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2015-2018 di Kecamatan Tampan bermanfaat bagi yang menerima atau

tidak. Sehingga indikator ini penting digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu program / kegiatan.

3. Tepat Waktu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.
4. Tercapainya Tujuan. Pencapaian tujuan dari pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tercapainya sasaran pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan.
5. Perubahan Nyata. Indikator ini digunakan untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018.

Dari deskripsi diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru masa implementasinya telah selesai, yang mana Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Sanitasi Kota Pekanbaru secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memberikan layanan Sanitasi bagi masyarakat kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Efektivitas tersebut dibangun atas lima indikator, yaitu 1) Pemahaman program, 2) Tepat sasaran, 3) Teat waktu, 4) Tercapainya tujuan, dan 5) Perubahan nyata.

2.5 Peneliti terdahulu

Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

1. “*Strengthening local governance arrangements for sanitation: case studies of small cities in Indonesia*” diteliti oleh Joanne Chong, Kumi Abeysuriya, Lenny Hidayat, Hery Sulistio, and Juliet Willetts. 2016.
2. “*Impact of Indian Total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use: A Cross-Sectional Study in Orissa Three Years following Programme Implementation*” diteliti oleh Sharmani Barnard, Parimita Routray, Fiona Majorin, Rachel Peletz, Sophie Boisson, Antara Sinha, Thomas Clasen. 2013.
3. “Analisis Pelaksanaan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) di Kota Depok” diteliti oleh Diyan Mailita Sari. 2013.
4. “Studi tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang” diteliti oleh Midia Juniar. 2013.
5. “Strategi Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan Tahun 2015” diteliti oleh Fajar Ramadhani. 2015.
6. “Evaluasi Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Ppsp) Di Kabupaten Sukoharjo” diteliti oleh David Silaen. 2017
7. “Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Kota Blitar)” Di diteliti oleh Kiky Della Citrawuni, Suryadi, Imam Hanafi. 2015.

Penjelasan tentang penelitian-spenelitian di atas terebut berada di tabel 2.2 untuk mempermudah pemahaman pembaca terkait penelitian tersebut dan bagaimana keterkaitan serta perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
1	Joanne Chong, etal (2016)	Strengthening local governance arrangements for sanitation: case studies of small cities in Indonesia	Mengevaluasi implementasi program Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Kualitatif pendekatan kualitatif	1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas perencanaan sanitasi dan investasi di Sumatera adalah proses-proses perencanaan sanitasi secara sistematis menggunakan pedoman strategis. 2. Ditemukan juga bahwa, Pokja mempunyai potensi menggunakan otoritas mereka secara efektif mengkoordinasikan proses perencanaan sanitasi dan impementasi
2	Barnard , et al./ (2013)	Impact of Indian Total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use: A Cross-Sectional Study in Orissa Three Years following Programme Implementation.	Melakukan evaluasi suatu program sanitasi	Analisis Kuantitatif	Kampanye sanitasi total di India dengan skala besar telah mencapai keuntungan yang besar dalam pemberitaan kakus. Namun, pemberitaan tentang kakus tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan kakus.
3	Diyani Mailita Sari (2013)	Analisis Pelaksanaan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) di Kota Depok	1. Mengetahui pelaksanaan program Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2. Mengetahui hambatan hambatan yang di hadapi pada saat pelaksanaan program PSPP	Deskriptif Kualitatif	1. Dari seluruh tahapan pelaksanaan program PPSP yang ada di Kota Depok dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pokja AMPL Kota Depok beserta OPD-OPD terkait sesuai dengan bidangnya. Tim Pokja yang anggotanya berasal dari berbagai dinas tersebut seharusnya mampu melakukan kegiatan teknis dari pelaksanaan program PPSP, sehingga dimaksudkan mampu mencapai percepatan pembangunan bidang sanitasi dengan target waktu 5 tahunan sesuai dengan target program PPSP. 2. Saat ini Depok belum sampai pada tahapan implementasi program PPSP dan masih dalam tahapan perencanaan, namun berdasarkan keterangan yang dipaparkan dari berbagai narasumber dapat diketahui bahwa Depok sebelum adaprogram PPSP pun sudah melakukan pembangunan dalam bidang sanitasi.

No	Nama Peneliti / tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
4	Midia Juniar (2013)	Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang	3. Untuk menggambarkan bagaimana faktor dialog dan partisipasi mempengaruhi pelaksanaan program SToPS	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan program StoPs telah di laksanakan sesuai dengan prosedur, namun belum dapat dilaksanakan secara sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan dan dukungan.
5	Fajar Ramadhani (2016)	Strategi Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan Tahun 2015	1. Mengetahui bagaimana strategi yang di terapkan Pemerintah Kota dalam mengelolah sanitasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2015. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sanitasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2015	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Strategi Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan maka diperoleh kesimpulan yaitu: a.Lingkungan, budaya dan kelas sosial dan keanggotaan kelompok Perilaku masyarakat di Kecamatan Tampan dalam menciptakan kebersihan lingkungan di Kecamatan Tampan saat ini masih minim dan kurang pengalaman dalam menjaga kebersihan lingkungan. dan masih belum sesuai dengan aturan yang ada, b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Sanitasi Pemerintah Kota pekanbaru di Kecamatan Tampan. banyak masalah-masalah yang timbul akibat dari lingkungan masyarakat yang belum menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Seharusnya memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti tujuan dari kebersihan lingkungan di masyarakat di Kecamatan Tampan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2008 Tentang K3.

No	Nama Peneliti / tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
6	David Silaen (2017)	Evaluasi Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Ppsp) Di Kabupaten Sukoharjo	<p>1. Mendeskripsikan implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>2. Mendeskripsikan kepatuhan pelaksana terhadap Pedoman Pelaksanaan Program PPSP.</p> <p>3. Mengeksplorasi faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi program Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo</p>	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	<p>1. Tahapan implementasi Program PPSP secara garis telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program PPSP.</p> <p>2. faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program PPSP di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut.</p> <p>a. komunikasi. Komunikasi telah dijalin dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo umumnya dan Pokja AMPL khususnya sebagai pelaksana Program PPSP, baik kepada Pemerintah Pusat/Provinsi, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.</p> <p>b. Sumber. Kekurangan sumber berupa dana menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi Program PPSP di Kabupaten Sukoharjo</p> <p>c. Kecenderungan Pelaksana. Kecenderungan pelaksana yang telah memahami dan melaksanakan program PPSP sesuai dengan Pedoman pelaksanaannya, serta memberikan dukungan berupa dana, peralatan, dan pembinaan terbukti menjadi faktor pendukung dalam implementasi program PPSP.</p> <p>d. Aktor terlibat. Aktor-aktor terlibat seperti pihak swasta dan organisasi-organisasi non- pemerintah dalam hal pendanaan, pendampingan, dan pemantauan terbukti menjadi faktor pendukung pelaksanaan Program PPSP di Kabupaten Sukoharjo.</p>

No	Nama Peneliti / tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
7	Kiky Della Citrawuni, Suryadi, Imam Hanafi (2015)	Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Kota Blitar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tahap pelaksanaan SSK 2. Mengetahui penerapan SSK 2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat SSK 	Deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan belum optimal. 2. Faktor internal dipilih kembali menjadi sumber daya manusia dan saranaprasarana. Sedangkan 3. faktor eksternalnya adalah koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. 4. Dengan demikian saran yang diberikan adalah transparansi hubungan antara instansi dan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga mengantisipasi adanya kesalah pahaman. Masyarakat pun juga harus diberikan pengenalan yang lebih agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah juga harus membatasi pembangunan yang terus menerus. Pembangunan yang telah dilakukan harus memberikan lahan bebas untuk ruang terbuka hijau sebagai salah satu cara menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan. 5. Faktor dana juga menjadi masalah sehingga perencanaan yang matang juga harus dilakukan untuk menghindari proses berhentinya proyek sehingga hasil menjadi kurang maksimal

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Didalam suatu penelitian terdapat suatu prosedur kerja yang dipandu oleh suatu metode tertentu yang disebut metode penelitian. Menurut Nazir (1983), metode penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Prosedur mengarahkan urutan-urutan yang akan dilakukan, sedangkan teknik penelitian memberikan alat atau cara apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kombinasi (*mix methods*) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode kombinasi yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian *mix methods* merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif (Creswell, 2010). Sedangkan menurut Sugiyono (2011) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Sementara itu, analisis deskriptif diartikan sebagai suatu penjelasan yang memberikan gambaran tentang suatu objek, peristiwa, kegiatan, atau fenomena yang terjadi.

Dalam pendekatan penelitian terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan dengan menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian mengambil kesimpulan

berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut juga dengan sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Sedangkan pendekatan deduktif adalah proses penalaran dari yang umum menjadi khusus sebagai pendekatan yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan khusus, prinsip umum ke dalam keadaan khusus.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif, yang mana prosedurnya dimulai dari pembentukan dasar-dasar teori dalam mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru, kemudian menentukan variabel-variabel yang akan diteliti untuk menjadi dasar pembuktian di lapangan dan ketentuan yang lainnya, serta mengajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner (angket).

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, atau dengan kata lain data primer adalah data yang langsung di dapat sendiri oleh peneliti yaitu dengan cara survey maupun dengan mengenali informasi yang dapat diperoleh dari data-data pengindraan jauh sebagai sumber datanya. Dalam memperoleh data primer dapat menggunakan cara wawancara, kuisisioner/angket, dan observasi lapangan. Penelitian ini juga menggunakan metode skala likert, sehingga menggunakan sampel yang diambil di lapangan dengan memilih sampel yang mempunyai hubungan serta mendukung penelitian dan dapat dipegang kebenarnya.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian, atau yang diperoleh dari dipihak lain atau penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan pengumpulan data instansi digunakan untuk mengetahui data Kota Pekanbaru dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan wilayah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta instansi pemerintahan diantaranya: Kantor Kecamatan Tampan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. data sekunder ini yang berupa tinjauan teoritis digunakan untuk acuan ataupun untuk menunjang penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Tiga (3) cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara yang digunakan adalah bentuk pertanyaan terstruktur. Dalam hal ini peneliti mula-mula menanyakan rentetan pertanyaan yang telah disusun kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada responden yaitu kepada pihak instansi/dinas terkait guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 dan untuk menilai kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan berdasarkan aspek-aspek sanitasi yang meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran serta stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan, dan aspek keuangan.

b. Literature

Literature merupakan sumber tertulis yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan dari instansi-instansi pemerintah terkait.

c. Observasi atau pengamatan.

Observasi merupakan pengamatan lapangan sesuai dengan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah ditentukan. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah penelitian.

d. Kuesioner

Kuesioner merupakan data yang diperoleh melalui penyebaran kepada masyarakat dalam bentuk pertanyaan baik terbuka/tertutup yang bertujuan untuk mendapatkan hasil di lapangan. Dalam penelitian ini kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat untuk mengukur atau mengevaluasi efektivitas pelaksanaan efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan pada sektor air limbah domestik dan sektor persampahan.

3.4. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh individu yang akan dikenai sasaran generalisasi dan sampel-sampel yang akan diambil dalam suatu penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sampah yang berasal dari Kecamatan Tampan. Berdasarkan jenisnya, populasi dibagi menjadi:

1. *Reference population* yaitu populasi secara keseluruhan.
2. *Study population* yaitu bagian populasi yang terjangkau, tempat penarikan sampel dan menjadi batas penarikan kesimpulan umum.

Populasi target dalam studi penelitian ini adalah Kecamatan Tampan, dan populasi terjangkau adalah kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sialang Mungu dan kelurahan Tobek Godang.

Kecamatan Tampan sebagai populasi target penelitian memiliki 9 kelurahan Kelurahan Delima, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, dan Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tobek Gadang, Kelurahan Sialang Munggu dan Kelurahan Tuah Madani. Total luas area sebesar 59,81Km² dengan total jumlah penduduk sebesar 287.801 jiwa pada tahun 2018.

Untuk pemilihan populasi terjangkau, peneliti menetapkan 3 kelurahan yang meliputi kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sialang Mungu dan kelurahan Tobek Godang. Pemilihan populasi terjangkau ini di dasarkan pada area beresiko sanitasi berbahaya yang terdapat pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 (lampiran). Populasi terjangkau penelitian dan total populasi terjangkau yaitu dari kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sialang Mungu dan kelurahan Tobek Godang dengan jumlah penduduk sebesar lebih kurang

122.725 jiwa dan 30.154 jumlah rumah tangga (KK). (Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018). Berikut tabel jumlah penduduk kecamatan Tampan

Table 3.1 Jumlah Penduduk

No	Kelurahan	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah rumah tangga
1	Simpang Baru	31.396	7 804
2	Sidomulyo Barat	46.791	11 506
3	Tuah Karya	45.628	11 127
4	Delima	28.134	7 009
5	Tuah Madani	17.786	4 356
6	Sialang Munggu	45.901	11 253
7	Tobek Godang	31.196	7 774
8	BinaWidya	18.638	4 566
9	AirPutih	22.331	5 528
	Jumlah	287. 801	70 923

Sumber:Kecamatan Tampan dalam angka 2018

3.5. Sampel penelitian

Sampel merupakan kata benda yang mengandung pengertian objek-objek/bagian dari populasi yang akan diteliti dan dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakter populasi (Yunus, 2010). Secara umum, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi atau disebut juga sampel harus valid. Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan yaitu akurasi atau ketepatan dan presisi. Akurasi adalah tingkat ketidakadaan “bias” dalam sampel, yaitu semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, maka sampel semakin akurat. Sedangkan presisi adalah tingkat kedekatan estimasi awal dengan karakteristik populasi.

Dalam penelitian ini sampel yang akan diteliti mengenai kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan dan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan. Cara pengambilan sampel dilakukan langsung di kawasan permukiman pada kelurahan Buah Karya, kelurahan Sialang Mungu, dan

kelurahan Tobek Godang kecamatan Tampan yang berdasarkan pada rumah tangga (KK). Jumlah sampel yang harus diambil akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan jumlah populasi.

3.5.1. Perhitungan Jumlah Sampel

Perhitungan sampel akan di lakukan pada pembahasan berikut :

1. Rumus slovin

Rumus slovin adalah perhitungan sampel dengan sistem sistematis yang digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. Penggunaan rumus slovin pada penelitian ini mengarah pada kondisi eksisting di kecamatan Tampan yang di sesuaikan pada profil sanitasi sektor air limbah domestik dan sektor persampahan yang terdapat di dalam dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 dan untuk mengukur atau mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran (efektivitas) pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. berikut besar sampel yang dihitung dengan rumus *Slovin* (Sevilla dan Umar Husein 2003):

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Dimana :

n = ukuran Sampel

N = ukuran populasi

d = nilai kritis yang di inginkan, yaitu sebesar 10 % (0,1).

Ukuran populasi (N) di dasarkan pada seluruh jumlah rumah tangga (KK)di Kecamatan Tampan yang berjumlah 70.923 KK. Maka jumlah responden dapat di hitung sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

$$n = \frac{70.923}{\{(70.923) \times (0,1)^2\} + 1}$$

$$n = \frac{70.923}{710,23} = 99,859 = (\text{dibulatkan menjadi } 100 \text{ responden (kk)})$$

Jumlah sampel yang nantinya di perlukan adalah sebanyak 156 responden (KK) di Kecamatan Tampan. Sampel akan di bagi lagi secara proposional pada kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sialang Mungu, dan kelurahan Tobek Godang berdasarkan jumlah anggota populasi terjangkau yaitu sebanyak 30.154 jumlah rumah tangga (KK). Berikut perhitungannya :

$$n = \frac{\text{jumlah anggota sampel}}{\text{jumlah anggota populasi terjangkau}} \times 100$$

Berikut hasil perhitungan dan pembagian jumlah sampel per kelurahan dapat di lihat pada tabel berikt.

- 1) Kelurahan Tuah Karya

$$n = \frac{11.127}{30.154} \times 100 \text{ KK} = 36,9 = 37 \text{ responden (KK)}$$

- 2) Kelurahan Sialang mungu

$$n = \frac{11.253}{30.154} \times 100 \text{ KK} = 37,31 = 37 \text{ responden (KK)}$$

- 3) Kelurahan Tobek Gadang

$$n = \frac{7.774}{30.154} \times 100 \text{ KK} = 25,7 = 26 \text{ responden (KK)}$$

Tabel 3.2 Pembagian jumlah sampel per kelurahan

No	Kelurahan	Sampel (Rumah tangga)
1	Tuah Karya	37
2	Sialang Munggu	37
3	Tobek Godang	26
	Jumlah	100

Sumber : Analisis, 2019

3.5.2. Teknik Pengambilan Sampel

Secara umum ada dua jenis teknik sampling yaitu: sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Teknik penarikan sampling probabilitas (*probability sampling*) merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan menggunakan panduan matematis berdasarkan teori kemungkinan (*probability theory*) yang mana peluang setiap unit untuk memilih sampel telah dapat diketahui. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih atau menarik sampel secara acak (*random*) dari suatu daftar yang berisi seluruh data anggota populasi yang tengah diambil sampelnya. Sedangkan teknik sampel non-probabilitas (*non-probability sampling*) merupakan teknik penarikan sampel yang tidak mengikuti panduan teori probabilitas matematis. Namun dengan demikian, karakteristik yang paling penting yang akan membedakan kedua tipe sampel adalah bahwa sampling probabilitas memungkinkan peneliti untuk menghitung jumlah kesalahan sampling (*sampling error*) pada suatu penelitian, sedangkan sampling non-probabilitas tidak dapat menghitung jumlah kesalahan sampling.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Pada *teknik purposive sampling* salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Teknik ini peneliti

gunakan untuk menentukan informan yang memiliki pengalaman dan informasi mengenai gejala yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau ;
2. Tenaga ahli (Fasilitator) bidang sanitasi kota Pekanbaru dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau ;
3. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru ;
4. Sub Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah (P3W) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru ;
5. Seksi Pendataan dan Perencanaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru.
6. Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Cipta Karya di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru ;
7. Kasi penanganan dan pemrosesan akhir sampah bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru ;
8. Kasi Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru mengatakan.
9. Pihak pengelola Tempat Pengolahan Sampah Komunal / TPS 3R di Kecamatan Tampan

Sedangkan *simple random sampling* (acak) dimana pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi atau unsur-unsur yang mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di Kecamatan Tampan. Jumlah sampel yang nantinya di perlukan adalah sebanyak 156 responden (KK) di Kecamatan Tampan. Sampel akan di sebar proposional pada kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sialang Mungu, dan kelurahan Tobek Godang.

3.6. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan untuk mendukung dan memudahkan dalam penelitian sesuai tahapannya, tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut.

3.6.1 Tahapan Persiapan

Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan di tahap persiapan dalam tugas akhir ini yaitu:

- 1) Menentukan lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru.
- 2) Mengurus perizinan untuk keperluan penelitian dan survey data berupa izin riset dari BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Riau, dan diteruskan di Kesbangpol Kota Pekanbaru untuk surat diperbanyak dan kemudian disebar ke instansi-instansi dan dinas terkait.
- 3) Menentukan data-data yang diperlukan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti : Kecamatan Tampan dalam angka, dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan lain-lainnya.

- 4) Menentukan data primer yaitu melihat kebutuhan yang dilakukan dalam kuesioner dan wawancara.
- 5) Observasi yaitu melakukan peninjauan/pengamatan antara data sekunder dan observasi lingkungan.

3.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi dan waktu penelitian ditetapkan agar dapat melakukan proses pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru. Untuk melihat waktu penelitian tersebut berikut Tabel 3.3 langkah pelaksanaan :

Tabel 3.3 Langkah Pelaksanaan

No	Langkah Pelaksanaan	Waktu
1	Wawancara identifikasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) tahun 2014-2018 Kota Pekanbaru	01 November 2020 – 01 Februari
2	Observasi kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan di Kecamatan Tampan	01 November 2020 – 01 Februari
3	Wawancara instansi/dinas terkait, untuk melakukan penilaian kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan di Kecamatan Tampan	01 November 2020 – 01 Februari
3	Penyebaran kuesioner di Kecamatan Tampan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) tahun 2014-2018 Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan	01 November 2020 – 01 Februari

Sumber : Hasil Analisis, 2020

3.7. Teknik Analisis data

3.7.1 Identifikasi Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018

Dalam teknik identifikasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjabarkan hasil analisis yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

literature dan wawancara. Melalui literatur dan wawancara ini akan diperoleh data yang dapat dijadikan landasan untuk menganalisa pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) tahun 2014-2018 Kota Pekanbaru yang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan program PPSP yang meliputi pengembangan program PPSP, kelembagaan dan peraturan, penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), penyusunan dokumen SSK Kota pekanbaru 2014-2018, serta Pelaksanaan SSK Kota pekanbaru tahun 2014-2018. (Sumber : Ditjen Cipta Karya dalam buku manual pengelolaan program PPSP dan Ditjen Cipta Karya dalam pedoman buku penyusunan SSK tahun 2014).

3.7.2. Identifikasi Aspek Sanitasi di Kecamatan Tampan Berdasarkan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru

Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif kuantitatif (*mix methods*). Menurut Sugiyono (2011:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Untuk mengetahui kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan khususnya pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan indikator yang digunakan ialah aspek-aspek sanitasi pada dokumen SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan dan aspek keuangan. Berikut tabel indikator kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan.

Tabel 3.4 Indikator Kondisi Eksisting Sub Sektor Air Limbah Domestik

No	Indikator	Sub indikator
1	Aspek Kelembagaan dan Peraturan	a. Bentuk kelembagaan air limbah domestik b. Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah domestik
2	Aspek peran serta stakeholders	a. Bentuk peran serta investor/pihak swasta b. Bentuk peran serta masyarakat/LSM
3	Aspek teknis sistem pengelolaan	a. Memiliki saluran pembuangan air limbah domestik yang memenuhi syarat b. Tingkat pengelolaan dengan akses dasar c. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang meliputi komponen sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) pengolahan setempat <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kk pengguna pengolahan setempat skala individual • Penetapan lokasi pengolahan komunal • Kondisi bangunan pengolahan setempat skala komunal b) pengangkutan <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, kapasitas, dan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja • Beban sarana pengangkutan • Frekuensi penyedotan tangki septik individual • Frekuensi ritasi c) pengolahan lumpur tinja <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan lokasi IPLT • Kapasitas IPLT dan Jumlah lumpur yang masuk untuk di olah • Kondisi bangunan IPLT d) Sistem Pembuangan Akhir <ul style="list-style-type: none"> • Bidang resapan air tanah, sungai, kebun/lahan sawit d. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Satuan jumlah (unit) b) Kondisi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Berfungsi • Tidak berfungsi c) Pihak pengelola
4	Aspek Keuangan	a. Sumber pembiayaan pengelolaan air limbah domestik

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Tabel 3.5 Indikator Kondisi Eksisting Sub Sektor Persampahan

No	Indikator	Sub indikator
1	Aspek Kelembagaan dan Peraturan	a. Bentuk kelembagaan persampahan b. Tersedianya regulasi pengelolaan persampahan
2	Aspek peran serta stakeholders	a. Bentuk peran serta investor/pihak swasta b. Bentuk peran serta masyarakat/LSM
3	Aspek teknis sistem Pengelolaan	a. Tingkat sampah tertangani skala rumah tangga melalui penimbunan dan pengomposan b. Tingkat Sampah tidak tertangani skala rumah tangga yang di buang ke lingkungan dan di bakar c. Sistem Sanitasi pengelolaan sampah melalui komponen sistem pengelolaan sampah : <ul style="list-style-type: none"> a) Pemilahan/pewadahan: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat masyarakat melakukan pemilahan • Pewadahan individual dan komunal yang memenuhi syarat • Kondisi Pewadahan Komunal (TPS)

No	Indikator	Sub indikator
		b) Pengumpulan <ul style="list-style-type: none"> • Pola pengumpulan sampah c) Pengangkutan <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan kapasitas sarana pengangkutan sampah • Frekuensi / ritasi pengangkutan • Pola pengangkutan sampah • Tingkat masyarakat jasa menggunakan layanan moda pengangkut sampah • Jumlah truk pengangkut sampah d) Pengolahan sampah Komunal (TPS 3R) <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan tempat pengolahan sampah (TPST 3 R) • TPS 3 R yang memenuhi syarat • Jumlah dan kapasitas sampah yang di kelola di TPS 3R • Kondisi Bangunan dan operasional tempat pengolahan sampah (TPST 3 R) e) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas dan Jumlah sampah yang masuk ke TPA perhari • Kondisi Bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) d. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Satuan jumlah (unit) Kondisi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Berfungsi • Tidak berfungsi Pihak pengelola
4	Aspek Keuangan	a. Sumber pembiayaan pengelolaan persampahan

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka dilakukanlah analisis penilaian terhadap indikator yang terdapat dalam aspek-aspek tersebut sehingga menjadi tolak ukur kemajuan pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Sub Sektor Air Limbah Domestik

No	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai
A	Aspek kelembagaan dan peraturan daerah		
1	Regulasi pengelolaan air limbah domestik khususnya yang mengatur tangki septik dan pengurasannya	10	
	a. Sudah lengkap, berupa Peraturan Daerah atau peraturan walikota		5
	b. Sudah namun hanya mengatur retribusi saja, Peraturan Daerah atau peraturan Walikota		3
	c. Belum ada atau sedang dalam penyusunan (rancangan)		1
2	Bentuk Kelembagaan pengelolaan IPALD Komunal	8	
	a. Terpisah dari regulatornya (minimal UPT).		5
	b. Masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas terkait)		3
	c. Belum diatur dalam tupoksi Dinas terkait		1
3	Bentuk Kelembagaan pengelolaan IPLT	8	
	a. Terpisah dari regulatornya (minimal UPT).		5
	b. Masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas terkait)		3
	c. Belum diatur dalam tupoksi Dinas terkait		1
B	Aspek Peran Serta Stakeholders		

No	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai
4	Bentuk Peran serta investor atau pihak swasta	6	
	a Sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana		5
	b Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam mensosialisasi kegiatan atau program sektor air limbah domestik		3
	c Sebagai akselerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat		1
5	Bentuk Peran serta masyarakat atau LSM	6	
	a Sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana		5
	b Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan pembangunan		3
	c Sebagai akselerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat		1
6	Kegiatan kampanye sanitasi, mengenai air limbah (khususnya) Sosialisasi Stop BABS, Sosialisasi bentuk tangki septik yang sesuai SNI, Sosialisasi PHBS, Pemasaran jamban sehat, Sosialisasi pemeliharaan jamban sehat, Sosialisasi penyedotan tangki septik	8	
	a. Ada, lebih dari 3 jenis kegiatan, sudah terjadwal terlaksana		5
	b. Ada, 2-3 jenis kegiatan, sudah terjadwal dan terlaksana		3
	c. Belum ada atau ada, namun masih bersifat insidental		1
C	Aspek Teknis sistem pengelolaan		
7	Kondisi bangunan pengolahan setempat skala komunal (IPALD Komunal)	6	
	a. Bangunan baik, beroperasi		5
	b. Bangunan rusak, beroperasi		3
	c. Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1
8	Jumlah truk penyedot tinja yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional baik	6	
	a. Lebih dari 1 (satu) unit		5
	b. 1 (satu) unit		3
	c. Belum punya, atau semua semua unit yang dimiliki rusak		1
9	Frekuensi penyedotan tangki septik individual	6	
	a 2-3 tahun sekali secara berkala		5
	b > 3 tahun sekali tidak secara berkala		3
	c Tidak pernah		1
10	Keberadaan perusahaan layanan sedot swasta	8	
	a. Lebih dari 2 (dua) perusahaan		5
	b. 1 - 2 perusahaan		3
	c. Tidak ada/ Tidak ada data		1
11	Peraturan perijinan usaha sedot tinja	8	
	a. Sudah diatur, termonitoring dan terealisasi baik		5
	b. Sudah diatur, namun belum ada monitoring		3
	c. Belum ada perijinan, hanya informasi non formal		1
12	Kondisi bangunan dan operasional IPLT	8	
	a. Bangunan baik, beroperasi		5
	b. Bangunan rusak, beroperasi		3
	c. Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1
D	Aspek Keuangan		
13	Alokasi biaya untuk pembangunan IPAL Komunal/MCK	6	
	a Lebih dari 0,8 % dari total APBD untuk sanitasi		5
	b 0,5 % - 0,8 % dari total APBD untuk sanitasi		3
	c Kurang dari 0,5 % dari total APBD untuk sanitasi		1
14	14. Alokasi biaya untuk operasional pemeliharaan dan IPLT	6	

No	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai
	a Lebih dari 0,03% dari total APBD		5
	b 0,01% - 0,03% dari total APBD		3
	c Kurang dari 0,01% dari total APBD		1
	JUMLAH	100 %	
	SKOR MAKS	500 %	
	Prosentase	100 %	

Sumber : Hasil analisis, 2020

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Sub Sektor Persampahan

No	Kriteria	Bobot	Nilai
A	Aspek kelembagaan dan peraturan daerah		
1	Regulasi pengelolaan sampah yang mengatur Penanganan sampah	10	
	a. Sudah lengkap, berupa Peraturan Daerah atau peraturan walikota		5
	b. Sudah namun hanya mengatur retribusi saja, Peraturan Daerah atau peraturan Walikota		3
	c. Belum ada atau sedang dalam penyusunan (rancangan)		1
2	Bentuk Kelembagaan Pengelola penanganan sampah	8	
	a. Terpisah dari regulatornya (minimal UPT).		5
	b. Masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas terkait)		3
	c. Belum diatur dalam tupoksi Dinas terkait		1
B	Aspek Peran Serta Stakeholders		
3	Bentuk Peran serta investor atau pihak swasta	6	
	a Sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana		5
	b Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam mensosialisasi kegiatan atau program pengelolaan sampah		3
	c Sebagai akselerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat		1
4	Bentuk Peran serta masyarakat atau LSM	6	
	a Sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana		5
	b Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan pembangunan		3
	c Sebagai akselerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat		1
5	Kegiatan kampanye sanitasi, mengenai sektor persampahan (khususnya) Sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya, Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya, sosialisasi kebijakan persampahan	8	
	a Ada, lebih dari 3 jenis kegiatan, sudah terjadwal terlaksana		5
	b Ada, 2-3 jenis kegiatan, sudah terjadwal dan terlaksana		3
	c Belum ada atau ada, namun masih bersifat insidental		1
C	Aspek Teknis Sistem Pengelolaan		
6	Kondisi bangunan Tempat penampungan sementara (TPS)	6	
	a Bangunan Baik, beroperasi		5
	b Bangunan rusak, beroperasi		3
	c Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1
7	Sistem kegiatan pengumpulan sampah	6	
	a Dengan sistem Pola individual langsung		5
	b Pola individual tak langsung		3
	c Pola komunal langsung dan tak langsung		1
8	Jumlah truk pengangkut sampah yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional baik	6	
	a Lebih dari 1 (satu) unit		5
	b 1 (satu) unit		3
	c Belum punya, atau semua semua unit yang dimiliki rusak		1

No	Kriteria	Bobot	Nilai
9	Frekuensi pengangkutan sampah	6	
	a Setiap hari		5
	b 2-3 seminggu		3
	c > 3 kali dalam seminggu		1
10	Peraturan perijinan pengangkutan sampah	8	
	a Sudah diatur, termonitoring dan terealisasi baik		5
	b Sudah diatur, namun belum ada monitoring		3
	c Belum ada perijinan, hanya informasi non formal		1
11	Keberadaan tempat pengolahan sampah	8	
	a Lebih dari 2 (dua) TPST 3 R		5
	b 1 - 2 TPST 3 R		3
	c Tidak ada/ Tidak ada data		1
12	Kondisi Bangunan dan operasional tempat pengolahan sampah	8	
	a Bangunan Baik, beroperasi		5
	b Bangunan rusak, beroperasi		3
	c Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1
13	Kondisi Bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	8	
	a Bangunan Baik, beroperasi		5
	b Bangunan rusak, beroperasi		3
	c Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1
D	Aspek Keuangan		
14	Alokasi biaya biaya operasional operasi dan pemeliharaan pengangkutan sampah	6	
	a Lebih dari 0,03% dari total APBD		5
	b 0,01% - 0,03% dari total APBD		3
	c Kurang dari 0,01% dari total APBD		1
	JUMLAH	100 %	
	SKOR MAKS	500 %	
	Prosentase	100 %	

Sumber : Analisis,2020

Penilaian kriteria dengan memilih jawaban sesuai dengan kondisi eksisting, dimana masing-masing pertanyaan sudah memiliki bobot penilaian dan masing- masing jawaban mempunyai bobot nilai tersendiri. Setiap pertanyaan akan dihitung skornya dengan cara melakukan perkalian antara kolom bobot dan nilai yang kemudian hasilnya akan di jumlahkan. Skor dikategorikan menjadi 3 yaitu baik dengan skor nilai antara 351 – 500, Cukup dengan skor nilai antara 180 – 350, Kurang dengan skor nilai kurang dari 180.

3.7.3. Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan pada tahap Pasca Pelaksanaan (*Ex-Post*) diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) tujuan dan sasaran dari SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan pelaksanaannya sudah efektif. Maka dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di kecamatan Tampan dengan menggunakan metode *skala likert* dalam pengolahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner). Dikatakan efektivitas apabila tercapainya tujuan dan sasaran. Evaluasi efektivitas dalam penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan Perubahannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *skala likert* dalam mengolah data yang didapat dari teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner). Berikut Tabel 3.8 indikator efektivitas sebagai berikut

Tabel 3.8 Indikator Efektivitas

No	Indikator	Sub indikator	No Item
1	Pemahaman program	a. Pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru	1,2,3
		b. Sumber informasi tentang pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru	4
2	Tepat sasaran	a. Ketepatan penerima manfaat	5,6
		b. Kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan masyarakat	7, 8
3	Tepat waktu	a. Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan	9
		b. Keberlanjutan Program	10, 11
4	Tercapainya tujuan	a. Tercapainya sasaran pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 sub sektor air limbah domestik pada masyarakat di Kecamatan Tampan	12, 13, 14,
		b. Tercapainya sasaran pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 sub sektor persampahan pada masyarakat di Kecamatan Tampan	15, 16, 17, 18

No	Indikator	Sub indikator	No Item
5	Perubahan nyata	a. Perubahan kualitas lingkungan b. Kebermanfaatan kegiatan / program bagi masyarakat	19, 20 21, 22, 23, 24

Sumber : *Sutrisno, 2007*

Dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Indeks yang digunakan dalam skala ini adalah:

Tabel 3.9 Indeks Skala Likert

No.	Jawaban	Skor
1.	Sangat setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Kurang setuju	3
4.	Tidak setuju	2
5.	Sangat tidak setuju	1

Sumber: *Sugiyono (2012)*

Analisis ini digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam penelitian terkait pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan. Data olahan yang dimasukkan dalam analisis diperoleh dari responden yang menjadi target dalam layanan sanitasi melalui pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Daftar pertanyaan yang diberikan adalah pilihan berganda atau multiple choice dimana jawaban untuk setiap pertanyaan telah disediakan dan responden tinggal memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari lima jawaban yang tersedia. Didalam kuesioner terdapat kegiatan dan program dari dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan yang nantinya akan digunakan sesuai dengan pertanyaan didalam kuesioner. Analisa kuesioner dilakukan dengan memberikan nilai dari hasil kuesioner berdasarkan ranking atau

Skala Linkert. kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Nantinya setelah diperoleh data tersebut barulah dikelompokkan dan diolah sehingga menghasilkan kesimpulan apakah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 ini telah terlaksana dengan efektif atau sebaliknya. Kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil hitungan efektivitas berdasarkan indikator yang tersedia.

Untuk menetapkan peringkat/tingkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antar skor aktual dengan skor ideal. Kemudian menentukan rentang (range) dari nilai minimum dan maksimum kebudian dibagi menjadi 5 untuk menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru pada Skala Likert. Adapun perhitungan yang dimaksud menggunakan prosedur penerapan sebagai berikut :

- a. Mentabulasi jawaban responden
- b. Menghitung jumlah skor aktual dan skor ideal pada masing-masing variabel dengan persentase skor aktual sebagai berikut :

$$\text{persentase skor aktual (\%)} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Sumber : Narimawati Dalam Rahmadani, 2018

Ket :

Skor aktual : skor yang diperoleh

Skor ideal : skor tertinggi

- c. Memghitung batas nilai awal dan nilai akhir dengan mencari indeks minimal, indeks maksimal serta interval dengan menggunakan rumus :

Indek minimal : $Bt \times P \times N$

Indeks maksimal : $Sb \times P \times N$

$$\text{Interval} = \frac{I_{max} - I_{min}}{\text{jumlah indeks}}$$

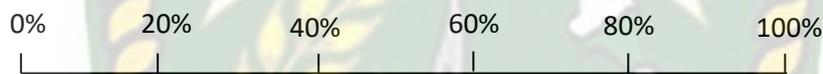
Sumber : Ridwan Dalam Ramadhani, 2018

Ket :

Bt : skor terendah P : indikator yang diteliti

Sb : skor tertinggi N : jumlah responden

d. Grafik skala likert sebagai berikut :



Sumber : Ridwan dalam Ramadhani, 2018

Keterangan :

- a) 81%-100% = Tingkat efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 di Kecamatan Tampan dalam kategori sangat berhasil
- b) 61%-80% = Tingkat efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 di Kecamatan Tampan dalam kategori berhasil
- c) 41-60% = Tingkat efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 di Kecamatan Tampan dalam kategori cukup berhasil
- d) 21%-40% = Tingkat efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 di Kecamatan Tampan dalam kategori kurang berhasil
- e) 0%-20% = tingkat efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 di Kecamatan Tampan kategori sangat tidak berhasil.

3.8. Variabel Penelitian

Tabel 3.10 Variabel Penelitian

Tujuan	Sasaran	Variabel	Indikator	Teknik pengumpulan Data	Metode Analisi dan Penyajian Data
Mengevaluasi tingkat Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di kecamatan Tampan	1. Mengidentifikasi Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018	a) Implementasi kebijakan publik dalam Budi Winarno (2012).	a) Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) tahun 2014-2018 Kota Pekanbaru meliputi: a. Pengenalan program PPSP, b. Kelembagaan dan peraturan, c. Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Penyusunan dokumen Sanitasi Strategi Kota (SSK) Kota pekanbaru 2014-2018 d. Pelaksanaan SSK Kota pekanbaru tahun 2014-2018.	a. Literature b. wawancara	Deskriptif Kualitatif
	2. Mengidentifikasi Aspek Sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018	a) Aspek-aspek sanitasi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan	a) Aspek-aspek cakupan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan meliputi : a. Aspek kelembagaan dan peraturan, b. Aspek peran sertastakeholders, c. Aspek teknis sistem pengelolaan, d. Aspek keuangan.	a) Observasi b) Kuesioner c) Literature d) Wawancara	Deskriptif Kualitatif dan kuantitatif
	3. Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan.	a) Efektivitas menurut Sutrisno (2007).	a) Efektivitas menurut Sutrisno (2007) meliputi : a. pemahaman program, b. tepat sasaran c. tepat waktu, d. tercapainya tujuan, e. perubahan nyata.	a) kuesioner	Deskriptif Kualitatif

Sumber : Analisis, 2020

Tabel 3.11 Desain Survey Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Data yang Dibutuhkan	Sumber Data	Teknik Pengambilan	Analisis	Hasil
1	Mengidentifikasi Penerapan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018	a. Implementasi kebijakan publik dalam Budi Winarno (2012)	a) SK kepala daerah terbentuknya pokja sanitasi kota Pekanbaru b) Perda sektor air limbah domestik dan sektor persampahan c) Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) d) Dokumen SSK Kota pekanbaru tahun 2014-2018	a) Bappeda Kota Pekanbaru b) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	a) Literature b) wawancara	Deskriptif Kualitatif	Diketahuinya tahapan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018
2	Mengidentifikasi Aspek Sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018	a. Aspek-aspek cakupan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018	a) Aspek Kelembagaan dan peraturan a. Bentuk kelembagaan b. Tersedianya regulasi b) Aspek peran serta stakeholders a. Bentuk peran serta investor/pihak swasta b. Bentuk peran serta masyarakat/LSM c) Aspek teknis sistem pengelolaan air limbah domestik : a. Jumlah pengguna Ipal individual dan Ipal Komunal b. cakupan pelayanan skala komunal (IPAL Komunal) c. kapasitas IPAL Komunal d. Jumlah, kapasitas, dan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja e. Frekuensi penyedotan lumpur tinja f. jumlah, kondisi, dan pihak pengelola sarana dan prasarana	a) Bappeda Kota Pekanbaru b) Dinas PUPR Kota Pekanbaru c) Dinas Perkim kota Pekanbaru d) DLHK Kota Pekanbaru e) Observasi lapangan	a) Observasi b) Kuesioner c) Literature d) Wawancara	Deskriptif Kualitatif dan kuantitatif	Diketahuinya kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018

			<p>d) Aspek teknis sistem pengelolaan sektor persampahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sampah tertangani skala rumah tangga b. Sampah tidak tertangani skala rumah tangga c. Pola pengumpulan sampah d. Jenis sarana pengangkutan sampah e. Frekuensi / ritasi pengangkutan f. Pola pengangkutan sampah g. Jumlah dan kapasitas sarana pengangkut sampah h. Jumlah TPS i. Jumlah dan kapasitas sampah TPS resmi j. jumlah, kondisi, dan pihak pengelola sarana dan prasarana <p>e) Aspek keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber pembiayaan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan 				
	<p>3. Identifikasi efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan</p>	<p>a. Efektivitas menurut Sutrisno (2007).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemahaman program b) Tepat sasaran c) Tepat waktu d) Tercapainya tujuan e) Perubahan nyata 	<p>a) Kuesioner</p>	<p>Kuesioner</p>	<p>Analisis Skala likert</p>	<p>Mengetahui Tingkat Efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan.</p>

Sumber: Hasil analisis, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat permukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebulan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan *Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Sian* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kota b.
5. UU No. 22 tahun 1984 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resi pemakaian sebutan Kotamadya
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,50 Km² , setelah diadakan

pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km².

Dengan bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula dengan Kelurahan/Desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 Kelurahan/Desa yang ada sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003).

4.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang membelah Kota menjadi 2 wilayah. Sungai Siak ini pulalah yang kemudian menjadi orientasi Utara-Selatan kota, dimana wilayah diatas Sungai Siak diidentifikasi sebagai daerah Utara kota, dan sebaliknya daerah dibawah Sungai Siak diidentifikasi sebagai daerah Selatan Kota.

Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101⁰14'-101⁰34' BT dan 0⁰25'-0⁰45' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

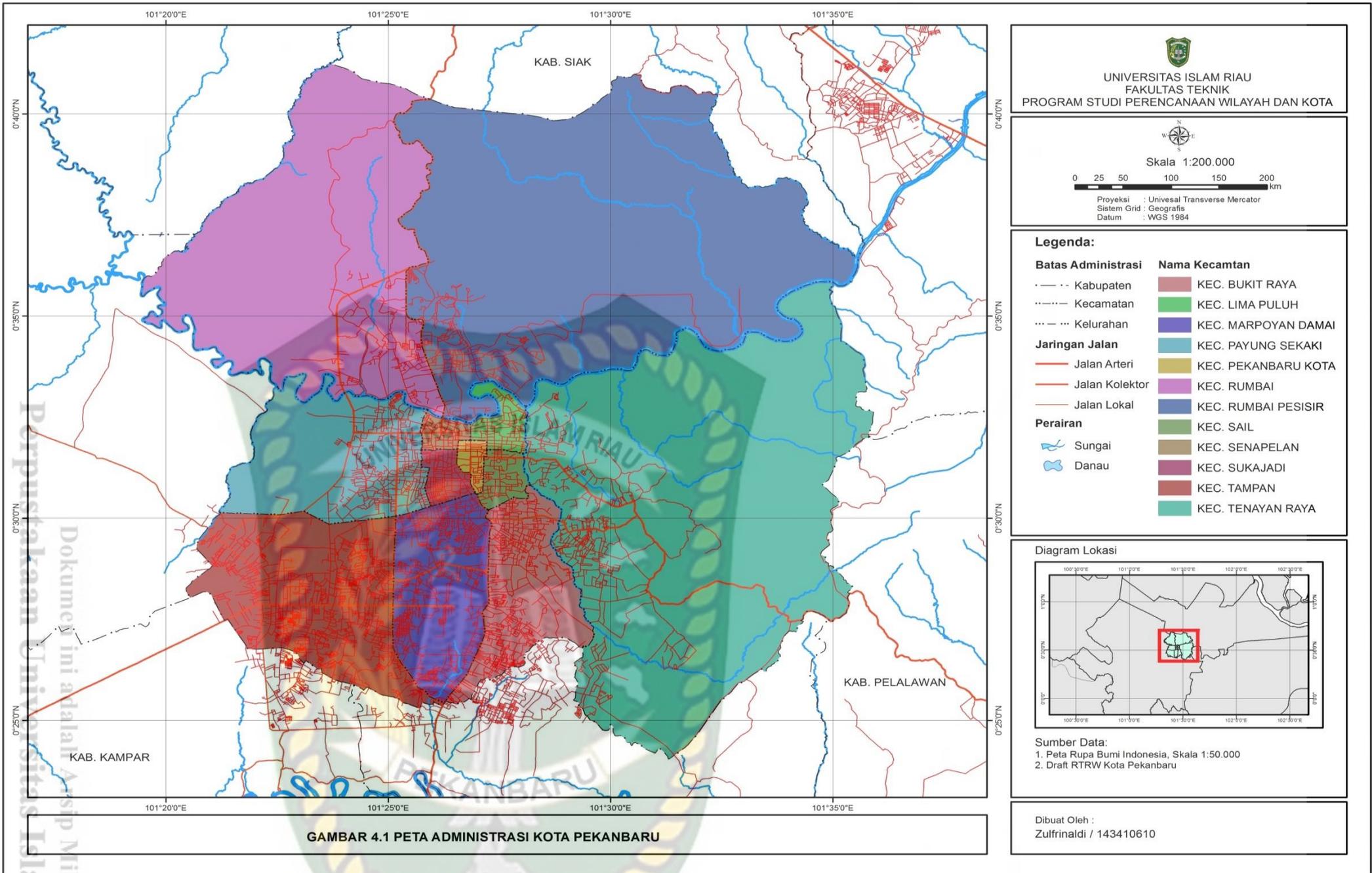
- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 Km². Luas wilayah perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

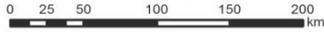
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,7
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Lima Puluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Jumlah		632,26	100

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2018

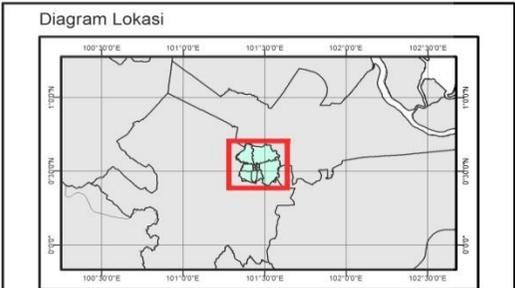



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Skala 1:200.000

 Proyeksi : Univesal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984

Legenda:

Batas Administrasi	Nama Kecamatan
--- Kabupaten	KEC. BUKIT RAYA
--- Kecamatan	KEC. LIMA PULUH
--- Kelurahan	KEC. MARPOYAN DAMAI
Jaringan Jalan	KEC. PAYUNG SEKAKI
Jalan Arteri	KEC. PEKANBARU KOTA
Jalan Kolektor	KEC. RUMBAI
Jalan Lokal	KEC. RUMBAI PESISIR
Perairan	KEC. SAIL
Sungai	KEC. SENAPELAN
Danau	KEC. SUKAJADI
	KEC. TAMPAN
	KEC. TENAYAN RAYA



Sumber Data:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50.000
 2. Draft RTRW Kota Pekanbaru

Dibuat Oleh :
 Zulfrinaldi / 143410610

GAMBAR 4.1 PETA ADMINISTRASI KOTA PEKANBARU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Aset Milik :

4.3 Kependudukan Kota Pekanbaru

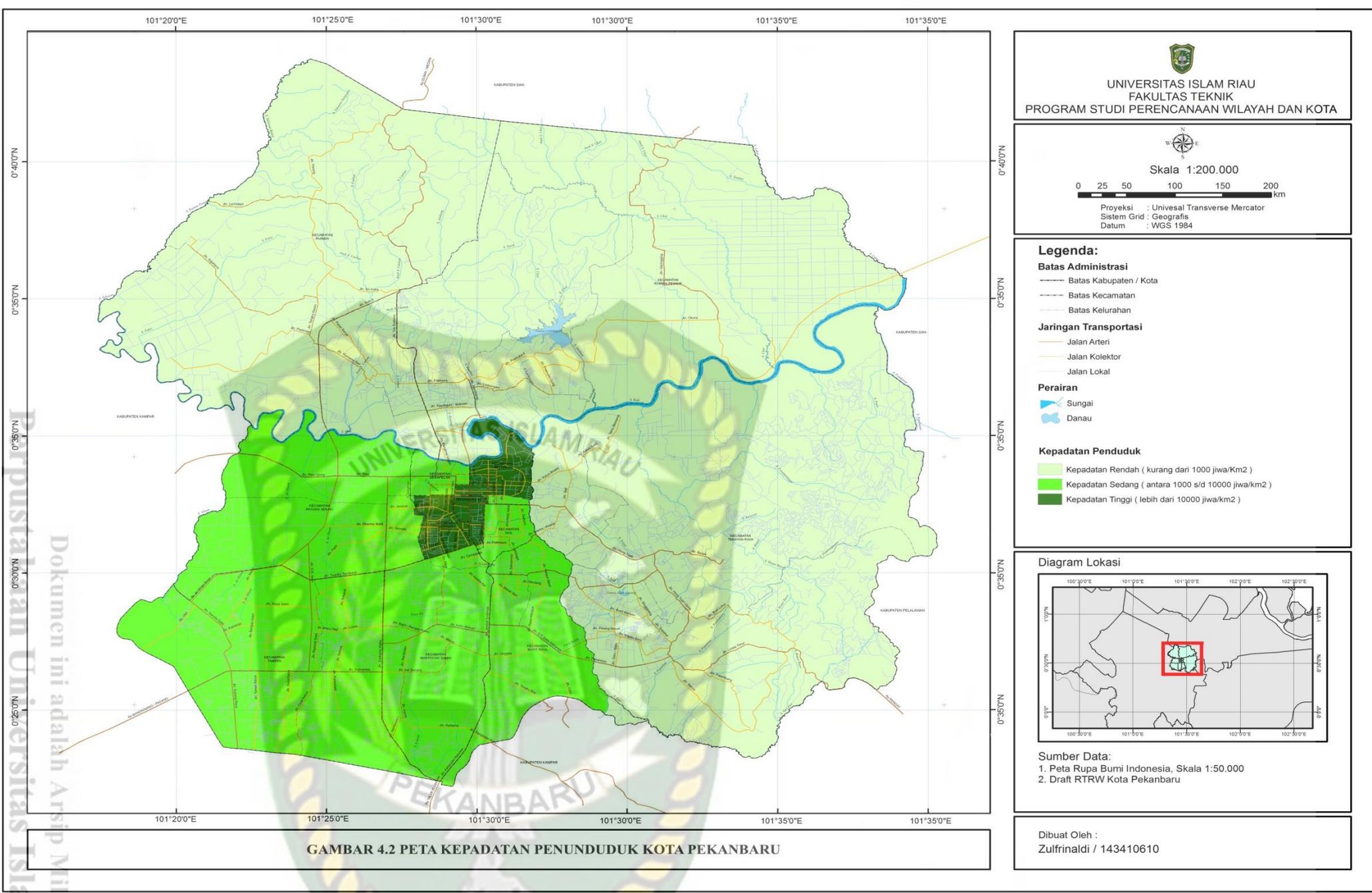
Kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia yaitu terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali oleh berbagai faktor seperti tingginya tingkat fertilitas penduduk dan banyaknya kaum *urban* yang datang tiap tahun.

Berdasarkan data BPS, Jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 1.064.566 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru tahun 2017 sebesar 2,49 persen lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,24%. Dibawah ini merupakan tabel 4.2 jumlah penduduk pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tampan	59,81	285.932	4.781
2	Payung Sekaki	43,24	90.902	2.102
3	Bukit Raya	22,05	103.722	4.704
4	Marpoyan Damai	29,74	131.362	4.417
5	Tenayan Raya	171,27	162.530	949
6	Lima Puluh	4,04	42.469	10.512
7	Sail	3,26	22.015	6.753
8	Pekanbaru Kota	2,26	25.719	11.380
9	Sukajadi	3,76	48.544	12.911
10	Senapelan	6,65	37.459	5.633
11	Rumbai	128,85	67.570	524
12	Rumbai Pesisir	157,33	72.864	463
Jumlah		632,26	1.091.088	1.726

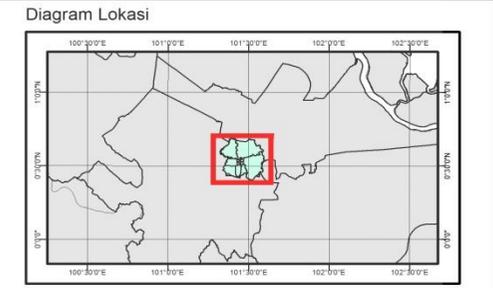
Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka, 2018




 UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS TEKNIK
 PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


 Skala 1:200.000
 0 25 50 100 150 200 km
 Proyeksi : Univesal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984

- Legenda:**
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten / Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Jaringan Transportasi**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Perairan**
 - Sungai
 - Danau
 - Kepadatan Penduduk**
 - Kepadatan Rendah (kurang dari 1000 jiwa/Km2)
 - Kepadatan Sedang (antara 1000 s/d 10000 jiwa/km2)
 - Kepadatan Tinggi (lebih dari 10000 jiwa/km2)



Sumber Data:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50.000
- Draft RTRW Kota Pekanbaru

Dibuat Oleh :
Zulfrinaldi / 143410610

GAMBAR 4.2 PETA KEPADATAN PENUNDUK KOTA PEKANBARU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Mfik :

4.4 Gambaran umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki luas terbesar ke 4 (empat) dan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di kota Pekanbaru seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya. Luas kecamatan Tampan mencapai 59,81 km² yang terdiri dari 131 RW dan 574 RT.

4.4.1 Letak dan geografis kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, yang terletak diantara 0042' -0050' Lintang Utara dan Antara 101035'- 101043' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan Jumlah Kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Buah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Buah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Putih

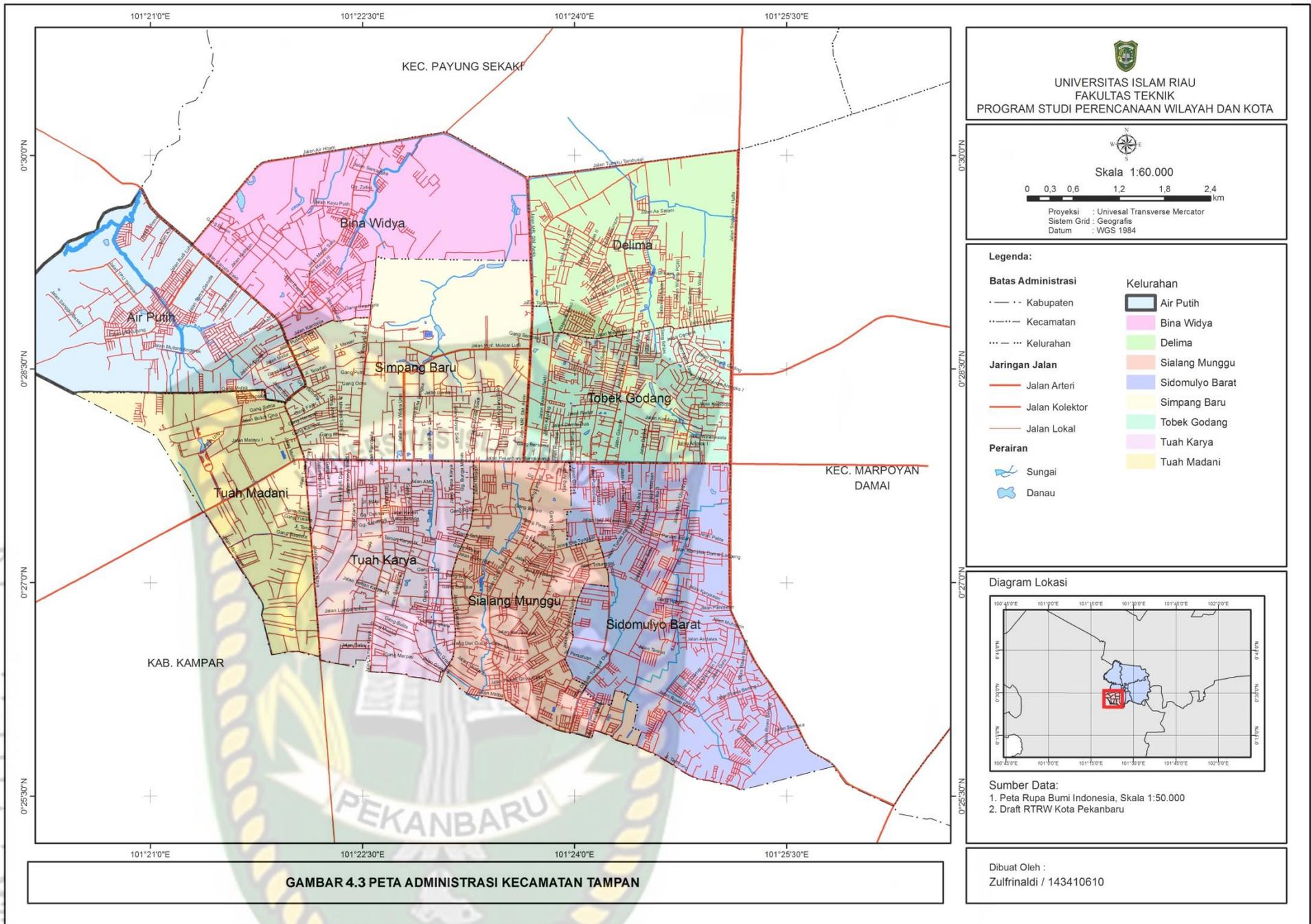
Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

1. Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
2. Sebelahbarat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kecamatan Tampan terdiri dari (9) kelurahan, 131 RW dan 574 RT. Sembilan Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Buah Karya, Kelurahan Delima, Kelurahan Buah

Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Gadang, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Air Putih. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Tampan berjumlah 287.801 jiwa, angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2016. Kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km² (Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018).





GAMBAR 4.3 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN TAMPAN


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Skala 1:60.000
 0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 km
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984

Legenda:

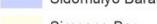
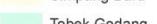
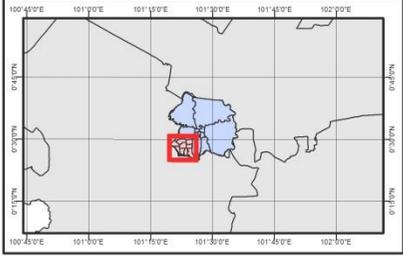
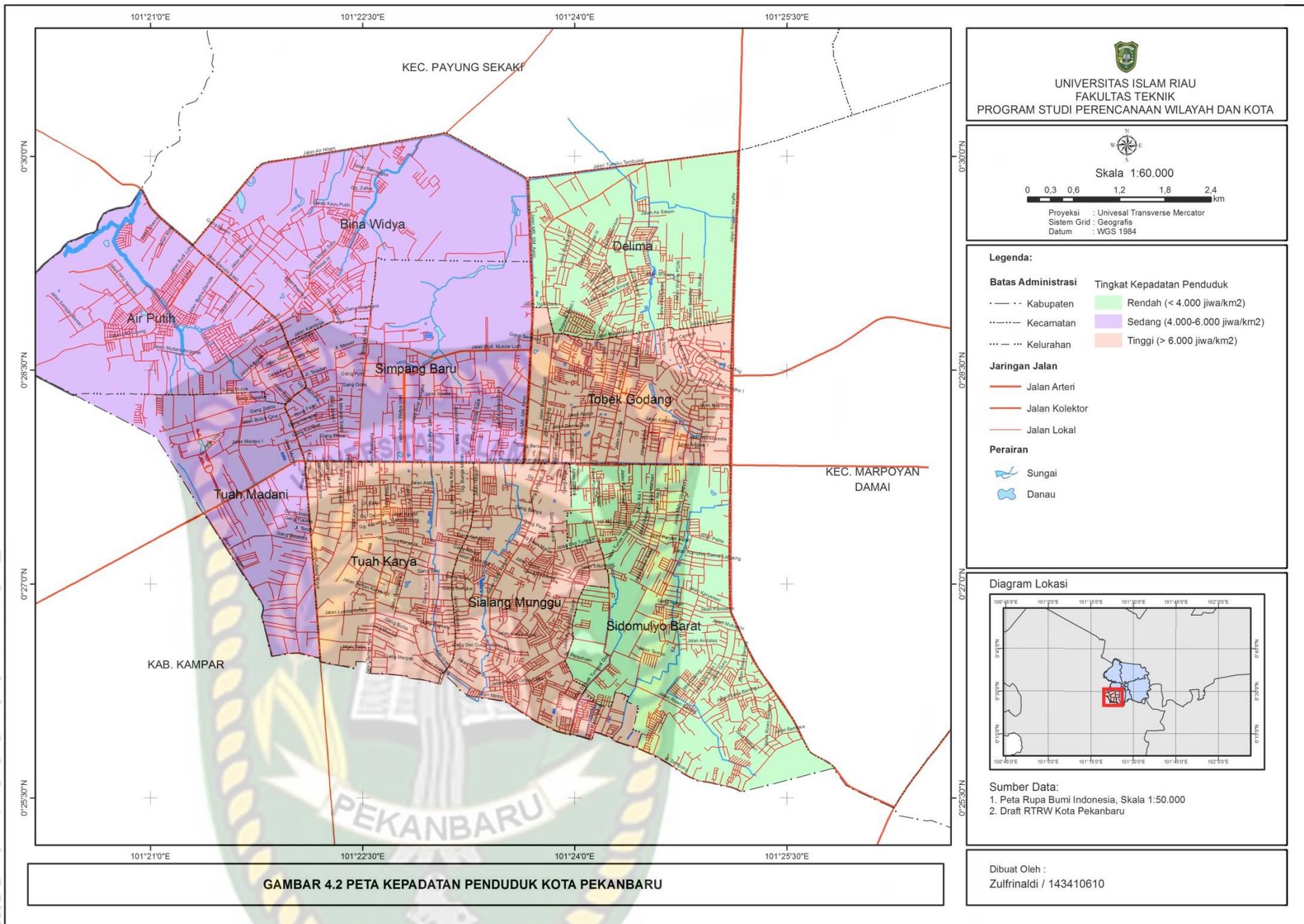
Batas Administrasi	Kelurahan
--- Kabupaten	 Air Putih
- - - Kecamatan	 Bina Widya
... Kelurahan	 Delima
Jaringan Jalan	 Sialang Munggu
 Jalan Arteri	 Sidomulyo Barat
 Jalan Kolektor	 Simpang Baru
 Jalan Lokal	 Tobek Godang
Perairan	 Tuah Karya
 Sungai	 Tuah Madani
 Danau	

Diagram Lokasi



Sumber Data:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50.000
 2. Draft RTRW Kota Pekanbaru

Dibuat Oleh :
 Zulfrinaldi / 143410610



GAMBAR 4.2 PETA KEPADATAN PENDUDUK KOTA PEKANBARU


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Skala 1:60.000

 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : WGS 1984

Legenda:

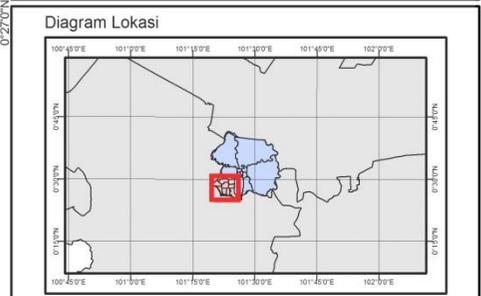
Batas Administrasi	Tingkat Kepadatan Penduduk
— — — Kabupaten	 Rendah (< 4.000 jiwa/km ²)
— — — Kecamatan	 Sedang (4.000-6.000 jiwa/km ²)
— — — Kelurahan	 Tinggi (> 6.000 jiwa/km ²)

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Perairan

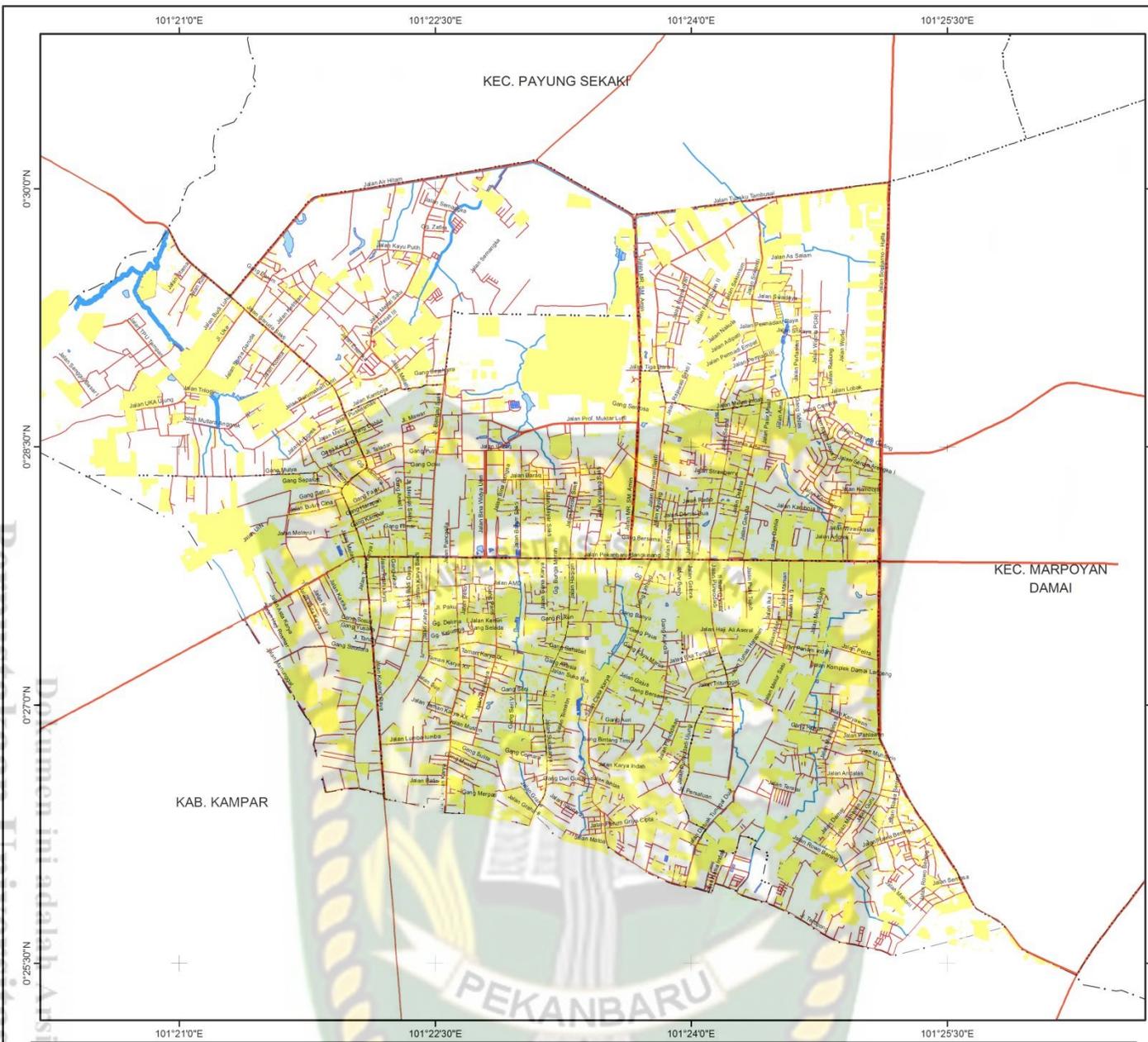
- ~ Sungai
- ~ Danau



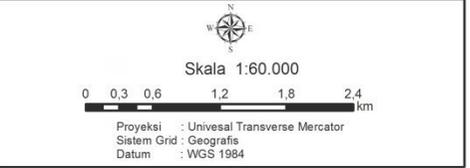
Sumber Data:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:50.000
2. Draft RTRW Kota Pekanbaru

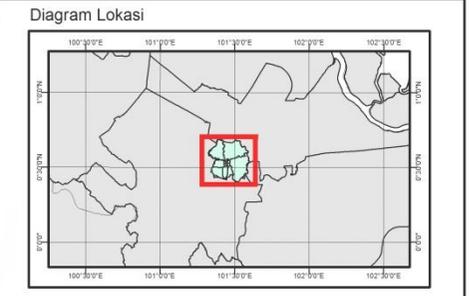
Dibuat Oleh :
Zulfirinaldi / 143410610




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



- Legenda:**
- Batas Administrasi**
-  Kabupaten
 -  Kecamatan
 -  Kelurahan
- Jaringan Jalan**
-  Jalan Arteri
 -  Jalan Kolektor
 -  Jalan Lokal
- Perairan**
-  Sungai
 -  Danau
-  Permukiman



Sumber Peta :
 -Peta Administrasi Kota Pekanbaru
 -Peta Citra Satelit, 2016

Dibuat Oleh :
 Zulfrinaldi / 143410610

GAMBAR 4.5 PETA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN TAMPAN

Perustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.4.2 Pemerintahan Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan terdiri dari sembilan kelurahan (9) dan memiliki 139 RW serta 607 RT. Yang merupakan ke (9) Sembilan kelurahan tersebut ialah Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Delima Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya dan Kelurahan Air Putih dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak 75.923 rumah tangga. Berikut merupakan tabel 4.3 status pemerintahan, jumlah rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) berdasarkan kelurahan di Kecamatan Tampan, 2018.

Tabel 4.3 Status Pemerintahan, jumlah rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) berdasarkan kelurahan di Kecamatan Tampan 2018

No	Kelurahan	Status Pemerintahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Simpang Baru	Kelurahan	38	10
2	SidomulyoBarat	Kelurahan	127	27
3	Tuah Karya	Kelurahan	84	19
4	Delima	Kelurahan	38	10
5	Tuah Madani	Kelurahan	31	8
6	Sialang Munggu	Kelurahan	127	31
7	Tobek Godang	Kelurahan	68	15
8	BinaWidya	Kelurahan	30	9
9	AirPutih	Kelurahan	64	10

Sumber : BPS, 2018

4.4.3 Kependudukan Kecamatan Tampan

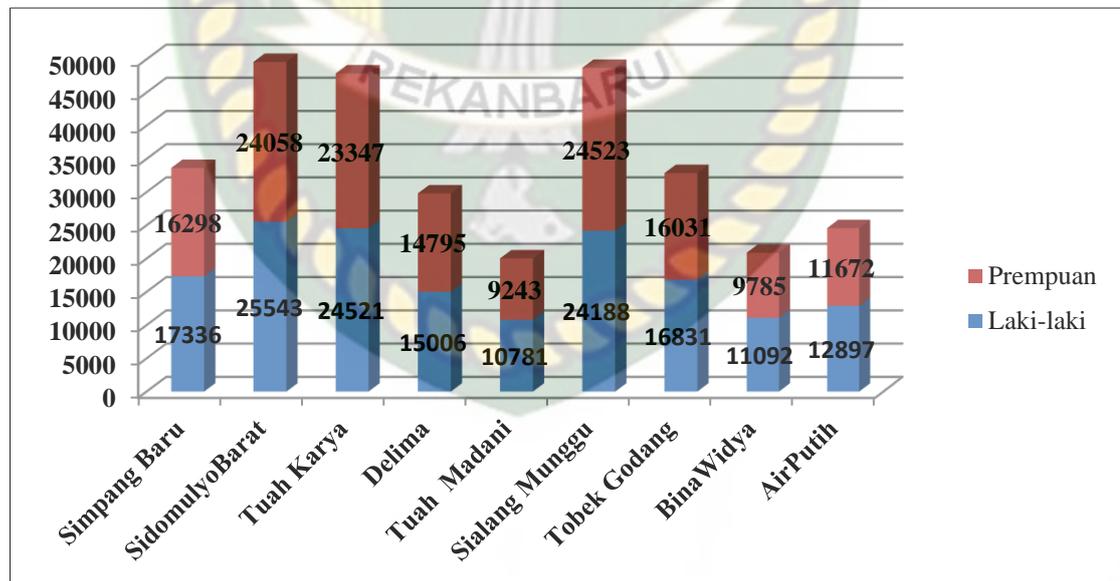
Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi. Kecamatan Tampan juga merupakan Wilayah Pengembangan (WP) 5 kota Pekanbaru dengan pertambahan jumlah penduduk paling tinggi di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Pekanbaru, tercatat jumlah penduduk Kecamatan Tampan pada tahun 2017 mencapai 287.801 jiwa,

angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2016, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km². Berikut tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan kelurahan dan jenis kelamin di Kecamatan Tampan tahun 2018.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Tampan Tahun 2018

N0	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Lak-laki	Perempuan	
1	Simpang Baru	17 336	16 298	33 634
2	SidomulyoBarat	25 543	24 058	49 601
3	Tuah Karya	24 521	23 347	47 868
4	Delima	15 006	14 795	29 801
5	Tuah Madani	10 781	9 243	20 024
6	Sialang Munggu	24 188	24 523	48 711
7	Tobek Godang	16 831	16 031	32 862
8	BinaWidya	11 092	9 785	20 877
9	AirPutih	12 897	11 672	24 569
Jumlah (Jiwa)		158 195	149 752	307 947

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018



Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018

Gambar 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Tampan Tahun 2018

4.5 Gambaran umum sanitasi di Kecamatan Tampan

Gambaran umum sanitasi yang dimaksud dalam hal ini ialah sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan di kecamatan Tampan. Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 sanitasi pada sub sektor air limbah domestik di Kecamatan Tampan menggunakan sistem setempat (on-site system). Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dari 259,604 KK/1,038,415 jiwa yang mendiami Kota Pekanbaru, sebagian masyarakat menggunakan jamban keluarga sebagai tempat Buang Air Besar (BAB), selebihnya menggunakan MCK umum, sungai dan yang lainnya. Sementara itu air limbah buangan dapur dan kamar mandi dari masing-masing rumah langsung dialirkan ke selokan atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Untuk layanan air limbah domestik di kota pekanbaru secara keseluruhan masyarakat yang memiliki tangki septik di kota Pekanbaru sebesar 226.010 kk (87%) dan masyarakat yang masih melakukan BABS sebesar 19697 KK dan skala komunal (IPAL Komunal) pada tahun 2018 hanya mencapai 6989 kk (3%) dari total jumlah penduduk di Kota Pekanbaru tahun 2018 sebanyak 259.604 KK. Sedangkan, untuk layanan air limbah domestik di Kecamatan Tampan telah mencapai 46.271 KK masyarakat yang telah memiliki tangki septik individual dari total jumlah penduduk di Kecamatan Tampan pada tahun 2018 sebesar 52.249 KK, sedangkan untuk skala komunal (IPAL Komunal) hanya mencapai 3.649 KK yang terlayani Ipal skala komunal (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru 2014-2018).

Selanjutnya, sanitasi pada sub sektor persampahan di kecamatan Tampan berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-

2018 terdiri dari sampah tidak tertangani, sampah tertangani skala rumah tangga, sampah tertangani ke pemrosesan akhir, dan pengurangan sampah. Di Kecamatan Tampan dari total jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 208.997 jiwa, untuk penanganan sampah melalui sampah tertangani skala rumah tangga dengan cara menimbun sampah atau pun melakukan pengomposan hanya sekitar 903 penduduk yang terlayani (jiwa). Sedangkan, sampah yang tidak tertangani dalam skala rumah tangga mencapai 105.827 penduduk yang terlayani (jiwa). Selanjutnya, sampah yang tertangani hingga ke pemrosesan akhir mencapai 100.600 penduduk terlayani (jiwa) dan pengurangan sampah (Sampah yang tereduksi 3R melalui TPS3R/TPST/Bank Sampah) hanya mencapai 2.190 Penduduk terlayani (jiwa).

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018

Berdasarkan Ditjen Cipta Karya dalam pedoman penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) tahun 2014, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang selanjutnya akan disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) (Ditjen Cipta Karya dalam pedoman penyusunan SSK, 2014). Adapun Program PPSP sendiri merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah diseluruh tingkatan dengan tujuan mewujudkan kondisi sanitasi permukiman yang layak, yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan standar teknis, berfungsi secara berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Salah satu penerapan pelaksanaan dari Program PPSP ialah pada Strategi Sanitasi Kota (SSK). (MPP PPSP, 2012).

Sesuai dengan buku manual pedoman pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk tahapan pelaksanaan Program PPSP adalah sebagai berikut Pengenalan a) Pengenalan Program PPSP, b) Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan, c) Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan d) Pelaksanaan / implementasi. Berikut urainnya.

5.1.1 Pengenalan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Tahapan ini merupakan pengenalan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Provinsi dan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dan dibantu oleh Fasilitator Provinsi. Hasil yang hendak dicapai pada tahap ini adalah diperolehnya komitmen kesertaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Berikut bukti dokumentasi pertemuan Program PPSP di Kota Pekanbaru pada tanggal 5-6 Mei 2014 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.1. Pengenalan Program PPSP Kepada Kepala Daerah di Kota Pekanbaru

Dari dokumentasi diatas, satuan kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Riau mengadakan Kick Off Meeting Program Percepatanm Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2014 dan Penjaringan Minat PPSP tahun 2015, di Kota Pekanbaru pada tanggal 5-6 Mei 2014. Agenda ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari perintah UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (ciptakarya.pu.go.id).

Berdasarkan Ditjen Cipta Karya dalam buku manual pengelolaan program PPSP (www.sanitasi.or.id) kegiatan dalam pengenalan program PPSP meliputi advokasi, kampanye, edukasi, dan pendampingan. Berikut urainnya.

a) Advokasi, Sosialisasi/Kampanye, Edukasi, dan Pendampingan

Tahap advokasi merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk ikut serta dalam program PPSP dengan mengenalkan pembangunan sektor sanitasi di Indonesia kepada Kepala Daerah dalam hal ini Pemko Pekanbaru sebagai penanggung jawab pemenuhan kebutuhan layanan sanitasi. Kegiatan ini adalah upaya komunikasi strategis, sistematis, dan terorganisir untuk memengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan kebijakan bertujuan untuk mendorong dan menciptakan komitmen politik dan sosial sebagai landasan kebijakan dan ketetapan anggaran. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Yenni selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau sebagai berikut.

“Jadi PPSP dilaksanakan mulai tahun 2010 oleh pusat. Untuk mengajukan surat minat ikut serta program PPSP bergantung daerah yang bersangkutan, jadi, mereka mengirimkan surat minat untuk mengikuti program PPSP. Surat minat tersebut nanti diatur porsi APBN nya seperti apa, daerah APBD tingkat 1 daerah tingkat 2 seperti apa. jadi tetap dari usulan berdasarkan surat minat dari daerah sendiri”.(Wawancara, 16Desember 2020)

Berdasarkan mekanisme dalam mengikuti program PPSP, untuk Kabupaten/Kota yang berminat bergabung dalam program PPSP diharuskan untuk mengajukan surat minat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur. Hal ini serupa dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Pak Rafiq selaku tenaga ahli bidang sanitasi kota Pekanbaru dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau berikut pernyataannya.

“Untuk menarik minat Kabupaten/Kota agar ikut bergabung dalam program PPSP, Kabupaten/Kota harus mengajukan surat minat ke pusat bahwa ingin bergabung dalam program PPSP, untuk kriterianya hanya surat minat dari Walikota/Bupati itu saja bahwa mereka ingin mendapatkan fasilitasi pendampingan pembuatan dokumen SSK, termasuk Kota Pekanbaru ikut dan semua Kabupaten/Kota yang ada di Riau udah bergabung, cuman di Inhil yang seharusnya tahun kemarin (2018) sudah selesai tapi harus mereview lagi karna udah kadaluarsa dokumennya, udah lewat 5 tahun”. (Wawancara, 16 Desember 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengikuti tahap advokasi untuk ikut serta dalam program PPSP dengan mengirimkan surat minat untuk bergabung dalam program PPSP.

Setelah advokasi, Pokja Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait dan para pemangku kepentingan yang terkait dalam rangka pengenalan Program PPSP. Menurut Ibu Dede Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan hal tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada para perwakilan SKPD terkait. Berikut merupakan pernyataan Ibu Dede selaku tenaga ahli pendamping (fasilitator) Provinsi dalam bidang sanitasi terkait pengenalan Program PPSP.

“PPSP di Riau dilaksanakan mulai tahun 2013, untuk sosialisasinya hanya peminatan dari pusat, karna ini bukan masyarakat yang menjalankannya, untuk sosialisasi lebih ke dinas, ke pokja sanitasi, karenakan PPSP tersebut outputnya dokumen perencanaan untuk ke dinas, untuk ke daerah, tapi kita ada melakukan FGD misalnya, Forum Grup Discussion untuk sosialisasi terkait sanitasi sendiri dan juga masukan-masukan, akademisi kita undang dalam pembahasan-pemabahasan itu, dari tokoh masyarakatnya itu sendiri tetap kita undang. (Wawancara, 16 Desember 2020).

Adapun kampanye merupakan upaya komunikasi yang terorganisir untuk menyampaikan program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membangun serta memperkuat kemitraan terutama untuk keberlanjutan program. Isi dari program kegiatan tersebut dapat ditemukan pada

dokumen SSK Kota Pekanbaru khususnya pada sektor air limbah domestik dan sektor persampahan. Hal ini serupa yang dikatakan oleh Bapak Dody Rinaldi selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru. Berikut pernyataannya

“Pengenalan program PPSP di Kota Pekanbaru tertuang didalam instrument kebijakan program-program pelaksanaan pembangunan daerah yang ada disetiap dinas yang mengampu urusan sanitasi seperti Dinas Perkim, Dinas PUPR, DLHK dan Dinas Kesehatan, disitu tertuang berbagai macam program yang menyangkut masalah kampanye, kegiatan-kegiatan mengenai masalah PHBS, kemudian juga ada edukasi atau segala macam, advokasi dan pendampingan itu ada semua disana”. (Wawancara, 26 november 2020)

Selanjutnya, dalam proses pengenalan program PPSP terdapat tahap pendampingan dari tenaga ahli (fasilitator) dibidang sanitasi. Fasilitator adalah Tenaga Ahli Fasilitator Kabupaten/Kota disebut CF-AT (City Facilitator Ahli Teknis yang selanjutnya disebut CF). Tahap pendampingan ini merupakan dukungan sumberdaya yang disediakan bagi pokja Kabupaten/Kota yang berupa fasilitator untuk mendampingi pokja dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dan Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Pak Yenni selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau sebagai berikut.

“Ibu Dede ini konsultan pendampingan dari kita untuk membantu memfasilitasi pemda dalam menyiapkan dokumen BPS, dokumen SSK, dokumen MPS ini, nah ibu Dede dan pak Rafiq yang bantu mereka dalam meyiapkan ini, karena data yang punya pemda, nah punya pemda itu kita cuma membantu memfasilitasi saja, kerjanya begini, cara skoringnya begini, untuk daerah yang masuk kategori begini. (Wawancara, 16 Desember 2020)

Kemudian ibu Dede yang merupakan tenaga ahli pendamping (fasilitator) provinsi bidang sanitasi juga menambahkan pendapatnya terkait pendampingan (fasilitator) terhadap pokja sanitasi tersebut, Berikut pernyataan ibu Dede

“Pendampingan yang dilakukan dalam penyusunan dokumen tadi, mendampingi pokja dalam apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pokja, misalkan ada pokja yang kurang memahami isi dari dokumen itu seperti apa. Kalau sekarang untuk PPSP ini, penyusunan dokumen perencanaan itu sampai tahun 2018, setelah tahun 2018, tahun 2019-2020 ini sekarang pendampingan implementasi namanya, jadi implementasi dari dokumen yang sudah disusun itu. (Wawancara, 16 Desember 2020).

Dilanjutkan dari pernyataan dari pak Rafiq selaku tenaga ahli pendamping (fasilitator) Provinsi Riau. Menurut Pak Rafiq sebagai tenaga ahli (fasilitator) dalam bidang sanitasi udah memang menjadi tugasnya untuk mendampingi pokja sanitasi dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota (SSK), dan Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Berikut pernyataan dari pak Rafiq.

Pendampingan itu dinamakan tenaga ahli/fasilitator yang mendampingi, memberi bimbingan ke Kabupaten/Kota dan ada kelompok kerjanya, kelompok kerjanya ada Bappeda, dinas PU, Dinkes, Dinas Pendidikan, seluruh OPD terkait sanitasi membentuk kelompok kerja yang diberi nama Pokja sanitasi, jadi tugas kami mendampingi pokja dalam penyusunan itu, kami evaluasi, kasih bimbingan bagaimana cara menyusunnya, menentukan strateginya, sesuai juknis yang telah dibuat oleh PU, jadi secara teknis semua OPD inilah yang melaksanakan implementasi program kegiatan ini. (Wawancara, 16 Desember 2020).

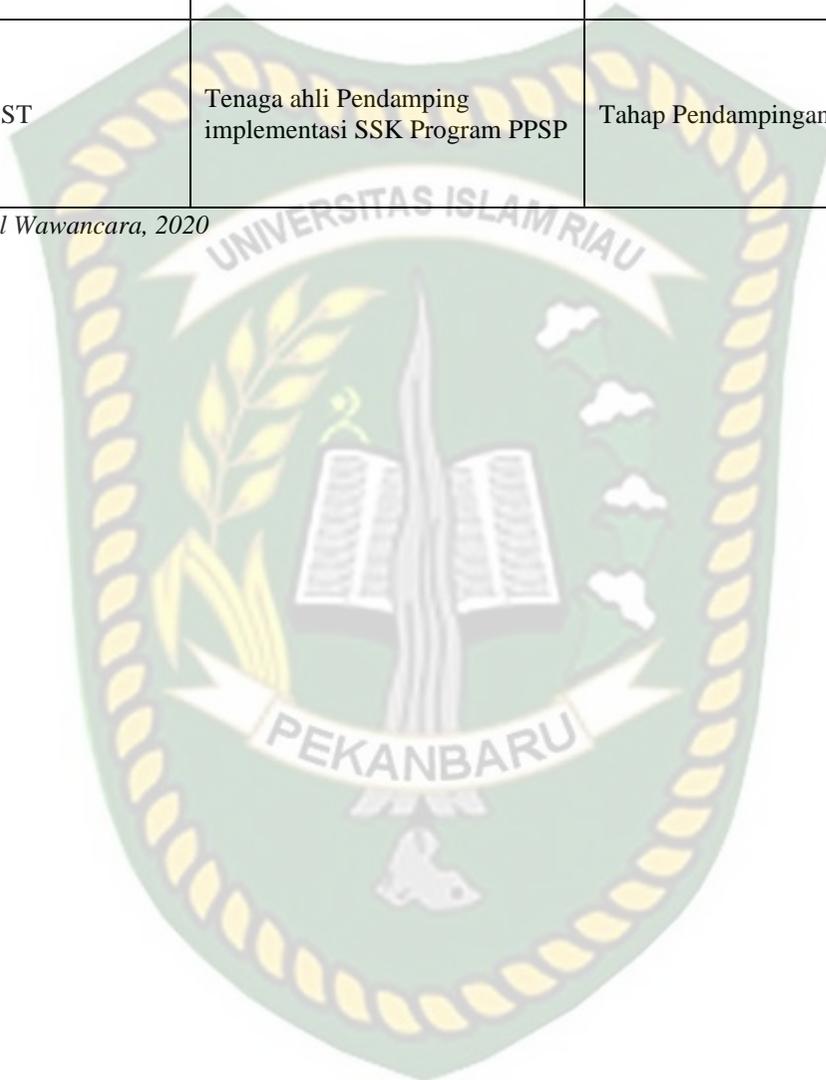
Berdasarkan hasil wawancara, literatur serta hasil dokumentasi diatas, untuk tahap pengenalan Program PPSP telah sesuai dengan mekanisme pengenalan Program PPSP yakni advokasi, sosialisasi/Kampanye, edukasi, dan pendampingan. Berikut Tabel 5.1 Informan mengenai tahap pengenalan Program PPSP di Kota Pekanbaru.

Tabel 5.1 Wawancara Informan Tahapan Pengenalan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Pengenalan program PPSP	Kutipan Wawancara
1	Yenni Mulyadi, ST., MT	Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Provinsi Riau	Tahap Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> Jadi PPSP ini mulai di laksanakan tahun 2010, untuk mengajukan minatnya itu bergantung daerah yang bersangkutan, jadi mereka mengirimkan surat minat untuk mengikuti program PPSP ini.
2	Arafik, ST	Tenaga ahli Pendamping implementasi SSK Program PPSP	Tahap Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> PPSP kalau gak salah launcingnya antara tahun 2009 dan 2010 secara nasional itu belum semua Kab / Kota yang bergabung, jadi ada beberapa provinsi di tunjuk oleh pusat dan riau bergabung tahun 2014
3	Arafik, ST	Tenaga ahli Pendamping implementasi SSK Program PPSP	Tahap Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> Untuk menarik minat Kab/Kota agar ikut tergabung dalam program PPSP harus mengajukan surat minat ke pusat bahwa ingin bergabung dalam program ini dan kriterianya hanya surat minat dari walikota / bupati saja bahwa mereka ingin di dampingi, ingin di buat dokumen, ingin mendapatkan fasilitasi pendampingan pembuatan dokumen SSK, termasuk kota Pekanbaru ikut.
4	Dede Afrianti, ST	Tenaga ahli Pendamping implementasi SSK Program PPSP	Tahap Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> Jadi ada pertemuan antar pokja rutin di lakukan untuk membahas agenda-agenda sanitasi, rapat perdananya diadakan di pusatkan, pusat mengadakan rapat dan mengundang pokja-pokja provinsi yang bersangkutan, setelah itu pokja provinsi memberitahukan kepada daerah, jadi pusat mengundang provinsi, kemudian provinsi ke daerahnya, ke kab/kota nya.
5	Dede Afrianti, ST	Tenaga ahli Pendamping implementasi SSK Program PPSP	Tahap Sosialisasi Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Untuk sosialisasinya hanya peminatan saja dari pusat, karna dia kan bukan ke masyarakat sebenarnya, bukan masyarakat yang menjalankannya, kalau untuk sosialisasi lebih ke dinas, ke pokja sanitasi, karenakan PPSP ini outputnya dokumen perencanaan untuk ke dinas, ya untuk ke daerah, tapi kita ada melakukan FGD (Forum Grup Discussion) untuk sosialisasi terkait sanitasi sendiri dan juga masukan-masukan, akademisi kita undang dalam pembahasan-pemabahasan itu, akademisi

No	Nama	Jabatan	Pengenalan program PPSP	Kutipan Wawancara
				dari kampus gitu ya, dari tokoh masyarakatnya itu sendiri, tetap kita undang.
6	Yenni Mulyadi, ST., MT	Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau	Tahap Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Dede dan pak Arafik konsultan pendampingan dari kita untuk membantu untuk memfasilitasi pemda dalam menyiapkan dokmen BPS, dokumen SSK, dokumen MPS, karena data yang punya kan pemda, nah kita cuma membantu memfasilitasi saja, kerjanya begini, cara skoringnya begini, untuk daerah yang masuk kategori begini.
7	Arafik, ST	Tenaga ahli Pendamping implementasi SSK Program PPSP	Tahap Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> Jadi tugas kami mendampingi pokja dalam penyusunan buku itu, dokumen itu, kami evaluasi kami kasih bimbingan bagaimana cara menyusunnya, gimana cara menentukan strateginya, pokoknya sesuai juknis yang telah di buat oleh PU, jadi secara teknis semua OPD sanitasi yang melaksanakan implementasi program kegiatan ini

Sumber : Hasil Wawancara, 2020



5.1.2 Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan

Pada tahapan ini, sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program PPSP (Manual Tahap A Penegalan Program dan Pembentukan Pokja Sanitasi Kota), Pemerintah Kota Pekanbaru diharuskan membentuk kelompok kerja (Pokja) Sanitasi Kota dengan hasil yang akan dicapai melalui proses ini adalah :

- a) Terbentuknya Pokja Sanitasi Kota (Lampiran)
- b) Terbitnya Surat keputusan Kepala Daerah Tentang Pokja Sanitasi Kota

Pokja AMPL Kota Pekanbaru dibentuk dengan melibatkan beberapa Dinas/Badan di Pekanbaru dimana penanganan sektor sanitasi merupakan salah satu tugas pokok mereka maupun menjadi pendukung dalam penanganan sektor sanitasi di Kota Pekanbaru. Pokja yang telah disusun keanggotaannya kemudian diatur dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 420.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Pekanbaru. Pokja Sanitasi berisikan SKPD/instansi/stakeholder terkait sanitasi yang nantinya bertugas untuk mengawal dan memfasilitasi peningkatan pembangunan Sanitasi di Kota Pekanbaru.

5.1.3 Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru

Berdasarkan proses tahapannya pelaksanaan program PPSP mengeluarkan tiga (3) dokumen yang merupakan output dari pelaksanaan program PPSP itu sendiri yakni Buku Putih Sanitasi (BPS), dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu narasumber, yaitu ibu Dede selaku tenaga ahli pendamping (fasilitator) yang bertugas dalam mendampingi penyusunan ketiga

(3) dokumen tersebut, bahwa pada tahun 2015 untuk output dari pelaksanaan program PPSP yang berupa Buku Putih Sanitasi (BPS), dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru, dan Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) telah dirangkum menjadi satu dokumen yang dinamakan dengan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru pemuktahiran. Berikut pernyataan ibu Dede.

“Kalau dulu memang tahun dari 2010 sampai 2014 itu dokumennya ada tiga (3) yaitu ada BPS tadi, dokumen SSK, dan MPS, tahun 2015 dokumennya itu jadi MP aja, tapi pada saat tahun 2016 ke tiga dokumen itu dirangkum jadi satu, namanya SSK pemuktahiran, itu mulai tahun 2016”. (Wawancara, 16 Desember 2020).

Pernyataan ibu Dede juga didukung dengan pedoman penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2018. Berdasarkan pedoman penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2018, dijelaskan bahwa Buku Putih Santiasi (BPS) pada dasarnya merupakan isi dari bab 2 (Profil sanitasi saat ini) pada dokumen SSK, dengan kata lain bab 2 isi dari dokumen SSK tersebut merupakan Buku Putih Sanitasi (BPS) yang dimutakhirkan bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki BPS. Jadi, berdasarkan informasi melalui literature dan wawancara, bahwa kota Pekanbaru saat ini sudah memuktahirkan dokumennya pada tahun 2018, sehingga ke-3 dokumen yang menjadi output dalam pelaksanaan program PPSP dirangkum menjadi satu dokumen yaitu dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru pemuktahiran.

5.1.3.1 Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS)

Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota (BPS) diarahkan untuk mendefenisikan kondisi sanitasi lokal. Bapak Yenni selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau memberikan pernyataannya mengenai Buku Putih Sanitasi (BPS).

“Buku putih sanitasi berisi kondisi eksisting sanitasi disuatu daerah, dimana daerah-daerah rawan sanitasinya, jadi berdasarkan data yang ada setelah dilakukan pendataan, dalam dokumen BPS juga ada dilakukan scoring-scoring untuk daerah-daerah rawan sanitasi dan untuk prioritas penanganannya ada 4 kategori yaitu 4 sangat beresiko, 3 beresiko, 2 tidak beresiko, 1 sangat tidak beresiko, jadi ada 4 kategorinya. Penanganannya berdasarkan prioritas dari yang sangat tinggi resikonya, yang paling rawan sanitasi, itulah yang di tangani dulu”. (Wawancara, 16 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yenni diatas, bahwa Buku Putih Sanitasi (BPS) berisikan kondisi eksisting sanitasi, permasalahan dan daerah-daerah rawan sanitasi. Pernyataan tersebut juga didukung dengan buku pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) tahun 2014 dan berdasarkan Ditjen Cipta Karya dalam pedoman buku penyusunan SSK tahun 2014 dalam proses penyusunannya ada 4 butir-butir penting dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) yang telah disusun, diantaranya 1) potret pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten/Kota dan pengelolaan sanitasi, 2) permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota, dan 3) area berisiko sanitasi. Berikut urainnya.

a) Kondisi Eksisting Sanitasi di Kota Pekanbaru

Untuk kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik, dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Pekanbaru menggunakan 2 sistem yakni Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Data untuk cakupan SPALD-T di Kota Pekanbaru hingga tahun 2018 mencapai 1,03 % atau 2685 KK penduduk yang terlayani. Sedangkan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal) dengan kepemilikan jamban tangki septik skala individual tahun 2018 sebesar 226.010 kk (87%) dan skala komunal (IPAL Komunal) pada tahun 2018 sebesar 6989 kk (3%). (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru 2014-2018).

Sedangkan kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor persampahan, pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru berdasarkan data, sampah tidak tertangani pada tahun 2018 sebesar 15,06 % atau 156,393 penduduk terlayani (jiwa), untuk sampah yang tertangani skala rumah tangga pada tahun 2018 sebesar 3,436 penduduk terlayani (jiwa), dan untuk sampah tertangani ke pemrosesan akhir pada tahun 2018 sebesar 57,48 % atau 870,430 penduduk terlayani (jiwa). (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru 2014-2018)

b) Permasalahan Sanitasi

Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kota Pekanbaru berdasarkan aspek teknis dan aspek non teknis dalam pengelolaan sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan dituangkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini.

Tabel 5.2 Permasalahan Sub Sektor Air Limbah Domestik dan Sub Sektor Persampahan

Aspek Teknis / Aspek Non Teknis	Air Limbah Domestik	Persampahan
A. Aspek teknis	a) BABS 7.6 % (19,698 KK) b) Akses terhadap jamban yang tidak layak sebesar 1.5 % (3,943 KK) c) Pemko Pekanbaru belum bisa memberikan layanan truk tinja, namun dilayani oleh pihak swasta d) Praktek pengurusan tinja dari masyarakat yang memiliki tangka septik masih rendah yaitu sebesar 25,2 % e) Belum berfungsinya IPLT Kota Pekanbaru (belum diserahkan dari pusat) f) Sebesar 59 % masyarakat yang melakukan pengurusan tinja menggunakan layanan sedot tinja swasta, dimana tinjanya masih dibuang ke kebun/sungai g) Sistem terpusat baru 1,03 % h) Masterplan air limbah sudah lama	a) 41.81 % sampah tidak terproses atau masyarakat tidak melakukan pengolahan sampah b) 0.33 % akses dasar atau sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat (ditimbun /pengomposan) c) 57.48 % akses Layak atau sampah yang terangkut ke TPA(langsung atau tidak langsung) d) Pengurangan sampah di Kota Pekanbaru baru 0.38 % e) TPS 3R sudah ada 5 unit tetapi belum berfungsi optimal dan masih kurang jumlahnya untuk pelayanan di Kota Pekanbaru f) Belum adanya pengukuran

	dan kadaluarsa	kualitas air lindi di TPA g) Sudah memiliki Masterplan persampahan tetapi perlu dilakukan review
B. Aspek Non Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum Optimalnya pendanaan untuk pengelolaan air limbah b) Belum tersedianya peraturan daerah mengenai pengelolaan air Limbah/ komitmen dalam penegakan Perda masih kurang c) Belum optimalnya peran media pemerintah dalam menyebarkan/mensosialisasi kan tentang pengelolaan air limbah domestik d) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik e) Belum tersedianya UPT khusus air limbah f) Sistem pengawasan belum mencapai ke pengawasan terkait air limbah domestik oleh OPD terkait 	<ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan daerah mengenai pengolahan sampah rumah tangga belum tersosialisasi dengan baik sehingga perda belum berjalan optimal b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah

Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru 2014-2018

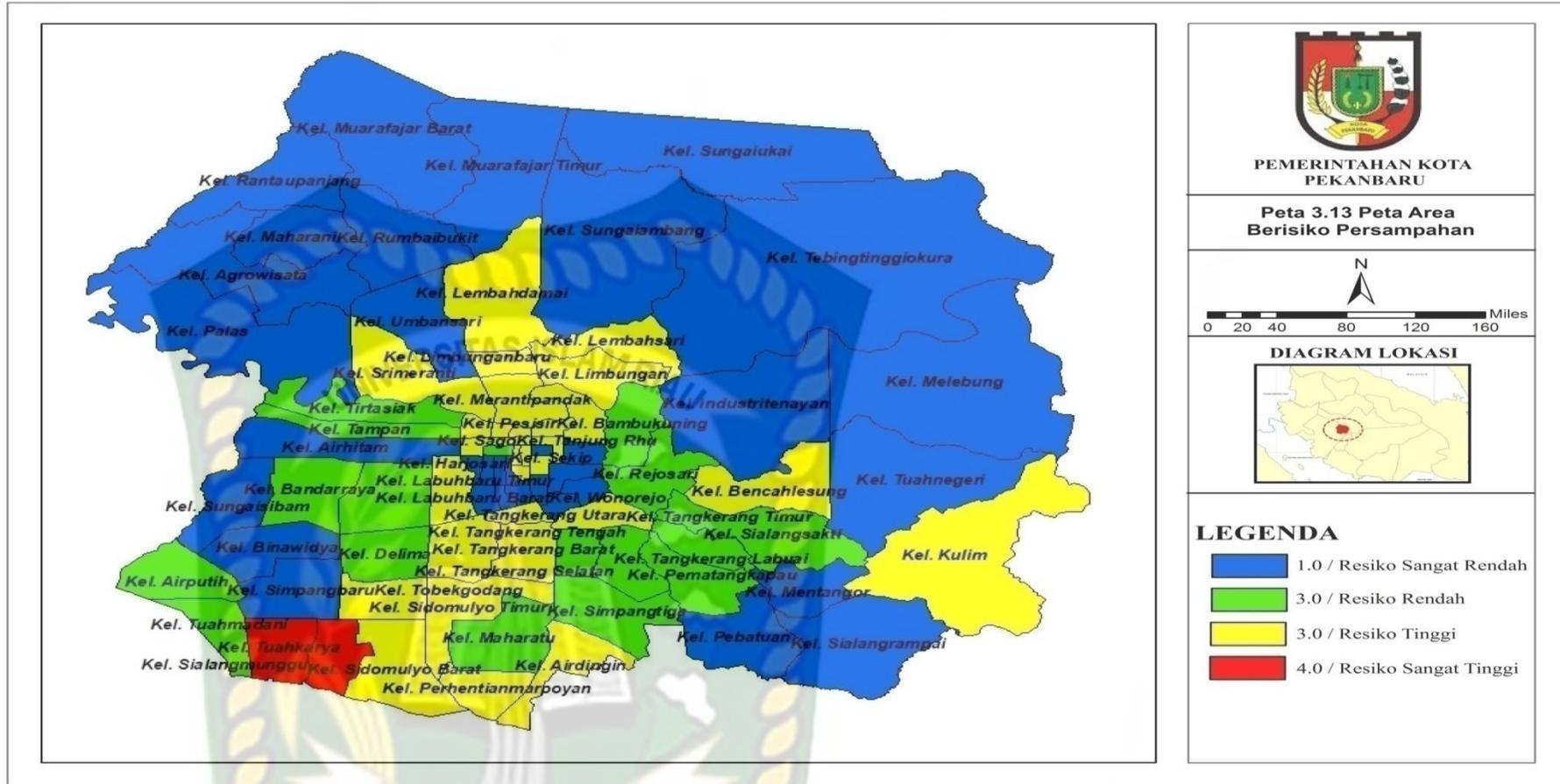
c) Area berisiko sanitasi

Pada umumnya, penentuan area berisiko sanitasi di Kota Pekanbaru didasarkan pada data sekunder, penilaian SKPD dan data studi EHRA. Untuk data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area administrasi kelurahan berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia disumber data lainnya. sedangkan berdasarkan penilaian SKPD berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja sanitasi Kota Pekanbaru yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, DLHK dan Dinas PUPR. Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan ditingkat rumah tangga, perilaku cuci

tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, dan BABS. Berdasarkan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kota Pekanbaru untuk pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan, Pembobotan yang ada yaitu data sekunder 40 %, EHRA 50 % dan Persepsi SKPD 10 %. Untuk lebih jelasnya area berisiko sanitasi untuk sub sektor air Limbah domestik dan sub sektor sektor persampahan disajikan dalam bentuk peta berikut ini.



Gambar 5.3 Peta Area Beresiko Sanitasi Sub Sektor Persampahan



Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru 2014-2018

Berdasarkan Gambar 5.2 Peta Area Beresiko Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik dan Gambar 5.3 Peta Area Beresiko Sanitasi Sub Sektor Persampahan bahwa risiko sangat tinggi digambarkan pada area yang berwarna merah dengan nilai yang ditampilkan 4 (empat), untuk resiko tinggi digambarkan pada area yang berwarna kuning dengan nilai yang ditampilkan 3 (tiga), untuk resiko rendah digambarkan dengan area berwarna hijau dengan nilai yang ditampilkan 2 (dua), dan untuk resiko sangat rendah digambarkan dengan area berwarna biru dengan nilai yang ditampilkan 1 (satu). Untuk wilayah yang menjadi prioritas dalam penanganan sanitasi yaitu pada area beresiko yang ditunjukkan pada area risiko sangat tinggi pada area yang berwarna merah dengan nilai yang ditampilkan 4 (empat) dan pada area risiko tinggi pada area yang berwarna kuning dengan nilai yang ditampilkan 3 (tiga). Adapun wilayah yang beresiko sanitasi pada sub sektor air limbah domestik yang sangat berbahaya dengan tingkat resiko 4 (empat) yaitu terdapat pada kelurahan Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Tauh Karya, dan kelurahan kulim yang dapat dilihat pada area yang berwarna merah hal inilah yang akan menjadi wilayah prioritas dalam penanganan Air Limbah Domestik. Sedangkan wilayah yang beresiko sanitasi pada sub sektor air limbah domestik yang sangat berbahaya dengan tingkat resiko 4 (empat) yaitu terdapat pada kelurahan tauh karya dan kelurahan sialang mungu.

5.1.3.2 Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru 2014-2108

Setelah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Pekanbaru beserta tenaga ahli/fasilitator dari Provinsi Riau menyusun strategi pengembangan sanitasi yang dituangkan didalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru.

Penyusunan Dokumen SSK merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program PPSP. Tahapan ini pada dasarnya merupakan akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP. Pak Kautsar Selaku Sub Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah (P3W) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru dan juga salah satu tim penyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru memberikan tanggapannya mengenai Penyusunan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018. Berikut Pernyataan Pak Kautsar.

“Setelah Buku Putih, kita susun dokumen SSK nya. SSK itu bagaimana strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang udah di petakan dibuku putih sanitasi tadi, kita susun visi misinya, tujuan dan sasarannya apa, strateginya kita tetapkan, lalu kita susun program dan kegiatannya sampai pada akhirnya finalisasi dokumen pada SSK tersebut. “Dan yang menyusunnya ini yaitu Pokja, kelompok kerja PPSP, pokja yang di maksud itu ada Pokja provinsi dan ada pokja Kota ketuanya Sekda, nah yang nyusun ini sebenarnya Kabupaten/Kota (Wawancara, 26 november 2020).

Hasil wawancara diatas juga didukung literature pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yaitu tersusunnya visi misi sanitasi, mulai tujuan dan sasaran, pendanaan sanitasi, penetapan strategi sanitasi, penyusunan program dan kegiatan, dan finalisasi SSK. Berikut urainnya.

a) Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi

Berikut merupakan visi dan misi sanitasi Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan ditampilkan pada Tabel 5.3 berikut

Tabel 5.3 Visi dan Misi Sanitasi Kota Pekanbaru

Visi Sanitasi	Misi Sanitasi
“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Bersih Dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi Pada Tahun 2019”	Misi Pengembangan Air Limbah Domestik 1. Meningkatkan pengelolaan air limbah permukiman melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah permukiman yang efektif, efisien dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga Misi Pengembangan Persampahan 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur persampahan yang berkelanjutan dan berkualitas. 2. Meningkatkan cakupan layanan dan peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru, 2014

Setelah disepakatinya visi misi sanitasi dan disepakatinya tahapan pengembangan sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan, selanjutnya akan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi serta disepakatinya kebijakan pendanaan sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan di kota pekanbaru. Berikut Tabel 5.4 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Pada Sub Sektor Air Limbah Domestik Dan Sub Sektor Persampahan di Kota Pekanbaru.

Tabel 5.4 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Pada Sub Sektor Air Limbah Domestik Dan Sub Sektor Persampahan

Sub sektor sanitasi	Tujuan	Sasaran	Data Dasar (Tahun 2014)
1. Sub sektor Sektor air limbah domestik	“Untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga serta menyediakan sarana dan prasarana air limbah”	a) Tersedianya perda pengelolaan air limbah pada tahun 2015	1. Belum memiliki peraturan terkait air limbah domestik
		b) Meningkatkan kepemilikan jamban bertangi septik dari 85,6 % menjadi 100 % pada tahun 2019	2. Kepemilikan tangka septik sebesar 85,6%
		c) Meningkatkan cakupan pelayanan sistem komunal dari 0,22 % pada daerah yang menjadi 5 % pada tahun 2019	3. Sistem komunal baru 0,22%
		d) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	4. Belum ada swasta yang terlibat
		e) meningkatkan cakupan pelayanan sistem offsite terpusat dari 0 % menjadi 20 % pada tahun 2019	5. Sistem offsite belum tersedia
		f) Mengoptimalkan fungsi IPLT pada tahun 2015	6. IPLT Belum serah terima
		g) Meningkatnya masyarakat yang melakukan penyedotan Tangki septik	7. Masih rendahnya masyarakat yang melakukan penyedotan tangka septik
2. Sub sektor Persampahan	“Meningkatkan lingkungan Kota Pekanbaru yang bersih, sehat dan mandiri melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu untuk meminimalisir timbulan, mengurangi dampak negatif dan memberikan manfaat serta nilai ekonomi sampah”	a) Meningkatnya cakupan layanan persampahan oleh pemerintah dari 57,2 % pada tahun 2014 menjadi 80 % pada tahun 2019.	1. Cakupan layanan sampah 57,2%
		b) Meningkatnya Penerapan praktek 3-R dan membudayakan kembali sifat gotong royong masyarakat.	-
		c) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah sebelum ke TPA sebesar 20% pada tahun 2019	-

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru 2014-2018

c) Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Kemudian dilakukan penetapan strategi percepatan pembangunan sanitas dalam hal ini sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan. Berikut Berikut Tabel Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi pada sektor air limbah domestik dan sektor persampahan di Kota Pekanbaru tahun 2014-2018.

Tabel 5.5 Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pada Sub Sektor Air Limbah Domestik Dan Sub Sektor Persampahan

Sektor Air limbah domestik	Sektor Persampahan
1. Penyusunan Perda pengelolaan Air Limbah Permukiman.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan di wilayah cakupan pelayanan.
2. Pembangunan on site individual pada daerah perkotaan yang padat, kumuh dan miskin.	2. Menambah jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah untuk masyarakat	3. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3 R.
4. Meningkatkan pembinaan terhadap para pengelola sarana air limbah.	4. Mengembangkan sistem penghargaan terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah 3 R,
5. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah.	5. Peningkatan sarana/fasilitas pengurangan sampah,
6. Pembangunan sistem pengolahan limbah sistem off-site skala kawasan maupun skala kota	
7. Membangun dan mengoptimalkan fungsi IPLT.	
8. Penyuluhan tentang jamban sehat serta tangki septic yang aman terhadap lingkungan.	

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru 2014-2018

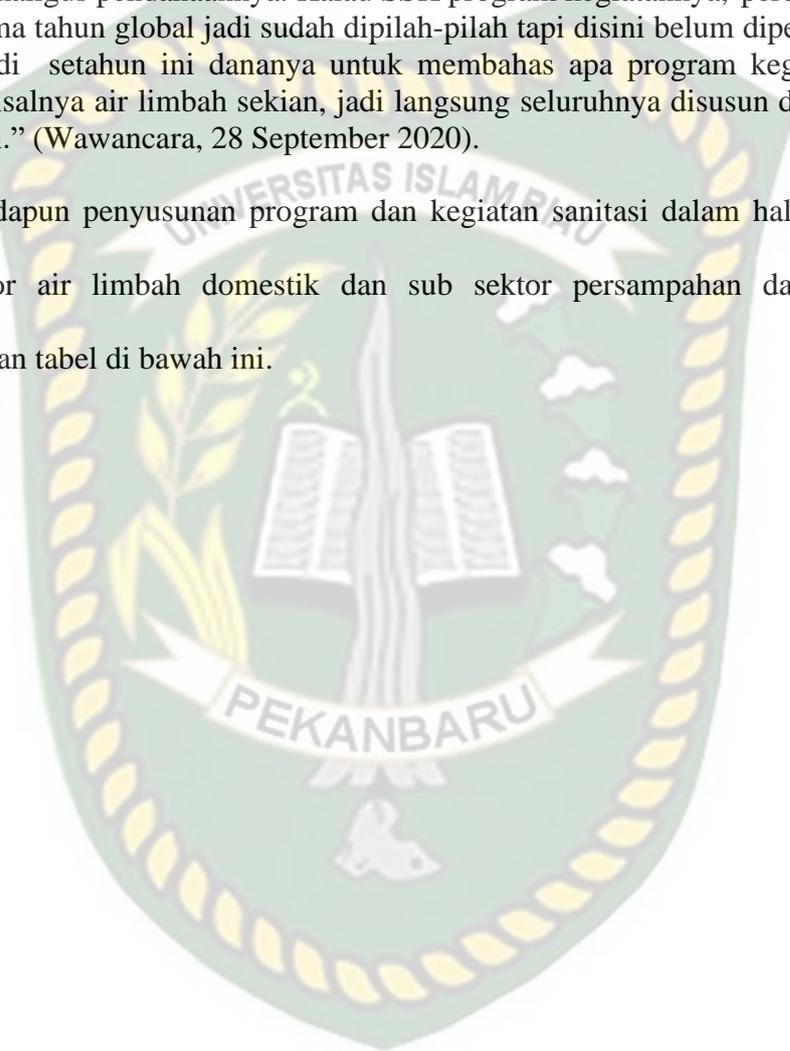
d) Penyusunan Program dan Kegiatan

Selanjutnya, Pokja AMPL mengidentifikasi program dan kegiatan untuk setiap sub-sektor beserta seluruh aspek (aspek peraturan dan kelembagaan, aspek peran serta stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan, dan aspek pembiayaan). Berikut pernyataan dari bapak Kautsar Selaku Sub Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah (P3W) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru dan juga salah satu tim penyusun dokumen

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 tersebut sebagai berikut.

“Nahh, setelah kita ngerti gimana strateginya, kita bisa susun program-programnya seperti apa, kegiatannya apa. Jadi strateginya seperti apa untuk sub-sektor limbah, kegiatannya kita atur apa-apa saja, sekaligus pendanaannya. Kalau SSK program kegiatannya, perencanaannya lima tahun global jadi sudah dipilah-pilah tapi disini belum dipecah-pecah. Jadi setahun ini dananya untuk membahas apa program kegiatan yang misalnya air limbah sekian, jadi langsung seluruhnya disusun dalam tahap ini.” (Wawancara, 28 September 2020).

Adapun penyusunan program dan kegiatan sanitasi dalam hal ini adalah sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.



Tabel 5.6 Program Dan Kegiatan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik

Program / Kegiatan			
Perencanaan Umum	Program Teknik Air Limbah	Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat Dan Sistem Komunal	Sistem Terpusat (Off-Site System)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perda air limbah domestik 2. Penyusunan rancangan perda retribusi air limbah 3. Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang perda air limbah domestik 4. Perda tarip retribusi air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasitasi pembinaan teknik pengolaan air limbah 2. Workshop/seminar pengolahan air limbah 	a) MCK <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik 2. Pembebasan Lahan/Tanah 3. Perencanaan Detail (DED) Pembangunan Sanimas (Pemberdayaan) 4. Pembanguna MCK Umum 5. Operasional Pemeliharaan Sanimas dan SLBM 	a) IPAL Terpusat Sekala Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL kepada masyarakat oleh Dinas Terkait 2. Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL
		b) WC Keliling <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Pemeliharaan mobil WC Keliling 	b) Ipal Kawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Feasibility studi ipal 2. Studi amdal 3. Studi lingkungan sistem pengelolaan air limbah terpusat 4. Sosialisasi "rencana" pembangunan sistem pengelolaan air limbah 5. Pembebasan lahan/tanah 6. Perencanaan Detail (DED) IPAL + sewe 7. Sosialisasi "pembangunan" pembangunan sistem pengelolaan air limbah 8. Pembentukan lembaga pengelola sistim pengolah limbah terpusat 9. Pelatihan pengelolaan sistem pengolah limbah terpusat 10. Operasi dan pemeliharaan

			sistem pengolah air limbah terpusat termasuk perpipaan
			c) Pembangunan IPLT Rejosari 1. Penyusunan FS (Fasibilitaty Study) 2. Pembebasan Lahan / Tanah 3. Perencanaan Detail (DED) 4. Penyusunan AMDAL 5. Sosialisasi dan Kampanye 6. Operasional dan Pemeliharaan IPLT 7. Operasional dan Pemeliharaan Mobil tinja
			d) Pembangunan IPLT Tuah Karya 1. Penyusunan FS (Fasibilitaty Study) 2. Pembebasan Lahan / Tanah 3. Perencanaan Detail (DED) 4. Penyusunan Dokumen lingkungan (Dokumen UKL/ UPL) 5. Sosialisasi dan Kampanye 6. Operasional dan Pemeliharaan IPLT 7. Operasional dan pemeliharaan mobil tinja

Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru 2014-2018

Tabel 5.7 Program Dan Kegiatan Sanitasi Sub Sektor Persampahan

Program / Kegiatan		
Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya	TPS 3R	Pengelolaan Sampah Dari Stasiun Antara Sampai TPA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Study pengembangan bank sampah 2. Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat 3. Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 4. Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 5. Pembentukan pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengelolaan sampah 6. Pembentukan kader warga peduli lingkungan disetiap kelurahan 7. Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan 8. Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW 9. Lomba kebersihan tingkat kecamatan 10. Sosialisasi kebijakan persampahan 11. Program iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan Lahan 2. Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat 3. kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 4. kampanye tata cara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya 5. Pembangunan TPS 3R 6. supervisi pembangunan TPS 7. Pelatihan pengelolaan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW 	<p>a) Alat Angkut Stasiun antara dan TPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Dump Truck 2. Operasional dan Pemeliharaan Dump Truck 3. Pemeliharaan kontainer <p>b) Alat pendukung TPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Excavator 2. operasional excavator dan buldozer <p>c) Pembangunan TPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan Lahan Pembangunan TPA 2. Penyusunan Studi Kelayakan TPA 3. Penyusunan UKL/UPL TPA 4. Sosialisasi Rencana Pembangunan TPA 5. Penyusunan DED TPA

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru 2014-2018

d) Finalisasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018

Finalisasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan Proses terakhir dari serangkaian proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Hasil akhir dari proses ini adalah disahkannya dokumen SSK oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Walikota Pekanbaru. Draft tersebut selanjutnya dibawa kedalam konsultasi publik tingkat Kota untuk mendapatkan dukungan dan masukan dari para pemangku kepentingan disektor sanitasi Provinsi. Langkah terakhir adalah penyusunan dan finalisasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru yang ditandangi oleh Walikota Pekanbaru dan Ketua AMPL Pekanbaru. Berikut gambar sampul Buku Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru.

Gambar 5.4 Sampul Buku Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru



Sumber: Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru

5.1.4 Pelaksanaan/Implementasi SSK Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018

Dalam tahap ini, pelaksanaan program dan kegiatan yang diatur dalam dokumen strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 terdiri dari aspek teknis dan aspek non teknis. Aspek teknis mencakup usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang meliputi layanan sub sektor air limbah domestik, layanan sub sektor persampahan dan layanan sub sektor drainase lingkungan. sedangkan aspek non-teknis terdiri dari peraturan dan kebijakan daerah, keuangan, komunikasi, kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi, konsolidasi data kelembagaan terkait sanitasi, pemetaan keuangan dan perekonomian daerah, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, keterlibatan pelaku bisnis, kajian sanitasi sekolah, aspek gender dan kemiskinan, monitoring dan evaluasi. Namun, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diatur dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 tersebut, peneliti akan membatasi, merangkum dan menguraikan kegiatan yang ada pada sektor air limbah domestik dan sektor persampahan berdasarkan aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran serta stake holders, aspek teknis sistem pengelolaan, dan aspek keuangan. Berikut urainnya

5.1.4.1 Aspek kelembagaan dan peraturan

Dalam pelaksanaannya pada sub sektor air limbah domestik, berdasarkan Perwako Pekanbaru 95 tahun 2016 kelembagaan pengelola air limbah domestik di kelola oleh beberapa SKPD antara lain yakni oleh Dinas perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR. Untuk peraturan daerah terkait air limbah domestik belum tersedia.

Sedangkan dalam pelaksanaan pada sub sektor persampahan, berdasarkan Perwako nomor 95 tahun 2016 tupoksi persampahan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bagian persampahan. Untuk peraturan daerah, Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota N0. 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dan Perizinan Usulan Pengelolaan Sampah.

5.1.4.2 Aspek Peran Serta Stakeholders

Peran serta stakeholders dalam hal ini ialah peran serta swasta dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan program yang tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018.

Pada sub sektor sub air limbah domestik aspek peran stakeholders dari pihak swasta yaitu berupa bantuan dana dalam pembangunan Ipal Komunal / Mck. Namun peran swasta belum ada yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik. Sedangkan untuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Pekanbaru yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IPAL Komunal di Kota Pekanbaru dan adanya badan pengelola dari prasarana yang telah terbangun yang di beri nama Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), dan sudah ada melalui program-program pemberdayaan dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik.

Pada sub-sektor Persampahan dari aspek peran serta stakeholders, Untuk peran swasta dan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kota

Pekanbaru sudah banyak pengepul yang melakukan pengumpulan sampah/barang bekas tapi data-data terkait pengepul masih belum bisa dikumpulkan.

5.1.4.3 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sub sektor air limbah domestik, untuk sistem pengelolaan SPALD terpusat di kota Pekanbaru hingga tahun 2018 secara keseluruhan masyarakat yang terlayani sistem pengelolaan SPALD Terpusat hanya mencapai 1,03 % (2685 KK). Sedangkan untuk sistem pengelolaan SPALD Setempat di kota Pekanbaru hingga tahun 2018 secara keseluruhan, masyarakat yang terlayani sistem pengelolaan setempat berupa tangki septik individual dan Ipal komunal mencapai 90 % (233,001 KK) dari total keseluruhan jumlah penduduk kota pekanbaru sebanyak 259,604 KK

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018, dalam pelaksanaannya pada sub sektor Persampahan, kegiatan pengurangan sampah di kota pekanbaru di lakukan secara mandiri oleh masyarakat (sampah yang tertangani skala rumah tangga) dan pengurangan sampah melalui sampah tereduksi 3R (TPS 3R/TPST/Bank Sampah, untuk sampah tertangani skala rumah tangga hingga tahun 2018 masih mencapai 3,436 Penduduk Terlayani (jiwa), sedangkan pengurangan sampah hingga tahun 2018 sebesar 3,412 Penduduk Terlayani (jiwa). Sedangkan kegiatan penanganan sampah melalui layanan persampahan oleh pemerintah hingga tahun 2018 mencapai 57.48% atau 870.430 Penduduk Terlayani (jiwa).

5.1.4.4 Aspek Pembiayaan

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018, pendanaan untuk pembangunan sanitasi Kota Pekanbaru pada umumnya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN. Aspek pembiayaan dalam hal ini adalah yang berasal dari APBD Kota Pekanbaru. Realisasi anggaran sanitasi bersumber pada dana APBD pada tahun 2014 sebesar 106.544.641.569, pada tahun 2015 sebesar Rp. 107.408.442.732, pada tahun 2016 sebesar Rp. 101.954.322.166, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 76.947.536.601. Sedangkan untuk pendanaan Sanitasi pada sub sektor air limbah domestik sumber APBD Kota Pekanbaru pada tahun 2016 sebesar 943,847,500 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 1,250,761,250 rupiah. Sedangkan untuk pendanaan sumber APBD Kota Pekanbaru untuk Sanitasi pada sub sektor persampahan pada tahun 2015 sebesar Rp. 14,414,037,760, tahun 2016 sebesar Rp. 11,640,232,450, tahun 2017 sebesar Rp. 16,542,400,700, dan 2018 sebesar Rp. 27,765,000,00-.

5.2 Identifikasi Aspek Sanitasi di Kecamatan Tampan Berdasarkan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru dan berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam buku pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2014 terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sanitasi yaitu aspek teknis dan aspek non teknis. Aspek teknis meliputi kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari layanan sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan. Sedangkan aspek non teknis meliputi kelembagaan, peraturan, keuangan, komunikasi, partisipasi masyarakat, dan swasta. Dalam hal ini, peneliti akan membatasi aspek-aspek tersebut menjadi 4 (empat) cakupan bahasan yaitu aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran stakeholders, Aspek teknissistem pengelolaan, dan aspek keuangan/pembiayaan

5.2.1 Aspek Kelembagaan dan Peraturan

Kelembagaan dan peraturan berisi penjelasan ringkas mengenai institusi yang berwenang dalam pengelolaannya (baik operator maupun regulator) serta peraturan dan kebijakan pengelolaan. Berikut merupakan penjabaran aspek kelembagaan dan peraturan pada sektor air limbah domestik dan sektor persampahan.

5.2.1.1 Aspek Kelembagaan dan Peraturan Sektor Air limbah Domestik

Aspek kelembagaan yang dibahas dalam hal ini yaitu kelembagaan lokal yang mengelola sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tampan. Sarana yang digunakan berupa truk tinja yang berfungsi

melakukan penyedotan atau pengurasan tangki septik tank dalam skala rumah tangga baik dari septik tank pribadi maupun septik tank Komunal (Ipal Komunal). Sedangkan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tampan yaitu Ipal Komunal (Sanimas). Adapun lembaga yang mengelola sarana penyedotan atau pengurasan tangki septik tank (truk tinja) dioperasikan oleh pihak swasta. Berdasarkan data, hingga tahun 2018 truk tinja belum diserahkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru (Sumber : SSK Kota Pekanbaru tahun 2014, EHRA 2018, Dinas PUPR). Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Nanda Selaku Seksi Pendataan dan Perencanaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru mengatakan bahwa hingga saat ini (tahun 2020) kota Pekanbaru belum memiliki truk tinja. Berikut pernyataan lengkap pak Nanda.

“Kalau untuk truk tinja, untuk penyedotan tangki septik, itu sampai hari ini kota pekanbaru belum memiliki truk tinja, jadi sekarang penyedotan-penyedotan itu memang dilakukan secara individual dari masyarakat dengan menghubungi pihak swasta, mengeluarkan biaya, ada tarifnya sendiri, nah ituyang belum diatur juga, nanti di dalam Ranperda ituakan di atur, jadi pengangkutannya itu masih di lakukan oleh pihak swasta”. (Wawancara, 19 November 2020).

Sedangkan untuk prasarana pengelolaan air limbah domestik di kecamatan Tampan terdapat Ipal Komunal yang digunakan untuk pengolahan air limbah domestik dengan sistem pengolahan setempat. Berdasarkan data dari dinas Perkim Kota Pekanbaru ada total 11 (sebelas) Ipal Komunal yang tersebar di Kecamatan Tampan yaitu di kelurahan Tuah Karya, kelurahan Delima, kelurahan Tuah Madani, kelurahan Sidomulya Barat, dan Kelurahan Simpang baru. Untuk kelembagaan yang mengelola Ipal Komunal tersebut yaitu lembaga lokal yang

disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP). Adapun nama kelembagaan lokal di kecamatan tampan meliputi Delima Sejahtera, Tuah Serumpun, Madani Bertuah, KSM/KPP Bening Jaya, dan KSM/KPP Baitul Makmur.

Berdasarkan hasil dari beberapa narasumber, hal yang sama juga dijelaskan mengenai kelembagaan lokal yang mengelola prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan, berikut hasil wawancaranya.

1. Pak Sulaiman selaku kasi Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru mengatakan, “kelembagaan ini yang pertama IPAL skala komunal, pekerjaannya dari KSM mulai yang merencanakan, mengawas, dan mengerjakan. Perencanaan dibantu oleh dinas, kalau sudah selesai Ipal, diserahkan ke dinas, dari dinas terus ke KPP. KPP nya dari masyarakat. Pembentukan KPP dan KSM dari masyarakat sekitar yang memiliki tugas merawat, pemanfaat dan juga pemakai. (wawancara, 19 November 2020).
2. Pak Nanda selaku Seksi Pendataan dan Perencanaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru mengatakan, “IPAL komunal skala domestik yang mengelola ialah Kelompok Pemanfaat Dan Pemelihara (KPP), dibentuk unsurnya dari masyarakat setempat yang terlayani oleh Ipal Komunal tersebut.(wawancara, 19 November 2020).
3. Pak Supari selaku Kasi Perencanaan Cipta Karya dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru mengatakam, “iya KPP namanya, Kelompok Penerima Dan Pemanfaat. Waktu membangun itu kita membikin lembaga namanya KSM (Kelompok swadaya masyarkat), setelah dibangun di serahkan ke KPP, Kelompok Penerima Dan Pemanfaat kalau gak salah, eh pemanfaat dan pemelihara, dia yang memanfaatkan dia yang memlihara, KPP Serahkan ke perkim.(wawancara, 9 November 2020).

Berdasarkan data dari dinas Perkim Kota Pekanbaru dan melalui hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, bahwa untuk kelembagaan lokal yang mengelola air limbah domestik di Kecamatan Tampan, untuk sarana pengelolaan air limbah domestik (truk tinja) masih dikelola oleh pihak swasta/ perusahaan-perusahaan yang mengelola urusan penyedotan/pengurusan tangki septik tank dan untuk prasarana pengeloan air limbah domestik (Ipal Komunal)

dikelola oleh lembaga lokal di Kecamatan Tampan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) yang ada di Kecamatan Tampan.

Selanjutnya, untuk aspek peraturan mengenai air limbah domestik, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 terkait air limbah domestik di kota Pekanbaru telah dikelola oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain yakni oleh Dinas perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekanbaru memfasilitasi untuk penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik dan tahun 2019 tersedia Perda Air Limbah Domestik (Sumber : SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018). Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pak Supari selaku Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Cipta Karya di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, hingga tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru masih sedang menyusun Ranperda Air Limbah Domestik tersebut dan belum final, sehingga pada saat ini peraturan terkait air limbah masih mengacu kepada peraturan/undang-undang yang ada di pusat. Berikut pernyataan pak Supari.

“Perda air limbah masih pakai peraturan dari pusat, dari kementerian dan juknis atau petunjuk teknis dari kementerian, kalau Pekanbaru sendiri Ranperda air limbah itu sedang disusun, sedang di audit di DPRD dan masih dalam tahap pembahasan, insyaallah tahun 2021 mendatang baru dilanjutkan lagi pembahasannya, karena kemarin banyaknya Ranperda yang ditahun 2019 sama tahun 2020 jadi ada yang ditambahkan terkait air limbah ini dan akan disusul kembali pada tahun 2021, tapi udah di DPR barangnya, ranperdanya. Jadi kalau yang sekarang ini masih pakai dari kementerian sama juknis nya. (Wawancara, 23 november 2020).

Jadi, untuk aspek peraturan pada sektor air limbah domestik ada Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 mengenai Tupoksi oleh beberapa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain yakni oleh Dinas perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan tetapi untuk Perda dalam pengelolaan air limbah domestik masih dalam tahap penyusunan atau masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

5.2.1.2 Aspek Kelembagaan dan Peraturan Sub Sektor Persampahan

Aspek kelembagaan dan peraturan yang di bahas dalam hal ini adalah kelembagaan yang mengelola sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan disertai dengan Perda yang mengatur dalam pengelolaan persampahan. Adapun sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Tampan berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 berupa pewadahan komunal (TPS, TPS 3 R, Bank Sampah) dan sarana pengangkut sampah (truk sampah) yang berada di kecamatan Tampan.

Sistem pengelolaan sampah kota Pekanbaru didasarkan pada sistem zona. Untuk sarana pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru terbagi menjadi 3 Zona wilayah dengan kerja sama dari pihak ke-3 yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah. Untuk Wilayah zona 1 terdiri dari Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Tampan, zona 1 merupakan wilayah zona yang di kelola oleh PT Godang Tua Jaya. Untuk Wilayah zona 2 terdiri Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Limapuluh, dan Kecamatan Pekanbaru Kota, zona 2 merupakan wilayah zona yang di kelola oleh PT Samhana Indah. Sedangkan untuk wilayah zona 3 terdiri Kecamatan Rumbai dan

Kecamatan Rumbai Pesisir, zona 3 merupakan wilayah zona yang di kelola langsung oleh DLHK Kota Pekanbaru (sumber : DLHK) Kota Pekanbaru, 2020). Jadi berdasarkan pembagian sistem zona tersebut, untuk kecamatan Tampan termasuk kedalam zona 1 (satu), sedangkan lembaga yang mengelola sarana pengangkutan sampah di kecamatan Tampan yaitu dari pihak swasta / pihak ke-3 (tiga) yakni PT Godang Tua Jaya.

Selanjutnya, untuk tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah yang berada di Kecamatan Tampan, terdapat 23 titik Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah yang tersebar di kecamatan Tampan, dimana diantaranya 2 titik TPS dengan status kepemilikan lahan dari masyarakat berlokasi di TPS Perum Wadya Graha II (Jl. Srikandi) yang berada di lahan kosong dan di lokasi TPS Simpang Jalan Abadi (Jl. Soekarno Hatta) yang berada di pinggir jalan. Lalu, terdapat 4 titik TPS dengan status kepemilikan swasta yaitu TPS milik RS.Awalbros, TPS milik RS.Aulia, TPS milik RS Tipe C. dan TPS milik Toko Dunlop. (Sumber DLHK,2020).

Selain Tempat Penampungan Sementara (TPS), terdapat TPS 3R dan Bank Sampah di Kecamatan Tampan. Untuk TPS 3R di kelola oleh lembaga lokal yang di sebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPS 3R di kecamatan Tampan yaitu KSM Mandiri Bersama (Sumber DLHK,2020). TPS 3R yang diberi nama unit pengolahan TPS 3R KSM Mandiri Bersama dirikan dari tahun 2015 dan hingga sekarang masih berfungsi. TPS 3R KSM Mandiri Bersama berdasarkan SK/BH nomor 02/BAST-TPS3R/DLHK/1/2017 dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Bersama yang saat ini diketuanya oleh bapak Tri

Joko Waluyo, TPS 3R KSM Mandiri Bersama memiliki jumlah nasabah mencapai 2800 orang.

Sedangkan untuk bank sampah, terdapat 2 bank sampah di Kecamatan Tampan yang dikelola oleh pihak swasta yaitu bank sampah mutiara dikelola oleh PT Pengadaian (Persero) dan Bank Sampah Bukit Hijau Berlian yang di bangun dan berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru yang hingga saat ini dikelola oleh pak Syarifah Anum sebagai ketua pengurus Bank Sampah Bukit Hijau Berlian. (Sumber DLHK,2020).

Selanjutnya untuk aspek peraturan persampahan, sudah ada Perwako Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru di bagian persampahan dan Peraturan Wali kota Pekanbaru nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dan Perizinan Usulan Pengelolaan Sampah (Sumber : SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018). Sedangkan untuk Perda kota pekanbaru yang mengatur pengelolaan sampah sudah diatur juga didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 ini berisikan segala bentuk hal mengenai persampahan seperti ruang lingkup pengelolaan sampah yang meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik, pengurangan dan penanganan sampah, prasarana dan sarana, sistem pembiayaan pengelolaan sampah, retribusi dan iuran sampah, peran serta masyarakat, perizinan, insentif dan disinsentif, dan kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Novan selaku Kasi bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, pak Novan menyampaikan hal yang sama pula mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tampan. Menurut pak Novan, jenis sampah yang di kelola hanya sampah rumah tangga dan jenis sampah rumah tangga saja tidak dengan sampah spesifik, hal ini di karenakan volume yang di miliki sampah itu masih bisa di layani, sampah rumah tangga adalah sampah yang di hasilkan dari kegiatan kita sehari hari. Berikut pernyataan pak Novan berdasarkan hasil wawancara.

“Di tampan sampah itu dikelola dari TPS ke TPS, TPS liar, pasar, dan dari permukiman masyarakat, nah disini kita berpedoman kepada perda nomor 8 tahun 2014 tentang masalah persampahan, jenis sampah apa saja yang kita kelola, sampah yang kita kelola hanya sampah rumah tangga dan hanya sampah jenis rumah tangga.sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari apapun itu, sampah sejenis rumah tangga sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat umum, wisata, halte, perusahaan, sekolah, ruko-ruko,kenapa hanya sampah itu saja, karena sampah itu yang memiliki volume yang bisa kita layani, kalau seandainya sampahnya seperti ongkakan batu-btua, pemecahan rumput atau potong-potongan ranting atau pohon, ranting, dan sebagian yaitu volumenya besar, tonasenya besar, cuman sampahnya gak ada, nanti sampahnya segini beratnya minta ampun, kita gak mau kriterianya sampai disitu”.(Wawancara, 11 november 2020).

Pernyataan pak Novan diatas didukung dengan nomor kontrak 02/KONTRAK-JAP1/ LELANG /DLHK/APBD/2018 dimana untuk jasa pengangkutan sampah di kecamatan Tampan yang merupakan wilayah zona 1 di operasionalkan oleh pihak ke-3 (tiga) / pihak swasta yaitu PT. Godang Tuah Jaya. PT. Godang Tuah jaya memilki kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam bidang persampahan yaitu dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, baik dengan sistem langsung maupun tidak langsung.

Jadi, berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dan data yang di peroleh melalui DLHK Kota Pekanbaru, untuk kegiatan pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan saat ini di kelola oleh lembaga swasta / pihak ke-3 (tiga) yaitu PT Godang Tua Jaya. Sedangkan, untuk peraturan di gunakan Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru nomor 95 tahun 2016, Peraturan Wali kota Pekanbaru nomor 60 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014.

5.2.2 Aspek Peran Serta Stakeholders

Sektor sanitasi tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja, tetapi harus multi sektor, karena itu semua perlu bersinergi untuk menangani. Selain peran dari pemerintah, peran partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat (LSM) dan swasta merupakan aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan upaya pengelolaan sanitasi lingkungan. Pemerintah akan sulit mencapai keberhasilan programnya tanpa dukungan peran serta aktif seluruh masyarakat maupun swasta yang terlibat dalam kegiatan dan program tersebut, tanpa adanya peran serta masyarakat maupun swasta yang terlibat terhadap semua program pengelolaan sanitasi lingkungan yang direncanakan akan kurang optimal.

5.2.2.1 Aspek Peran Serta stakeholders Sektor Air limbah Domestik

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Pekanbaru sudah ada melalui program-program pemberdayaan dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya keterlibatan masyarakat pada pembangunan IPAL Komunal di Kota Pekanbaru serta adanya badan pengelola dari prasarana yang telah

terbangun, walaupun peran swasta belum ada yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik.

Berdasarkan klasifikasi peran menurut Nugroho (2014), peneliti mewancarai beberapa narasumber yang merupakan ahli kunci untuk memperoleh informasi mengenai peran dari pihak swasta maupun masyarakat/kelompok masyarakat (LSM) yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tampan. Adapun narasumber yang menjadi ahli kunci dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru / pihak instansi (dinas) yang terkait dalam pengelolaan air limbah domestik diantaranya dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru dan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang di peroleh melalui narasumber mengenai peran dari pihak swasta maupun masyarakat/kelompok masyarakat (LSM) tersebut, akan di sesuaikan berdasarkan klasifikasikan peran menurut Nugroho (2014), berikut pernyataan dari beberapa narasumber sebagai ahli kunci mengenai peran yang di lakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat/kelompok masyarakat (LSM).

1. Pak Sulaiman selaku kasi Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru mengatakan, “kalau dari peran serta investor/pihak swastanya kita belum ada, cuman ada dapat bantuan dari ISDB (Islamic Development Bank), dari luar negeri, itu peran serta dari sekundernya, itu berupa dana untuk pembangunan Ipal nya, kalau dari bentuk peran serta masyarakatnya sebagai pemanfaat, pemanfaat atau pemeliharaan. (wawancara, 19 November 2020).
2. Pak Nanda selaku Seksi Pendataan dan Perencanaan PSU dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru mengatakan, “Sampai sekarang peran serta swasta belum ada yang ikut langsung dalam pembangunan maupun investasi di air limbah, sampai sekarang pembangunannya murni dari masih dana pemerintah, pengelolaannya baru pengelolaan yang dilakukan dari masyarakat setempat kalau untuk air limbah domestik”, lanjut pak Nanda mengatakan bahwa,

“Untuk peran masyarakat itu kelompok pemeliharaan dan pengelola (KPP) itu unsurnya dari masyarakat. (wawancara, 19 November 2020).

3. Pak Sufari selaku Kasi Perencanaan Cipta Karya dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru mengatakan, “Iya, KPP namanya itu, kelompok penerima dan pemanfaat. Jadi, gini waktu membangun itu kita membikin lembaga namanya KSM (Kelompok swadaya masyarakat), setelah di bangun di serahkan ke KPP (Kelompok Penerima dan Pemanfaat kalau gak salah, eh pemanfaat dan pemelihara, dia yang memanfaatkan dia yang memelihara, setelah itu KPP Serahkan ke Perkim.(Wawancara, 9 november 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, bahwa untuk bentuk peran serta stakeholders dalam hal ini investor atau pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tampan jika merujuk dalam klasifikasi peran menurut Nugroho (2014), yaitu sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana, hal ini dikarenakan adanya bantuan dalam bentuk dana untuk pembangunan Ipal Komunal di Kecamatan Tampan yang di berikan oleh salah satu lembaga swasta dari luar negeri yaitu Islamic Development Bank (IsDB).

Sedangkan bentuk peran serta masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tampan jika merujuk dalam klasifikasi peran menurut Nugroho (2014), yaitu sebagai sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah dan ikut dalam kegiatan pembangunan, hal ini karena adanya lembaga lokal dari masyarakat untuk mengelola sarana pengelolaan air limbah domestik yang berupa Ipal Komunal di Kecamatan Tampan, lembaga lokal tersebut diberi nama Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan dalam rembuk warga. Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara bersama pak Sulaiman selaku kasi Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perkim kota Pekanbaru bahwa pembangunan Ipal Komunal

(Sanimas) di Kecamatan Tampan dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kecamatan Tampan dan setelah pembangunan selesai akan di kelola oleh Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) di Kecamatan Tampan.

5.2.2.2 Aspek Peran Serta stakeholders Sub Sektor Persampahan

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 peran serta masyarakat dalam persampahan sudah banyak pengepul yang malakukan pengumpulan sampah/barang bekas, tetapi data-data terkait pengepul masih belum bisa dikumpulkan dan terdapat juga peran serta dari kelompok masyarakat lokal di kecamatan Tampan yang diberi nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Bersama. KSM Mandiri dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat yang dilaksanakan dalam rembuk warga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang berupa fasilitas TPS 3R, hal ini berdasarkan SK 02/BAST-TPS3R/DLHK/1/2017 yang hingga saat ini di kelola oleh bapak Tri Joko Waluyo sebagai ketua pengurus TPS 3R di Kecamatan Tampan.

Selain peran serta dari masyarakat dan kelompok masyarakat / LSM, peran serta swasta juga ikut andil dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan yaitu dengan mengoperasikan kegiatan pengangkutan sampah di wilayah zona 1 yaitu Kecamatan Tampan yang diangkut langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kegiatan ini dilakukan oleh PT Godang Tuah Jaya sebagai pihak ke-3 (tiga) yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru (Sumber : Bappeda Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Novan selaku Kasi penanganan dan pemrosesan akhir sampah bidang pengelolaan sampah DLHK Kota

Pekanbaru, pak Novan juga menyampaikan hal serupa pula mengenai peran serta pihak swasta dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan untuk pengangkutan sampah di wilayah zona 1 yaitu Kecamatan Tampan yang di angkut langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kegiatan ini di lakukan oleh PT Godang Tuah Jaya sebagai pihak ke-3 (tiga) yang bekerjasama dengan pemerintah kota Pekanbaru. Berikut keterangan pak Novan berdasarkan hasil wawancara.

“Untuk Stakeholders pihak ke-3 untuk yaitu zona 1 itu PT Godang Tua Jaya, untuk zona 2 oleh PT Sam Hana indah, untuk zona 3 dinas yang mengelola dari pihak Pemerintah Kota, jadi untuk zona 1 dan zona 2 yang kelola adalah pihak swasta dalam artian mereka itu adalah bagian dari kita bukan kita bagian dari mereka, mereka kerjasama dengan kita, dan kita juga berikan pengawasan pada mereka”. (Wawancara, 11 november 2020)

5.2.3 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan Sub Sektor Air Limbah Domestik

5.2.3.1 Ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limah Domestik

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dari 53,342 KK di Kecamatan Tampan tahun 2018, sebagian masyarakat menggunakan jamban keluarga (Septik tank pribadi) sebagai tempat Buang Air Besar (BAB) sebesar 50,840 KK, selebihnya menggunakan MCK umum, sungai dan yang lainnya. Sementara itu air limbah buangan dapur dan kamar mandi dari masing-masing rumah langsung dialirkan keselokan/sungai tanpa diolah terlebih dahulu (dokumen SSK kota Pekanbaru tahun 2014-2018). Ini membuktikan bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tampan belum menyeluruh.

Ketersediaan saluran pembuangan air limbah domestik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat (DepKes RI, 1993) yang meliputi tidak menimbulkan genangan air yang menjadi sarang serangga/nyamuk, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan becek, kelembaban dan pandangan yang tidak menyenangkan, dan

mengalir lancar. Observasi dilakukan pada daerah yang memiliki tingkat sanitasi yang tidak baik, hal ini didasari dari peta area beresiko sanitasi yang terdapat di dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018. Di kecamatan Tampan, berdasarkan peta area beresiko sanitasi tersebut, kelurahan yang memiliki sanitasi yang buruk terdapat pada kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sialang Munggu, dan Kelurahan Tobek Godang. Berikut merupakan distribusi/hasil kuesioner mengenai kondisi saluran pembuangan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Kondisi Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kondisi SaluranPembuangan Air Limbah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak memiliki SPAL	0	0 %
2	Memiliki SPAL		
	-Tidak Memenuhi Syarat	39	39 %
	-Memenuhi Syarat	61	61 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas, dapatdiketahui bahwa sebagian besar kondisi saluran pembuangan air limbah domestik di Kecamatan Tampan sudah memenuhi persyaratan sebanyak 61 responden (KK) atau 61 %. Sedangkan untuk kondisi saluran pembuangan air limbah domestik penduduk yang tidak memenuhi syarat yaknisebanyak 39 responden (KK) atau 39 %.

5.2.3.2 Tingkat pengelolaan dengan akses dasar

Penerapan akses dasar di perkotaan sudah tidak boleh lagi dilakukan dan masuk dalam kategori tidak layak. Namun, berdasarkan data dari dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota pekanbaru tahun 2014-2018, masih terdapatnya praktek pengelolaan dengan akses dasar dasar seperti penggunaan cubluk atau

tangki septik yang tidak aman sebesar 1.5 % (3,943 KK) di Kota Pekanbaru dan untuk di kecamatan Tampan sebesar 1,331 KK.

5.2.3.3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Adapun komponen SPALD-S nya akan di uraikan sebagai berikut.

A. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pengolahan setempat digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) dilokasi sumber berupa septik tank pribadi (individual) dan septik tank yang di gunaka bersama-sama (komunal). Berdasarkan kapasitasnya, pengolahan setempat dibagi menjadi menjadi dua (2) skala yaitu skala individual dan skala komunal. Untuk pengolahan setempat skala individual diperuntukan pada satu (1) unit rumah tinggal yang di lengkapi cublik kembar / tangki septik tank pribadi. Berdasarkan data dari dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018, untuk jumlah KK yang menggunakan pengolahan setempat skala individual/sepik tank pribadi di Kecamatan Tampan sebesar 46,271 KK. Berikut gambar pengolahan setempat skala individual yang di lengkapi cublik kembar / tangki septik tank pribadi.

Gambar 5.5 Pengolahan Setempat Skala individual

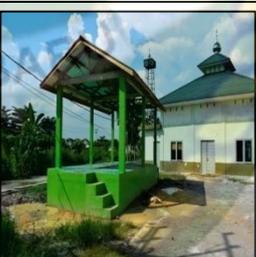


Sumber : Hasil Observasi, 2020

Sedangkan untuk pengolahan setempat skala komunal diperuntukan untuk 2 (dua) sampai dengan sepuluh 10 (sepuluh) unit rumah tinggal. Berdasarkan data dari dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018, pengolahan setempat skala komunal di kecamatan tampan berupa IPAL Komunal permukiman berbasis masyarakat / MCK dengan cakupan pelayanannya secara keseluruhan mencapai 1580 KK. Berikut hasil observasi berupa gambar Ipal Komunal / MCK di Kecamatan Tampan.

Tabel 5.9 Gambar Ipal Komunal / MCK di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Lokasi	Nama LKM	Dokumentasi	Keterangan
1	Delima	Jl. Permada ni III RT 02 RW 08	Delima Sejahtera		Ipal Komunal 425.000.000 bantuan Dana IsDB Di bangun tahun 2019 Bangunan baik dan beroperasi.
2	Tuah Karya	Jl. Swakarya RT 04 RW 04	Tuah Serumpun		Ipal Komunal 420.000.000 dari PHLN-15B Di bangun tahun 2015 Bangunan baik dan beroperasi.

No	Kelurahan	Lokasi	Nama LKM	Dokumentasi	Keterangan
3	Tuah Karya	Jl. Swadaya RT 04 RW 01	Tuah Serumpun		Ipal Komunal 425.000.000 dari PHLN-IDB Di bangun tahun 2015 Bangunan baik dan beroperasi.
4	Delima	Jl. Permada ni III RT 02 RW 08	Delima Sejahtera		Ipal Komunal 425.000.000 dari PHLN-IsDB Di bangun tahun 2019 Bangunan baik dan beroperasi.
5	Tuah madani	Jl. Manung gal Perum Damai Astri RT 01 RW 05	Madani Bertuah		Ipal Komunal 425.000.000 dari PHLN-IDB Di bangun tahun 2019 Bangunan baik dan beroperasi.
6	Tuah Karya	Jl. Taman Karya RT 04 RW 13	Tuah Serumpun		Ipal Komunal 425.000.000 dari PHLN-IDB Di bangun tahun 2019 Bangunan baik dan beroperasi.
7	Tuah Karya	Jl. HR. Subranta s Gg. Al-Mukhsin in RT 02 RW 01	Tuah Serumpun		Ipal Komunal 425.000.000 dari PHLN-IDB Di bangun tahun 2019 Bangunan baik dan beroperasi.
8	Sidomulyo Barat	Jl. Rowo Bening RT. 04 RW. 20	KSM / KPP Bening Jaya		Ipal Komunal 450.000.000 dari DAK Di bangun tahun 2017 Bangunan baik dan beroperasi.

No	Kelurahan	Lokasi	Nama LKM	Dokumentasi	Keterangan
9	Sidomulyo Barat	Jl. Baitul Makmur RT. 02 RW. 10	KSM / KPP Baitul Makmur		Ipal Komunal 570.000.000 dari DAK Di bangun tahun 2017 Bangunan baik dan beroperasi.
10	Simpang Baru	Pondok Pesantren Dar El Hikmah Jl. Manyar Sakti KM. 12			Pembangunan MCK Plus dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap 463.750.000 DAK TA. 2020 Bangunan baik dan beroperasi.
11	Delima	Jl. Permadani Raya II RT 03 RW 08	Delima Sejahtera		Ipal Komunal 425.000.000 dari PHLN-IsDB Di bangun tahun 2015 Bangunan baik dan beroperasi.
12	Sidomulyo Barat	Jl. Harapan Ujung RT.02 RW.09	KSM Baitul Makmur		MCK Plus 420.000.000 dari APBD Di bangun tahun 2015 Bangunan baik dan beroperasi.
13	Sidomulyo Barat	Jl. Purwoda di Perum Pondok Permata Primkop ad RT 01 RW 13	KSM Baitul Makmur		MCK Plus 420.000.000 dari APBD Di bangun tahun 2015 Bangunan baik dan beroperasi.

Sumber : Hasil Observasi 2020, Dinas Perkim 2020

B. Sub-sistem Pengangkutan

Berdasarkan data dari dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 sarana pengangkutan lumpur tinja (truck tinja) hbelum bisa beroperasi karena belum tersedianya truk tinja dari pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah kota Pekanbaru belum bisa memberikan layanan truk tinja (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2019). Namun untuk melakukan penyedotan/pengurasan tangki septic tank individual maupun komunal (IPAL komunal), truk tinja dilayani oleh pihak swasta, berdasarkan data sebesar 59 % masyarakat yang melakukan pengurasan tinja menggunakan layanan sedot tinja swasta, dimana tinja nya masih dibuang ke kebun/sungai (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Nanda Selaku Seksi Pendataan dan Perencanaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru, untuk jumlah, kapasitas, dan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja pihak instansi terkait dalam hal ini adalah dinas Perkim, hingga saat ini belum memiliki data mengenai jumlah, kapasitas, dan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja, hal ini karena belum tersedianya layanan truk tinja oleh pemerintah kota pekanbaru dan Perda yang mengatur dalam pengangkutan air limbah juga masih dalam tahap Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah). Berikut keterangan hasil wawancara bersama pak Nanda.

1. Untuk jumlah truk tinja lebih dari satu dikelola oleh swasta.
2. Untuk penyedotan tangki septik sampai hari ini Kota Pekanbaru belum memiliki truk tinja, jadi penyedotan dilakukan secara individual dari masyarakat dengan menghubungi pihak swasta dan mengeluarkan biaya, ada tarifnya sendiri, namun belum diatur, nanti didalam ranperda itu akan diatur, jadi pengangkutannya itu masih dilakukan oleh pihak swasta.

3. Untuk kapasitas truk tinja datanya gak ada, karna yang punya swasta.
4. Penyedotan dilakukan oleh truk tinja dari swasta. Mungkin kalau jumlah swastanya yang berizin, penyedotan tinja berizin bisa diminta data ke DPMPTS jumlah perusahaan sedot tinja yang berizin. (Wawancara, 19 november 2020).

Pak Nanda juga mengatakan berdasarkan keterangannya, bahwa untuk truk tinja masih belum tersedia oleh pemerintah kota Pekanbaru, sehingga untuk melakukan perhitungan berdasarkan data-data mengenai berapa jumlah rumah yang terlayani, volume tangki septik Komunal, periode penyedotan (tahun), dan jumlah hari kerja dalam operasional layanan pengangkutan lumpur tinja datanya belum terakomodir/belum tersedia oleh dinas terkait dalam hal ini dinas Perkim dan PUPR kota Pekanbaru. Berikut penjelasan pak Nanda.

“Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki truk tinja yang menjadi aset daerah, jadi belum bisa melakukan perhitungan, karena selama ini pihak swasta yang melakukan penyedotan dan belum terdata sama kita. Kalau di pihak swasta sendiri, biasanya ada mereka melakukan perhitungan”,(Wawancara, 19 november 2020).

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru, truk tinja masih dimiliki oleh pihak swasta dan belum diinventarisasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019). Untuk melakukan penyedotan/pengurasan lumpur tinja pada tangki septik masih dilayani oleh pihak swasta. Penyedotan lumpur tinja umumnya dilakukan 2-3 tahun sekali, (Sumber : Buke E Panduan Perencanaan Pelayanan Lumpur Tinja). Berdasarkan hasil kuesioner, frekuensi penyedotan/pengurasan tangki septik individual (pribadi) yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan sarana penyedot / pengurasan lumpur tinja dapat di lihat pada tabel 5.10 Berikut.

Tabel 5.10 Frekuensi pengurasan tangki septik individual oleh masyarakat dengan menggunakan Truk Tinja

No	Frekuensi penyedotan	Frekuensi	Persentase (%)
1	2-3 Tahun Sekali Secara Berkala	0	0%
2	2-3 Tahun Sekali Secara Tidak Berkala	2	2 %
3	Lebih Dari 3 Tahun Sekali	52	52 %
4	Lebih Dari 5 Tahun Sekali	41	41 %
5	Tidak Pernah Sama Sekali	5	5 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber : Hasil Survei, 2020

Berdasarkan Tabel 5.10, bahwa mayoritas masyarakat di kecamatan Tampan yang melakukan penyedotan tangki septik individual (pribadi) dengan menggunakan sarana truk tinja yaitu lebih dari 3 (tiga) tahun sekali sebanyak 53 responden (kk) atau sebesar 52 %. Untuk yang melakukan penyedotan/pengurasan tangki septik menggunakan truk tinja lebih dari 5 (lima) tahun Sekali sebanyak 41 responden (kk) atau sebesar 41 % dan yang tidak pernah sama sekali melakukan penyedotan/pengurasan tangki septik individual (pribadi) sebanyak 5 responden (kk) atau sebesar 5 %. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tampan dalam melakukan penyedotan/pengurasan tangki septik individual (pribadi) tidak sesuai dengan aturan teknis yang berlaku yaitu dilakukan 2-3 tahun sekali secara berkala.

Ritasi layanan lumpur tinja yang selanjutnya disebut ritasi adalah satu rangkaian perjalanan dari suatu kendaraan lumpur tinja untuk melakukan penyedotan lumpur tinja disatu bangunan atau lebih yang diikuti dengan pengangkutan lumpur tinja ke IPAL / IPLT yang ditentukan. Untuk mengetahui frekuensi ritase operasi layanan lumpur tinja dalam perhari digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{frekuensi ritasi} = \frac{\text{Jumlah Rumah}}{\text{Ritasi}}$$

Namun, data-data seperti jumlah rumah yang dilayani truk tinja serta data berapa banyak ritasi yang dilakukan dari rangkaian perjalanan kendaraan lumpur tinja untuk melakukan penyedotan lumpur tinja disatu bangunan atau lebih yang diikuti dengan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, hingga saat ini data-data tersebut belum tersedia, hal ini karena belum adanya truk tinja yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan kegiatan penyedotan/pengurasan tangki septik individual maupun komunal pada masyarakat (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019). Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pak Nanda Selaku Seksi Pendataan dan Perencanaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru. Berikut keterangan pak Nanda berdasarkan hasil wawancara.

“Untuk frekuensi ritasi pengangkutanitu kita gak ada datanya disini, nanti abang takut salah pula penyampaiannya. Karena ya itu tadi, pengangkutan itu masih di kelola oleh pihak swasta.Kalau untuk frekuensi penyedotan itu pihak swasta yang tau lebih tau itu berapa kali frekuensinya dan pihak swasta yang melakukan penyedotan itu sampai hari ini belum ada kami datanya, belum tersedia datanya”. (Wawancara, 19 november 2020)

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dan literature berupa dokumen Dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2019, bahwa untuk sub-sistem pengangkutan lumpur tinja di kota Pekanbaru masih dioperasikan oleh pihak swasta, sehingga untuk mengetahui jumlah, kapasitas, jenis sarana pengangkutan lumpur tinja, beban sarana pengangkutan, dan frekuensi ritasi truk tinja datanya belum tersedia oleh pemerintah kota pekanbaru.

C. Sub Sistem Pengolahan lumpur tinja

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk kedalam IPLT. Berdasarkan dokumen Straregi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018, melalui program/kegiatannya sudah direncanakan pembangunan IPLT di Kelurahan Tuah Karya, namun berdasarkan hasil observasi tidak ditemukan bangunan IPLT yang terdapat di Kecamatan Tampan termasuk dikelurahan Tuah Karya. Namun pembangunan IPLT telah ada terletak di Kecamatan Rumbai, Kelurahan muara fajar sekitar 20 km dari pusat kota. Fasilitas ini dibangun pada tahun 1997, hanya beroperasi untuk waktu yang singkat dan direnovasi kembali pada tahun 2006, namun kembali tidak beroperasi secara efektif hingga saat ini. IPLT Muara Fadjar memiliki kapasitas 40 m³/hari tidak berfungsi hingga saat ini dan kapasitas yang ada tidak cukup untuk melayani seluruh area Kota Pekanbaru. Wilayah yang di layani IPLT Muara fajar yaitu di Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir (Sumber : Laporan Akhir Rencana Induk Kota Pekanbaru).

IPLT muara fajar belum bisa dioperasikan dan belum ada kelembagaan (UPTD) yang khusus menangani pengelolaan air limbah (Pemerintah, swasta dan masyarakat) hal ini dikarenakan IPLT muara fajar yang berada di Kecamatan Tampan masih belum diserahkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019). Hal ini sama yang di sampaikan Pak Sulaiman selaku kasi Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) kota Pekanbaru mengatakan. Berikut pernyataan pak sulaiman.

“IPLT itu udah dibangun,tapi belum dioperasikan, belum di serah terimakan ke kita operasionalnya, masih sama kementrian, jadi

pengelolaannya belum jelas, belum ada proses dari sana, itu sekarang kendalanya, kalau mau lihat ada di muara fajar, TPA Muara Fajar, IPLT disitu ada juga disitu”. (Wawancara, 19 november 2020).

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2019, IPLT muara fajar di kecamatan Rumbai pada tahun 2020 akan difungsi kembali namun kenyataannya belum di operasionalkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Sebagai tambahan, pak Yeni selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau juga memberikan pendapat mengenai belum berfungsinya IPLT di kota Pekanbaru. Berikut keterangan dari pak Yenni.

“Sebenarnya kita pernah juga bangun IPLT kota pekanbaru di muara fajar, tapi ternyata sampai sekarang belum fungsional, dibangun tahun 1997 sampai sekarang belum dioperasionalkan, makanya kalau ada tangki septic warga yang disedot dari mobil truck angkut tinja, coba sesekali diikuti kemana dibuang tinjanya, itu mereka buang ke sungai atau ke sawit, ya karna sampai sekarang IPLT kita belum operasional makanya mereka buangnya kesana, karena pengolahan nya di IPLT itu belum beroperasi..(Wawancara, 16 Desember 2020).

Hal yang serupa pula di sampaikan pak Supari selaku Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Cipta Karya di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru juga mengenai IPLT muara fajar yang berada di kecamatan Rumbai yang hingga saat ini belum operasional. Berikut pernyataan Pak Supari.

“Nah dari IPAL itu ada semacam penjadwalan lumpur tinja, jadi disedot dimasukan ke IPLT, IPLT itu ada di Muara Fajar, cuman belum diserahkan terimakan ke Pemko karena masih dalam tahap perbaikan”. (Wawancara, 9 november 2020).

Jadi, berdasarkan data dar dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2019 dan melalui hasil wawancara bahwa untuk bangunan IPLT Muara Fajar saat ini ada akan tetapi masih belum operasional.

D. Sub Sistem Pembuangan Akhir

Untuk sistem pembuangan akhir tinja masih dilakukan dilingkungan (sungai, kebun/lahan sawit), hal ini dikarenakan IPLT yang telah dibangun oleh pusat masih belum diserahkan terimakan ke Pemda, sehingga IPLT yang telah dibangun oleh pusat belum bisa operasional. (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019).

5.2.3.4 Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan

Sarana dan prasarana air limbah domestik yang dimaksud dalam hal ini adalah satuan jumlah (unit), kondisi berfungsi/tidak berfungsi, dan pihak pengelola dari sarana dan prasarana air limbah domestik di Kecamatan Tampan. Agar lebih jelasnya, satuan jumlah (unit), kondisi berfungsi/tidak berfungsi, dan pihak pengelola dari sarana dan prasarana air limbah domestik di Kecamatan Tampan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 5.11 Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Pihak Pengelola
1	IPAL Komunal (Sanimas)	10 unit	Berfungsi	- Tuah Serumpun - Delima Sejahtera - Madani Bertuah - KSM / KPP Bening Jaya - KSM/ KPP Baitul Makmur
2	MCK Plus	3 Unit	Berfungsi	- KSM Baitul Makmur
3	Truk Tinja	-	-	- Swasta
4	IPLT	-	Belum Berfungsi	- Sampai saat ini IPLT Muara Fajar di Kecamatan Rumbai masih belum diserahkan terimakan ke Pemda, sehingga IPLT yang telah dibangun oleh pusat sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan

Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru 2019, Dinas Perkim Kota Pekanbaru 2020

5.2.4 Aspek Teknis Sistem Pengelolaan Sub Sektor Persampahan

Berdasarkan buku pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2018, sistem sanitasi pengelolaan sampah terdiri dari sampah tidak tertangani, sampah tertangani skala rumah tangga, sampah tertangani ke pemrosesan akhir, dan pengurangan sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi pewadahan/pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berikut akan di uraikan aspek teknis dalam pengelolaan sampah pada pembahasan berikut ini.

5.2.4.1 Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga

Sampah tertangani skala rumah tangga adalah sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat baik dalam skala individual maupun komunal dengan cara 3R, ditimbun, maupun dikompos. Sampah tertangani skala rumah tangga yang dimaksud dalam hal ini adalah sampah yang di hasilkan dari rumah tangga yang dikelola mandiri melalui penimbunan dan pengomposan. Di Kecamatan Tampan masyarakat yang menangani sampah rumah tangga dengan cara menimbun sampah atau pun melakukan pengomposan berjumlah 903 jiwa penduduk (Sumber : dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019).

5.2.4.2 Sampah tidak tertangani

Sampah tidak tertangani adalah sampah yang tidak ditangani maupun diangkut ke TPA. Contoh sampah yang tidak tertangani adalah sampah yang

dibakar, dibuang ke laut, dibuang ke lahan terbuka, dan dibuang ke sungai. Sampah yang tidak tertangani yang dimaksud dalam hal ini adalah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga yang tidak ditimbun ataupun tidak melakukan pengomposan dari masyarakat, sehingga sampah tersebut tidak ditangani untuk diangkut ke TPA akan tetapi di buang ke lingkungan sekitar dan di bakar begitu saja. Di Kecamatan Tampan, sampah yang tidak tertangan dalam skala rumah tangga berjumlah 105.827 jiwa penduduk. (Sumber : dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019).

5.2.4.3 Sistem Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi pewadahan/pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berikut uraian kegiatan penanganan sampah yang meliputi pewadahan/pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

A. Pemilahan/pewadahan

Salah satu pengelolaan sampah yang baik adalah memisahkan jenis-jenis sampah pada tempat sampah yang berbeda atau biasa disebut sebagai pemilahan sampah yang dilakukan di rumah masing-masing. Berdasarkan Permen PU No 3 tahun 2014, pemilahan saampah dapat dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya. Jika hal ini dilakukan maka akan memudahkan proses pengolahan selanjutnya karena petugas sampah tidak perlu lagi melakukan segregasi. Berikut

ini adalah jawaban responden mengenai kebiasaan melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.12 Kebiasaan melakukan pemilahan sampah di rumah responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju, setiap hari melakukan pemilahan sampah ke dalam wadah (tong sampah)	21	23 %
2	Cukup Setuju, sering/tidak setiap hari melakukan pemilahan sampah pada wadah	54	54 %
3	Tidak Setuju, tidak pernah melakukan pemilahan sampah ke dalam wadah	25	23 %
Total		100	100 %

Sumber : Hasil Survei, 2020

Berdasarkan Tabel 5.12 diatas, dapat di ketahui bahwa sebagian besar masyarakat menjawab cukup setuju atau sering, walaupun tidak setiap hari melakukan pemilahan sampah dengan menaruh sampahnya pada wadah/tong sampah yang telah disediakan dirumahnya masing-masing dengan frekuensi jawaban sebanyak 54 responden atau 54 %. Sedangkan untuk jawaban setuju dalam artian masyarakat setiap hari melakukan pemilahan sampah ke dalam wadah (tong sampah) yang telah disediakan dirumahnya masing-masing yaitu dengan frekuensi jawaban sebanyak 21 responden atau 21 % dan untuk jawaban tidak setuju dalam artian tidak pernah melakukan pemilahan sampah kedalam wadah (tong sampah) yang telah disediakan dirumahnya masing-masing yaitu sebanyak 25 responden atau 25 %.

Selanjutnya, sampah yang telah dipilah harus ditampung dalam sarana wadah. Wadah sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara disumber sampah. Sedangkan wadah sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. Wadah yang di maksud adalah kondisi wadah individual (tempat sampah/tong sampah) yang

memenuhi persyaratan teknis berdasarkan SNI No 19-2454-2002. Observasi dilakukan pada daerah yang memiliki tingkat sanitasi yang tidak baik, hal ini didasari dari peta area beresiko sanitasi yang terdapat di dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018. Berikut distribusi Kondisi tempat sampah rumah tangga di Kecamatan Tampan yang memenuhi persyaratan teknis berdasarkan SNI No 19-2454-2002 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Kondisi Tempat Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Tampan Yang Memenuhi Persyaratan Teknis

No	Kondisi Tempat Sampah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Memenuhi Kriteria		
	a) Kelurahan Tobek Godang	7	7 %
	b) Kelurahan Buah Karya	16	16 %
	c) Kelurahan Sialang Mungu	15	15 %
2	Memenuhi Kriteria		
	a) Kelurahan Tobek Godang	19	19 %
	b) Kelurahan Buah Karya	21	21 %
	c) Kelurahan Sialang Mungu	22	22 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber : Hasil Survei, 2020

Berdasarkan Tabel 5.13 dapat diketahui bahwa sebagian besar kondisi tempat sampah rumah tangga di kecamatan Tampan sudah memenuhi kriteria yakni dengan total 62 responden (KK) atau 62 % dengan 19 responden (KK) atau 19 % di kelurahan Tobek Godang, 21 responden (KK) atau 21 % di Kelurahan Buah Karya, dan 22 Responden (KK) atau 22 % di Kelurahan Sialang Mungu.

Selanjutnya, untuk pewadahan komunal atau biasa di sebut dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS), berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03 tahun 2013, Pemerintah Kabupaten / Kota wajib menyediakan fasilitas TPS pada kawasan permukiman. Namun berdasarkan data, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dinas DLHK Kota Pekanbaru belum

menyediakan fasilitas TPS di Kecamatan Tampan (Sumber DLHK, 2020). Berdasarkan data dari DLHK Kota Pekanbaru dan melalui hasil observasi di Kecamatan Tampan terdapat 15 titik lokasi TPS yang menyebar di kecamatan Tampan dengan di antaranya sebanyak 11 TPS yang statusnya tidak resmi / ilegal dan TPS yang resmi / legal hanya berjumlah 4 TPS yaitu TPS RS Awalbros, TPS RS Aulia, TPS RS Tipe C atau RSD Madani, dan TPS Toko Dunlop, untuk ke 4 tps resmi / legal tersebut masing-masing di miliki oleh pihak swasta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03 tahun 2013, Pewadahan Komunal/Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang dimaksud dalam hal ini harus memenuhi kriteria. Berikut penjelasannya.

- a) Luas TPS sampai dengan 200 m

Berdasarkan hasil observasi luas TPS RS Awalbros sampai dengan 170,5 m³, TPS RS Aulia sampai dengan 170,5 m³, TPS RS Tipe C atau RSD Madani sampai dengan 170,5 m³, dan TPS Toko Dunlop sampai dengan 170,5 m³.

- b) Jenis pembangunan TPS bukan wadah permanen

Jenis pembangunan TPS RS Awalbros merupakan wadah permanen, Jenis pembangunan TPS RS Aulia merupakan wadah permanen, Jenis pembangunan TPS RS Tipe C atau RSD Madani merupakan wadah permanen, dan TPS Toko Dunlop merupakan wadah permanen.

- c) Sampah tidak boleh berada di TPS lebihdari 24 jam

Pengangkutan sampah di lakukan setiap hari oleh pihak swasta yang memilki kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini PT Godang Tuah Jaya sebagai jasa angkutan sampah zona 1 dengan jam operasional yang sudah

terjadwal melalui rencana kerja atau rute operasional pengangkutan sampah kecamatan Tampan (Sumber DLHK Kota Pekanbaru,2020).

d) Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas

Berdasarkan hasil observasi melalui dokumentasi/foto Penempatan ke- 4 TPS Resmi yang ada di kecamatan Tampan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas, hal ini karena pengangkutan di lakukan setiap hari sesuai dengan rencana kerja atau rute operasional pengangkutan sampah kecamatan Tampan (Sumber DLHK Kota Pekanbaru, 2020). Berikut merupakan hasil observasi Penempatan TPS RS Awalbros, TPS RS Aulia, TPS RS Tipe C atau RSD Madani, dan TPS Toko Dunlop.

e) TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA

Berdasarkan hasil observasi melalui dokumentasi (foto), ke- 4 TPS Resmi yang ada di kecamatan Tampan ini setelah di lakukan pemindahan dari TPS ke kendaraan pengangkutan sampah milik PT Godang Buah Jaya sudah dalam keadaan bersih.

Berdasarkan hasil observasi dari ke- 4 TPS Resmi yang ada di kecamatan Tampan agar lebih jelasnya dapat di lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 5.14 Kondisi TPS Resmi / Legal Di Kecamatan Tampan Yang Memenuhi Kriteria Teknis

No	Kriteria Teknis	Kondisi Eksisting	Kesimpulan
1	Luas TPS sampai dengan 200 m ²	Berdasarkan hasil observasi luas TPS RS Awalbros sampai dengan 170,5 m ³ , TPS RS Aulia sampai dengan 170,5 m ³ , TPS RS Tipe C atau RSD Madani sampai dengan 170,5 m ³ , dan TPS Toko Dunlop sampai dengan 170,5 m ³	Berdasarkan kondisi eksisting pada ke-4 (empat) Pevadahan Komunal / TPS yang ada di Kecamatan Tampan
2	Jenis pembangunan TPS bukan wadah permanen	Jenis pembangunan TPS RS Awalbros merupakan wadah permanen, Jenis pembangunan TPS RS Aulia merupakan wadah permanen, Jenis pembangunan TPS RS Tipe C atau RSD Madani merupakan wadah permanen,	Bahwa ke-4 Pevadahan
3	Sampah tidak	Pengangkutan sampah di lakukan setiap hari	

No	Kriteria Teknis	Kondisi Eksisting	Kesimpulan
	boleh berada di TPS lebih dari 24 jam	oleh pihak swasta yang memiliki kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini PT Godang Buah Jaya sebagai jasa angkutan sampah zona 1 dengan jam operasional yang sudah terjadwal melalui rencana kerja atau rute operasional pengangkutan sampah kecamatan Tampan (Sumber DLHK Kota Pekanbaru,2020).	Komunal/TPS tersebut tidak memenuhi Kriteria Teknis berdasarkan Permen PU No 3 tahun 2013.
4	Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas	Berdasarkan hasil observasi melalui dokumentasi/foto Penempatan ke- 4 TPS Resmi yang ada di kecamatan Tampan tidakmenggangguestetikadanlalulintas, hal ini karena pengangkutan di lakukan setiap hari sesuai dengan rencana kerja atau rute operasional pengangkutan sampah kecamatan Tampan (Sumber DLHK Kota Pekanbaru, 2020).	
5	TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah di angkut ke TPA	Berdasarkan hasil observasi melalui dokumentasi (foto), ke-4 TPS Resmi yang ada di kecamatan Tampan ini setelah di lakukan pemindahan dari TPS ke kendaraan pengangkutan sampah milik PT Godang Buah Jaya sudah dalam keadaan bersih	

Sumber : Hasil Survei, DLHK Kota Pekanbaru, 2020

Sedangkan, untuk Kondisi fisik bangunan masing-masing Pevadahan Komunal /Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada ke-4 (empat) TPS Resmi yang ada di kecamatan Tampan ini di dasarkan pada 3 kondisi kriteria yaitu Bangunan baik dan beroperasi, Bangunan rusak tapi beroperasi, dan Bangunan baik atau rusak, tapi tidak beroperasi. Berdasarkan hasil observasi ke-4 (empat) TPS Resmi yang ada di kecamatan Tampan yaitu TPS RS Awalbros, TPS RS Aulia, TPS RS Tipe C atau RSD Madani, dan TPS Toko Dunlop masih dalam keadaan bangunan yang baik dan beroperasi, hal ini karena ke-4 (empat) bangunan TPS Resmi di Kecamatan Tampan ini sudah permanen dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh pihak swasta yang memiliki kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini PT Godang Buah Jaya sebagai jasa angkutan sampah zona 1 dengan jam operasional yang sudah

terjadwal melalui rencana kerja/rute operasional pengangkutan sampah kecamatan Tampan (Sumber DLHK Kota Pekanbaru, 2020)

Selanjutnya, untuk timbulan sampah yang dihasilkan di Kecamatan Tampan mencapai 121,54 ton/hari dan merupakan timbulan sampah terbesar diantara kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru (DLHK Kota Pekanbaru, 2019). Timbulan sampah yang cukup besar di kecamatan ini disebabkan karena daerah kecamatan Tampan merupakan daerah pengembangan perumahan dan kawasan perekonomian yang sangat aktif. Terdapat beberapa sentra ekonomi masyarakat baik pasar tradisional, pusat pertokoan, kawasan pergudangan, kawasan pendidikan tinggi, pusat kegiatan olah raga dan beberapa perkantoran yang bersanding dengan kawasan perumahan.

B. Pengumpulan

Menurut Pramono (dalam Suparmi A.Asplan 2009), proses pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan sistem *door to door*, *pick up the container* atau partisipasi masyarakat. Berikut jawaban responden mengenai proses pengumpulan sampah yang dilakukan di Kecamatan Tampan.

Tabel 5.15 Sistem Pengumpulan sampah di Kecamatan

No	Sistem Pengumpulan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Door to door	13	13 %
2	Pick up the container	87	87 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber : Hasil Survei,2020

Berdasarkan Tabel 5.15 diatas, sistem Pick up the container atau partisipasi masyarakat lebih mendominasi di Kecamatan Tampan yaitu sebanyak 87 responden atau 87 %. Wawancara juga di lakukan untuk mendukung data primer mengenai proses pengumpulan sampah di Kecamatan Tampan, berdasarkan hasil wawancara dengan pak Novan selaku Kasi penanganan dan

pemrosesan akhir sampah bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, pak nanda juga menambahkan mengenai sistem pengumpulan sampah dari lingkungan pemukiman di Kecamatan Tampan, yang mana sampah di jemput oleh petugas dalam hal ini PT Godang Tua Jaya sebagai jasa angkutan sampah zona 1 (satu). Berikut pernyataan pak Novan.

Oke, untuk sampah permukiman pengelolaannya sampah ambil dibuang, maksudnya kita ambil sampahnya kita jemput, lalu kita buang, buang dalam artian kita buang ke TPA muara fajar langsung, itu dari permukimannya, bukan dari tempat TPS nya ya, karena kita udah jemput lalu mereka sudah bayar retribusi. (wawancara, 11 November 2020).

Jadi berdasarkan hasil survei dan hasil wawancara, proses pengumpulan sampah di Kecamatan Tampan menggunakan pick up the container atau partisipasi masyarakat yang mana pengumpulan sampah dilakukan dengan mengambil sampah yang berada ditempat sampah depan rumah masing-masing.

C. Pengangkutan

Kegiatan pengangkutan sampah merupakan kegiatan operasional yang dimulai dari titik-titik pengumpulan sampah/TPS/Transfer Depo sampai ke TPA. Sistem pengangkutan sampah di kota Pekanbaru didasarkan pada sistem zona. Untuk sarana pengangkutan sampah di kota Pekanbaru terbagi menjadi 3 (tiga) Zona wilayah dengan kerja sama pihak ke tiga (3) yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah dalam operasional pengangkutan sampah. Di Kecamatan Tampan, kegiatan operasional pengangkutan sampah dikelola oleh PT Godang Tua Jaya yang merupakan pihak ke 3 yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoperasionalkan kegiatan pengangkutan sampah di

Kecamatan Tampan hal ini didasarkan pada nomor kontrak 02/KONTRAK-JAPI/LELANG/DLHK/APBD/2018.

Berasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013 untuk menunjang kelancaran dalam dalam pengangkutan sampah diperlukan sarana pengangkutan sampah seperti dump truck/tipper truck, armroll truck, compactor truck, street sweeper vehicle dan trailer. Berikut merupakan jenis dan kapasitas sarana pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan yang dioperasikan oleh PT Godang Tua Jaya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Jenis Dan Kapasitas Sarana Pengangkutan Sampah di Kecamatan Tampan

No	Jenis sarana Pengangkutan	Tipe sarana Pengangkutan	Kapasitas	Jumlah sarana	Keterangan
1	Dump Truck (Kecil)	Colt Diesel FE74 S (4x2) M/T 125 PS	8 m ³	15 unit	Baik dan beroperasi
2	Pick Up	Isuzu Phr 54 C Bb	6 m ³	3 unit	Baik dan beroperasi
3	Becak Motor	VR1503RL	2 m ³	3 unit	Baik dan beroperasi
4	ARM ROLL	HINO FG 8JJKB - GGJ (FG235 J)	8 m ³	7 unit	Baik dan beroperasi
5	TRONTON (Besar)	HINO FM 8JMKD - MGZ (M 260 JD)	8 m ³	3 unit	Baik dan beroperasi

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel 5.16 diatas, untuk operasional pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan terdapat 5 jenis sarana pengangkutan yaitu Tronton (Dump Truk Besar), Dump Truck (Dump Truk Kecil, ARM ROLL, Pick Up, dan becak motor. Alat transportasi yang biasa di lakukan untuk mengangkut sampah menuju TPA muara fajar adalah ARM ROLL dan TRONTON (Dump Truk Besar), dimana kendaraan pengangkut sampah ini beroperasi setiap hari untuk mengambil sampah disetiap TPS/Transfer Depo untuk langsung dibawa menuju TPA Muara Fajar.

Selanjutnya untuk frekuensi di Kecamatan Tampan, jumlah frekuensi/ritasi yang dilakukan dalam kegiatan operasional pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis dan kapasitas sarana pengangkutan yang digunakan dalam operasional pengangkutan sampah. Ritasi pengangkutan sampah adalah satu rangkaian perjalanan dari suatu kendaraan angkutan sampah untuk melakukan pengangkutan sampah yakni dihitung per satu kali muat dan bongkar atau satu kali transaksi sesuai dengan kapasitas dari jenis kendaraan sampah tersebut Berikut tabel frekuensi / ritasi pengangkutan di Kecamatan Tampan.

Tabel 5.17 Frekuensi Ritasi Pengangkutan di Kecamatan Tampan

No	Jenis sarana	Jam Operasional	Jumlah Unit	Kapasitas	Jumlah Ritasi	Lokasi Rute
1	Kendaraan Truk(Dump Truk -R6)	Subuh 05:00 s/d 08:00	8 unit	8 m ³	8 Rit	- Jl. Soebrantas - Jl. Nangka Ujung - Jl. Garuda Sakti
		Siang -Sore 14:00 s/d 18:00			16 Rit	- Jl. Soebrantas
		Sore - siang 16.00 s/d 12.00	1 Unit		1 Rit	- Pasar Salasa, Kampus UIN
		Malam 21.00 s/d 24.00			1 Rit	- Jl Subrantas kiri kanan
2	Kendaraan Pick Up	Pagi - sore 08:00 s/d 17:00	3 unit	6 m ³	9 Rit	- Purwodadi - Kualu - Kantor Kec. Tampan - Jl. Delima - Perumahan - Perumahan dan Jalan Protokol
		Sore-siang 16.00 s/d 12.00	4 unit			4 Rit

						Green , Sidomulyo , SMP 21, Simpang SKA
3	Becak Motor	Pagi-sore 10.00 s/d 17.00	3 unit	2 m ³	2 Rit	- Jalan Protokol - Perumahan
4	Arm Roll	Pagi - Siang 07.00 s/d 12.00	5 unit	8 m ³	8 Rit	- Transfer depo-TPA
		Siang -malam 14.00 s/d 24.00			12 Rit	
5	Tronton	Subuh -Malam 05.00 s/d 23.00	3 Unit		6 Rit	- Transfer depo-TPA

Sumber :PT Godang Buah Jaya, 2020

Berdasarkan tabel 5.17 diatas, ritasi pengangkutan di Kecamatan Tampan, rata-rata ritasi pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan secara keseluruhan mencapai 66 ritasi pengangkutan dalam sehari dengan 3 kali shif yakni pagi, siang, dan malam menggunakan jenis sarana pengangkutan sampah meliputi Kendaraan Truk (Dump Truk - R6), Kendaraan Pick Up, Becak Motor, Arm Roll, dan Tronton. Sedangkan untuk ritasi pengangkutan yang paling banyak dilakukan pada jenis sarana Kendaraan Truk (Dump Truk - R6) dengan kapasitas 8 m³ yang dikerahkan sebanyak 8 unit Truk (Dump Truk - R6).

Selanjutnya, untuk pola pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan dapat dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampah. Di Kecamatan Tampan berdasarkan sistem pengumpulannya dilakukan dengan pick up the container/partisipasi masyarakat, sistem pengumpulan sampah ini dengan mengambil sampah yang berada di tempat sampah depan rumah yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini pihak PT. Godang Buah Jaya. Berdasarkan Permen PU No 3 tahun 2013 Jika pengumpulan dan pengangkutan sampah menggunakan sistem pemindahan (TPS/TPS 3R) atau sistem tidak langsung, proses pengangkutannya dapat menggunakan sistem container angkat (Hauled Container System = HCS) ataupun sistem container tetap (Stationary Container System =

SCS). Untuk sistem kontainer tetap dapat dilakukan secara mekanis maupun manual. Sistem mekanis menggunakan compactor truck dan kontainer yang kompetibel dengan jenis truknya. Sedangkan sistem manual menggunakan tenaga kerja dan kontainer dapat berupa bak sampah atau jenis penampungan lainnya. Jadi, untuk pola pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan proses pengangkutannya menggunakan sistem sistem kontainer tetap (Stationary Container System = SCS) dengan cara manual, hal ini karena dilihat dari pola pengumpulan sampahnya yang dilakukan dengan pick up the container atau partisipasi masyarakat, ditambah lagi untuk sistem sistem kontainer tetap (Stationary Container System = SCS) dengan cara manual ini menggunakan tenaga kerja untuk mengambil sampah dan kontainer dapat berupa bak sampah atau jenis penampungan lainnya.

Di Kecamatan Tampan, pengangkutan sampah di operasionalkan oleh pihak ke-3 yakni PT Godang Tua Jaya yang berkerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka kegiatan pengelolaan sampah. Menurut Permen PU No 3 tahun 2013 menyebutkan bahwa pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah bagi masyarakat di wilayah pelayanan telah tersedia dengan biaya (retribusi) yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini, layanan pengangkutan sampah dilingkungan permukiman masyarakat di Kecamatan Tampah sudah tersedia dan apabila ingin menggunakan layanan terbut akan dikenakan biaya retribusi yang terjangkau. Berdasarkan hal tersebut, hasil kuesioner dengan masyarakat tentang tingkat masyarakat yang setuju telah menggunakan pelayanan pengangkutan sampah yang telah di sediakan di Kecamatan Tampan dengan

dikenakan biaya (retribusi), berikut jawaban responden yang di uraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.18 Frekuensi Tingkat Masyarakat Menggunakan Layanan Pengangkut Sampah Di Kecamatan Tampan

No	Kriteria	Frekuensi (Orang)	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	13	13 %
2	Setuju (S)	59	59 %
3	Cukup Setuju (CS)	28	28 %
4	Tidak Setuju (TS)	0	0 %
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0 %
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil Survei, 2020

Berdasarkan Tabel 5.18 diatas, bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Tampan setuju telah menggunakan layanan pengangkut sampah di Kecamatan Tampan sebanyak 59 responden (KK) atau 59 % dengan biaya retribusi yang terjangkau, hal ini karena layanan pengangkut sampah di kecamatan Tampan dilakukan 3-5 kali dalam seminggu dan akan di kenakan biaya retribusi bagi masyarakat yang menggunakan layanan pengangkut sampah di kecamatan Tampan.

D. Pengolahan sampah Komunal/TPS 3R

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03 tahun 2013, pemerintah Kabupaten / Kota wajib menyediakan fasilitas berupa TPS 3R pada kawasan permukiman. Berdasarkan data yang di peroleh, di kecamatan Tampan hanya terdapat satu (1) unit Pengolahan sampah Komunal dengan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle)/ TPS 3R yang berlokasi di jalan Damai Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan. TPS 3R ini diberi nama unit pengolahan TPS 3 R KSM Mandiri Bersama yang didirikan dari tahun 2015 dan hingga sekarang masih berfungsi. TPS 3 R KSM Mandiri Bersama berdasarkan SK/BH nomor 02/BAST-TPS3R/DLHK/1/2017 dikelola oleh

lembaga lokal di Kecamatan Tampan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Bersama yang mana ketuanya saat ini yaitu bapak Tri Joko Waluyo, TPS 3 R KSM Mandiri Bersama memiliki jumlah nasabah mencapai 2800 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03 tahun 2013, TPS 3R yang di maksud dalam hal ini adalah TPS 3R yang harus memenuhi kriteria teknis. Berikut hasil observasi yang di lakukan di TPS 3R KSM Mandiri Bersama kecamatan Tampan yang memenuhi kriteria teknis berdasarkan Permen PU dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.19 Kondisi TPS 3R KSM Mandiri Bersama Di Kecamatan Tampan Yang Memenuhi Kriteria Teknis

No	Kriteria Teknis	Kondisi Eksisting	Kesimpulan
1	Luas TPS sampai dengan 200 m ²	Berdasarkan data yang di peroleh untuk luas tempat pengolahan sampah Komunal di TPS 3R KSM Mandiri Bersama Di Kecamatan Tampan luas lahannya mencapai 300 M ² (DLHK Kota Pekanbaru, 2020).	Berdasarkan kondisi eksisting Bahwa Pevadahan Komunal di TPS 3R KSM Mandiri Bersama Di Kecamatan Tampan sudah memenuhi kriteria Teknis berdasarkan Permen PU No 3 tahun 2013.
2	Jenis pembangunan penampung residu/ bukan wadah permanen	Untuk jenis pembangunan pada pengolahan sampah komunal di TPS 3R KSM Mandiri Bersama bangunannya sudah beton	
3	Penempatan lokasi TPS 3R dengan daerah pelayanan kurang dari 1 km	Berdasarkan hasil observasi TPS 3RKSM Mandiri Bersama di Kecamatan dekat dengan daerah pelayanan dan masih dalam radius tidak lebih dari 1 km.	
4	TPS 3R dilengkapi ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas	Berdasarkan hasil observasi TPS 3RKSM Mandiri Bersama di Kecamatan Tampansudah dilengkapi ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.	
5	Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah	Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sudah ada. Berdasarkan data jumlah nasabah pada TPS 3R KSM Mandiri Bersama mencapai 2800 orang (DLHK Kota Pekanbaru, 2020). Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terlayani mencapai 165 KK (plpbm.pu.go.id).	

Sumber : Hasil Observasi, DLHK Kota Pekanbaru, 2020

Untuk jumlah sampah yang di kelola di TPS 3R mencapai 58,8 ton/bulan dan luasnya mencapai 300 m² (DLHK Kota Pekanbaru, 2019) dengan kapasitas 600 kg dalam sekali pengangkutan. Berdasarkan wawancara bersama bapak Tri Joko Waluyo yang merupakan ketua pengurus tempat pengolahan sampah Komunal (TPS 3R), dalam sehari sampah yang di bawa ke TPS 3R itu kira-kira mencapai 1,2 ton yang diangkut sebanyak 2 kali pengangkutan menggunakan motor gerobak Jenis KTM roda tiga(3). Berikut pernyataan bapak Tri Joko Waluyo.

“kapasitasnya sekitar 600 kg dalam satu pengangkutan, tapi kalau kita ngutip langsung dari lapangan tidak sampai dari 600 kg, 600 kg itu udah saya kumpukan disini, lebih muat sekaligus nanti baru sekitar itu lah, karena sampahnya ringan. Sampah itu dibawa 2 trip 2 kali ngulang dalam satu hari, pagi tadi sampai jam 11 satu trip, setelah itu jam setengah 2 tadi baru aja nyampe. Pemerintah menyediakan fasilitas ini saja dengan motor itu, kalau untuk jenis alat angkutnya jenis nya KTM roda tiga”. (Wawancara, 11 Desember 2020).

Berdasarkan observasi dan wawancara bersama Bapak Tri Joko Waluyo, untuk TPS 3R yang di kelola oleh Bapak Tri Joko Waluyo saat ini memiliki ruang pemilah yang digunakan untuk memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya, lalu sampah tersebut di masukan kedalam ruang penyangga sesuai dengan jenis sampah dan warna pada ruangan tersebut, serta terdapat gudang yang digunakan sebagai penyimpanan sampah yang masih bisa dimanfaatkan serta masih bernilai ekonomis. TPS 3R Mandiri Bersama juga dilengkapi dengan 1 mesin pencacah kompos dan jenis mesin pencacah plastik yang masih dalam kondisi baik dan berfungsi serta memiliki 1 unit becak motor roda tiga. Namun untuk kegiatan pengolahan sampah di TPS 3R jarang dilakukan walaupun mesin pencacah/penggiling nya masih berfungsi dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kerja yang mengoperasikan alat tersebut. Selanjutnya, untuk

kondisi Bangunan dan operasional pada tempat pengolahan sampah (TPST 3 R) KSM Mandiri di kelurahan Sialang Mungu masih dalam keadaan baik dan masih beroperasi hingga saat ini. Berikut hasil observasi dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.6 kondisi Bangunan TPST 3R KSM Mandiri



Sumber : Hasil Survei, 2020

E. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pemrosesan akhir sampah merupakan kegiatan tahap akhir dari sistem pengelolaan sampah dimana sampah diamankan disuatu tempat (TPA) agar dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Lokasi TPA sampah Kota Pekanbaru terletak di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Pesisir yang berjarak lebih kurang 18,5 km dari pusat Kota Pekanbaru dan kurang lebih 1,2 km dari Kelurahan Muara Fajar serta sekitar 300 m dari rumah penduduk (RT.I/RW.III). Lokasi ini mempunyai luas keseluruhan 8,6 Ha dan sebagian besar telah dijadikan tempat buangan sampah. TPA Muara fajar mempunyai 1 (satu) unit timbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar. Sesuai dengan surat dari Walikota Pekanbaru kepada

Gubernur Riau No: 027/DKP/627/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014. Dalam surat permohonan tersebut menyatakan bahwa TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai merupakan satu-satunya lokasi TPA yang ada di Kota Pekanbaru sejak tahun 1985 dengan luas 8,6 Ha. Untuk Kondisi Bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baik dan masih beroperasi Saat ini kondisi lahan sudah 80% digunakan dan harus segera diantisipasi dengan alternatif penggantinya.

5.2.4.4 Sarana dan Prasarana Persampahan di Kecamatan Tampan

Sarana dan Prasarana Persampahan yang dimaksud dalam hal ini adalah satuan jumlah (unit), kondisi berfungsi/tidak berfungsi, dan pihak pengelola dari sarana dan prasarana Persampahan di Kecamatan Tampan. Agar lebih jelasnya, dapat di lihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 5.20 Sarana dan Prasarana Persampahan di Kecamatan Tampan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi	Pihak Pengelola
1	Becak Motor	3 Unit	Berfungsi	- PT. Godang Buah Jaya
2	Kendaraan Pick Up	7 Unit	Berfungsi	- PT. Godang Buah Jaya
3	Kendaraan Truk Kecil(Dump Truk-R6)	9 Unit	Berfungsi	- PT. Godang Buah Jaya
4	TRONTON (DT Besar)	3 Unit	Berfungsi	- PT. Godang Buah Jaya
5	Arm Roll	5 Unit	Berfungsi	- PT. Godang Buah Jaya
6	TPS Ilegal / tidak Resmi	11 Unit	Berfungsi	- Tidak ada status pihak kepemilikan
7	TPS Legal / Resmi	4 Unit	Berfungsi	- 1 TPS Resmi Milik TPS RS. Awalbros (Swasta) - 1 TPS Resmi Milik TPS RS. Aulia (Swasta) - 1 TPS Resmi Milik RS Tipe C atau RSD Madani (Swasta) - 1 TPS Resmi Milik Toko Dunlop (Swasta)
8	TPS 3 R	1 Unit	Berfungsi	- KSM / KPP KSM Mandiri
9	Bank Sampah	2 Unit	Berfungsi	- PT Pengadaian (Persero) - DLHK kota Pekanbaru

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru,2020

5.2.5 Aspek Pembiayaan Sub Sektor Air Limbah Domestik Dan Sub Sektor Persampahan

Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga pengelola dan dapat menunjang keberhasilan suatu program dalam pengelolaan sanitasi lingkungan dibutuhkan adanya ketersediaan anggaran yang memadai dalam proses pelaksanaannya. Ketersediaan atau dukungan pendanaan tersebut di dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai untuk Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk pemerintah daerah, dapat pula melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sanitasi lingkungan serta dari pihak swasta ataupun Corporate Social Responsibility (CSR).

Pelaksanaan kegiatan dan program tertuang didalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru implementasi tahun 2014-2018 telah selesai, namun, peneliti hanya dapat menguraikan realisasi anggaran sanitasi dari tahun 2014-2017 karena keterbatasan yang diperoleh. Berdasarkan data dari Bappeda kota Pekanbaru dan dari Dinas Perkim kota Pekanbaru tahun 2021, untuk realiasi anggaran sanitasi tahun implementasi 2014-2017 berdasarkan alokasi dana dari APBD untuk Sanitasi sebesar Rp. 392.854.943.068 (*Tiga Ratus Sembilan Pulah Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Perak Rupiah*).

Di Kecamatan Tampan untuk pembangunan sanitasi lingkungan pada sektor air limbah domestik yakni berupa pembangunan IPAL Komunal / MCK Plus. Ada terdapat 13 Pembangunan IPAL Komunal / MCK plus yang telah di bangun di Kecamatan Tampan, dilaksanakan dari tahun 2014-2018 yang

pembiayaannya mencapai Rp. 5.718.750.000 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), untuk pembiayaan pembangunan IPAL Komunal / MCK tersebut dananya bersumber dari dana APBD Kota Pekanbaru, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dari pihak swasta/CSR yakni Islamic Development Bank (IsDB).

Sedangkan untuk pembangunan sanitasi lingkungan pada sektor persampahan di kecamatan Tampan yaitu berupa pewadahan komunal (TPS, TPS 3 R, Bank Sampah) dan sarana pengangkut sampah (truk sampah). Di Kecamatan Tampan, untuk pewadahan komunal terdapat 15 TPS yang tersebar diantaranya 11 TPS illegal/tidak resmi dan 4 TPS legal/resmi. Untuk 11 TPS illegal/tidak resmi status kepemilikannya belum terdata di DLHK Kota Pekanbaru, sedangkan 4 tps legal/resmi masing-masing dimiliki oleh pihak swasta dalam hal ini TPS milik RS Awalbros, TPS milik RS Aulia, TPS milik RS Tipe C atau RSD Madani, dan TPS milik Toko Dunlop. Hingga saat ini, Pemerintah kota Pekanbaru belum menyediakan fasilitas TPS Resmi yang di bangun di kecamatan Tampan (DLHK Kota Pekanbaru,2021). Artinya, untuk pembiayaan pembangunan TPS resmi milik pemerintah kota pekanbaru yang ada di Kecamatan Tampan belum tersedia. Selanjutnya, berdasarkan data dari DLHK Pekanbaru 2020, di kecamatan Tampan hanya terdapat 1 unit TPS 3R yang berlokasi dijalan Damai Kelurahan Sialang Munggu, dan 2 unit Bank Sampah yaitu bank sampah mutiara yang di kelola oleh PT Pengadaian (Persero) berlokasi di RW 07 Kelurahan Tuah Karya dan Bank Sampah Bukit Hijau Berlian yang di bangun dan berada di bawah naungan DLHK kota Pekanbaru. Untuk TPS 3R yang berlokasi dijalan Damai Kelurahan Sialang Munggu di beri nama unit pengolahan TPS 3 R KSM Mandiri Bersama yang di

dirikan pada tahun 2015 melalui sumber dana APBN sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai saat ini TPS 3R KSM Mandiri Bersama masih beroperasi.

Kemudian untuk pembiayaan sarana pengangkutan yang ada di Kecamatan Tampan baik dari biaya operasional dan pemeliharaan di kelola oleh pihak swasta dalam hal ini PT. Godang Tuah Jaya hal ini di dasarkan pada nomor kontrak 02/KONTRAK-JAP1/LELANG/DLHK/APBD/2018 untuk jasa pengangkutan sampah di kecamatan Tampan yang merupakan wilayah zona 1 dioperasikan oleh pihak ke-3 (tiga) / pihak swasta yaitu PT. Godang Tuah Jaya.

5.2.6 Evaluasi Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan berdasarkan aspek-aspek sanitasi yang meliputi aspek kelembagaan dan peraturan daerah, aspek peran serta stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan, dan aspek pembiayaan. Penilaian aspek-aspek sanitasi tersebut dilakukan dengan cara memilih jawaban sesuai dengan kondisi eksisting dimana masing-masing pertanyaan sudah memiliki bobot penilaian dan masing-masing jawaban mempunyai bobot nilai tersendiri. Setiap pertanyaan akan dihitung skornya dengan cara melakukan perkalian antara kolom bobot dan nilai yang kemudian hasilnya akan di jumlahkan. Skor dikategorikan menjadi tiga (3) yaitu baik dengan skor nilai antara 351–500, Cukup dengan skor nilai antara 180–350, Kurang dengan skor nilai kurang dari 180. Berikut hasil tabel Tabel 5.21 Penilaian Kondisi Eksisting sanitasi pada sektor air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan Berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 dan Tabel 5.22 penilaian kondisi eksisting sanitasi pada Persampahan Domestik di Kecamatan Tampan Berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018.

**Tabel 5.21 Penilaian Kondisi Eksisting sanitasi pada Sub sektor air Limbah Domestik di Kecamatan Tampan Berdasarkan aspek-
aspek sanitasi pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018**

No	Aspek	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai	Kondisi Eksisting	Penilaian (Skor)	
A	Aspek Kelembagaan dan Peraturan	1. Regulasi pengelolaan air limbah domestik khususnya yang mengatur tangki septik dan pengurasannya	10		Berdasarkan dokumen SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 Untuk regulasi / Perda terkait air limbah domestik belum tersedia. Pada tahun 2018, pemko memfasilitasi untuk penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik dan tahun 2019 telah tersedia Perda Air Limbah Domestik. Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber mengenai regulasi pengelolaan air limbah domestik termasuk untuk yang mengatur tangki septik dan pengurasannya, hingga saat ini regulasi tersebut masih dalam bentuk rapenda atau masih dalam tahap proses penyusunan. Peraturan terkait air limbah masih mengacu kepada peaturan/undang-undang yang ada di pusat. (Wawancara, 19 november 2020).	10	
		a) Sudah lengkap, berupa Peraturan Daerah atau peraturan walikota					5
		b) Sudah namun hanya mengatur retribusi saja, Peraturan Daerah atau peraturan Walikota					3
		c) Belum ada atau sedang dalam penyusunan (rancangan)					1
Aspek Kelembagaan dan Peraturan	Aspek Kelembagaan dan Peraturan	2. Bentuk Kelembagaan pengelolaan IPALD Komunal	8		Bentuk kelembagaan IPALD Komunal di Kecamatan Tampan yaitu terpisah dari regulatornya (minimal UPT) karena yang mengelola IPALD Komunal di Kecamatan Tampan ialah lembaga lokal yang terdapat di Kecamatan Tampan dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) di Kecamatan Tampan. (Wawancara, 19 november 2020). Adapun lembaga lokal di Kecamatan Tampan yaitu LKM Delima Sejahtera, LKM Tuah Serumpun, LKM Madani Bertuah, KSM/KPP Bening Jaya, dan KSM/KPP Baitul Makmur. (Dinas Perkim Kota Pekanbaru,2020).	40	
		a) Terpisah dari regulatornya (minimal UPT).					5
		b) Masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas terkait)					3
		c) Belum diatur dalam tupoksi Dinas terkait					1
Aspek Kelembagaan dan	Aspek Kelembagaan dan	3. Bentuk Kelembagaan pengelolaan IPLT	8		Untuk bentuk Kelembagaan pengelolaan IPLT belum diatur	8	
		a) Terpisah dari regulatornya					5

No	Aspek	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai	Kondisi Eksisting	Penilaian (Skor)
	Peraturan	(minimal UPT). b) Masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas terkait) c) Belum diatur dalam tupoksi Dinas terkait		3 1	dalam tupoksi dinas terkait. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pekanbaru masih sedang menyusun Ranperda Air Limbah Domestik dan belum final, sehingga peraturan terkait air limbah masih mengacu kepada peraturan/undang-undang yang ada dipusat. Selain itu, IPLT belum dapat dioperasikan karena belum adanya serah terima dari pusat ke Pemko Kota Pekanbaru dan belum adanya kelembagaan (UPTD) yang khusus menangani pengelolaan air limbah. (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2019, hasil wawancara tahun 2020, Bappeda Kota Pekanbaru tahun 2020).	
B	Aspek peran Serta Stake Holders	4. Bentuk Peran serta investor atau pihak swasta a) Sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana b) Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan atau program sektor air limbah domestik c) Sebagai akseslerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat		5 3 6 1	Untuk peran serta swasta dalam pengelolaan air limbah domestik belum tersedia (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019). Akan tetapi, adanya bantuan dalam bentuk dukungan dana dalam pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Tampan yang diberikan oleh salah satu lembaga swasta dari luar negeri yaitu Islamic Development Bank (IsDB) (Sumber : Perkim Kota pekanbaru, 2020). Selain itu, operasional dalam hal melakukan penyedotan atau pengurasan tangki septik tank dalam skala rumah tangga pihak swasta menyediakan layanan truk tinja untuk melakukan penyedotan atau pengurasan tangki septik tank, Sebesar 59 % masyarakat yang telah melakukan pengurasan tinja menggunakan layanan sedot tinja swasta, dimana tinjanya masih dibuang ke kebun/sungai. (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019).	30
	Aspek peran Serta	5. Bentuk Peran serta masyarakat atau LSM a) Sebagai fasilitator dalam bentuk	6	5	Untuk peran serta masyarakat / LSM dalam pengelolaan air limbah domestik sudah ada melalui program-program	18

No	Aspek	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai	Kondisi Eksisting	Penilaian (Skor)	
	Stake Holders	dukungan dana		3	pemberdayaan dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah. (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019). Di Kecamatan Tampan juga terdapat Lembaga lokal untuk mengelola IPAL Komunal, adapun lembaga lokal di kecamatan Tampan yaitu LKM Delima Sejahtera, LKM Tuah Serumpun, LKM Madani Bertuah, KSM / KPP Bening Jaya, KSM / KPP Baitul Makmur. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber mengatakan bahwa untuk IPAL Komunal KSM yang merencanakan, mengerjakan, dan mengawas. Setelah Ipal Komunal di bangun, diserahkan terimakan ke Dinas Perkim, lalu dari Dinas Perkim menyerahkan ke KPP agar di kelola. (Wawancara, 19 november 2020). Jadi kesimpulannya untuk bentuk Peran serta masyarakat atau LSM di Kecamatan Tampan yaitu Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan atau program sektor air limbah domestik.		
		b) Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan atau program sektor air limbah domestik					
		c) Sebagai akseslerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat					1
Aspek peran Serta Stake Holders		6. Kegiatan kampanye sanitasi mengenai air limbah (khususnya) Sosialisasi Stop BABs, Sosialisasi bentuk tangki septik yang sesuai SNI, Sosialisasi PHBS, Pemasaran jamban sehat, Sosialisasi pemeliharaan jamban sehat (bangunan atas dan bawah), Sosialisasi penyedotan tangki septik	8		Ada 2-3 jenis Kegiatan yang sudah terjadwal dan terlaksana yaitu Kegiatan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Penyuluhan tentang jamban sehat serta tangki septic yang aman terhadap lingkungan di lakukan pada tahun 2014-2018 oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang mana tujuan dari kegiatan ini ialah meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari- hari. Kegiatan Penyuluhan tata cara Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah Dasar di lakukan pada tahun 2014-2018 oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan tujuan Siswa Sekolah Dasar mampu dan mau melakukan CTPS yang baik dan benar. Pemerintah kota Pekanbaru juga melakukan Promosi / Kampanye / Edukasi Higiene dan penyuluhan menciptakan	24	
		a) Ada, lebih dari 3 jenis kegiatan, sudah terjadwal terlaksana					5
		b) Ada, 2-3 jenis kegiatan, sudah terjadwal dan terlaksana					3
		c) Belum ada atau ada, namun masih bersifat insidental					1

No	Aspek	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai	Kondisi Eksisting	Penilaian (Skor)
					lingkungan yang sehat pada tahun 2019 (Bappeda Kota Pekanbaru,2020).	
C	Aspek Teknis sistem pengelolaan	7. Kondisi bangunan pengolahan setempat skala komunal (IPALD Komunal)	6	5	Berdasarkan observasi di Kecamatan Tampan dan Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru tahun 2020 bahwa ada 11 bangunan IPAL Komunal yang tersebar di Kecamatan Tampan yaitu pada Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Delima, Kelurahan Tuah Madani, kelurahan Sidomulyo Barat, dan Kelurahan Simpang Baru. Untuk Kondisi bangunan pengolahan setempat skala komunal (IPALD Komunal) di Kecamatan Tampan dalam keadaan baik dan masih beroperasi.	30
		a) Bangunan baik, beroperasi		3		
		b) Bangunan rusak, beroperasi		1		
Aspek Teknis sistem pengelolaan	Aspek Teknis sistem pengelolaan	8. Jumlah truk penyedot tinja yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional baik	6	5	Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki truk penyedot tinja, masih dioperasikan oleh pihak swasta, hingga tahun 2019 sarana dalam pengelolaan air limbah domestik (truk tinja) belum di serah terimakan ke pemerintah daerah kota Pekanbaru (<i>Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019, (Wawancara, 19 november 2020).</i>)	6
		a) Lebih dari 1 (satu) unit		3		
		b) 1 (satu) unit		1		
Aspek Teknis sistem pengelolaan	Aspek Teknis sistem pengelolaan	9. Frekuensi penyedotan tangki septik individual	6	5	Berdasarkan hasil kuesioner mengenai Frekuensi penyedotan tangki septik individual pada masyarakat di Kecamatan Tampan, dari 100 sampel (KK) yang di sebar secara acak di Kecamatan Tampan, sebanyak 57 % atau 60 responden (KK) menjawab frekuensi penyedotan tangki septik individual di lakukan lebih dari > 3 tahun sekali tidak secara berkala. Berdasarkan literature melalui dokumen SSK Kota Pekanbaru, sebesar 59 % masyarakat yang telah melakukan pengurusan tinja menggunakan layanan sedot tinja swasta (<i>Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019).</i>	18
		a) 2-3 tahun sekali secara berkala		3		
		b) > 3 tahun sekali tidak secara berkala		1		
Aspek Teknis	Aspek Teknis	10. Keberadaan perusahaan layanan sedot tinja			Berdasarkan laporan akhir rencana induk kota Pekanbaru tahun	40

No	Aspek	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai	Kondisi Eksisting	Penilaian (Skor)
	sistem pengelolaan	a) Lebih dari 2 (dua) perusahaan	8	5	2011 kota pekanbaru memiliki 3 perusahaan penyedot lumpur tangki septik/perusahaan layanan sedot tinja yaitu PT. Berkat, Usaha Sanitasi (Sanitation Service), dan CV. Musi. Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Tampan, untuk keberadaan perusahaan layanan sedot tinja di Kecamatan Tampan sudah banyak di temukan melalui slogan/poster yang dapat di temui/di tempel pada tiang-tiang listrik, pada tiang lampu merah atau perempatan/simpang, melalui sosial media, dan iklan. Berdasarkan observasi ada lebih dari 2 (dua) perusahaan layanan sedot tinja yang di temukan di Kecamatan Tampan.	
		b) 1 - 2 perusahaan		3		
		c) Tidak ada/ Tidak ada data		1		
	Aspek Teknis sistem pengelolaan	11. Peraturan perijinan usaha sedot tinja			Untuk substansi peraturan perijinan usaha sedot tinja belum tersedia (<i>Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2019, Bappeda Kota Pekanbaru,2020</i>). Berdasarkan hasil wawancara bersama Seksi Pendataan dan Perencanaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di dinas Perkim Kota Pekanbaru, untuk peraturan perizinan usaha sedot tinja masih dalam tahap proses penyusunan / Ranperda, sudah diatur di dalam ranperda, tetapi belum terealisasi karna peraturannya masih dalam bentuk rancangan, masih dalam proses. (Wawancara, 19 november 2020).	8
		a) Sudah diatur, termonitoring dan terealisasi baik	5			
		b) Sudah diatur, namun belum ada monitoring	3			
		c) Belum ada perijinan, hanya informasi non formal	8	1		
	Aspek Teknis sistem pengelolaan	12. Kondisi bangunan dan operasional IPLT			IPLT masih belum diserahkan terimakasih ke Pemda sehingga IPLT yang telah dibangun oleh pusat sampai saat ini belum bisa dioperasikan (<i>Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2019</i>). Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Sulaiman selabersama Kasi bidang PSU dinas Perkim Kota Pekanbaru mengenai IPLT bahwa hingga saat ini (tahun 2020) IPLT yang dibangun di muara fajar belum dapat dioperasikan karena belum di serah terimakasih operasionalnya, masih sama kementerian jadi pengelolaannya belum <i>jelas</i> (Wawancara, 19 November 2020).	8
		a) Bangunan baik, beroperasi	5			
		b) Bangunan rusak, beroperasi	3			
		c) Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi	8	1		

No	Aspek	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai	Kondisi Eksisting	Penilaian (Skor)
D	Aspek Keuangan	13. Alokasi biaya untuk pembangunan IPAL Komunal/MCK	6	5	Ada terdapat 13 Pembangunan IPAL Komunal / MCK plus yang telah di bangun di Kecamatan Tampan, di laksanakan dari tahun 2014-2018 yang pembiayaannya mencapai Rp. 5.718.750.000 (<i>Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>), untuk pembiayaan pembangunan IPAL Komunal / MCK tersebut dananya bersumber dari dana APBD Kota Pekanbaru, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dari pihak swasta / CSR yakni Islamic Development Bank (IsDB). Untuk dana yang di keluarkan melalui APBD dalam pembangunan IPAL Komunal tahun 2015 sebesar Rp. 840.000.000 (<i>Delapan Ratus empat puluh juta rupiah</i>).Sedangkan total APBD murni untuk sanitasi dari tahun 2015-2018 yaitu sebesar Rp. 138,624,122,171 (<i>Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>). Namun, pembangunan sanitasi di Kecamatan Tampan di lakukan pada tahun 2015 dengan menggunakan sumber APBD Murni untuk sanitasi tahun 2015.	18
		a) Lebih dari 0,8 % dari total APBD untuk sanitasi		3		
		b) 0,5 % - 0,8 % dari total APBD untuk sanitasi		1		
D	Aspek Keuangan	14. Alokasi biaya untuk operasional pemeliharaan dan IPLT	6	5	IPLT masih belum diserahkan terimakan ke Pemda sehingga IPLT yang telah dibangun oleh pusat sampai saat ini belum bisa di operasikan (Dokumen SSK Kota Pekanbaru,2019). Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di Dinas Perkim Kota Pekanbaru mengatakan bahwa hingga saat ini (tahun 2020) IPLT belum diserahkan terimakan ke Pemda dan belum di operasionalkan.	-
		a) Lebih dari 0,03% dari total APBD		3		
		b) 0,01% - 0,03% dari total APBD		1		
		c) Kurang dari 0,01% dari total APBD				

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.21 diatas, hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Tampan dengan memperhatikan kondisi ekstisting berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sub sektor air limbah domestik yang meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan dan aspek keuangan, diketahui bahwa kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek sanitasi tersebut masuk dalam kategori cukup baik dengan skor nilai 258. Namun terdapat sub indikator yang dinilai rendah seperti pada indikator aspek kelembagaan dan peraturaturan bahwa untuk sub indikator regulasi pengelolaan air limbah domestik masih dalam penyusunan rancangan dan bentuk Kelembagaan pengelolaan IPLT belum di atur dalam tupoksi. Selain itu terdapat beberapa sub indikator dari indikator aspek teknis sistem pengelolaan yang dinilai rendah seperti jumlah truk penyedot tinja yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional pemerintah kota Pekanbaru yang belum memiliki truk tinja, peraturan perijinan usaha sedot tinja belum tersedia dan kondisi bangunan dan operasional IPLT tidak beroperasi.

Tabel 5.22 Penilaian Kondisi Eksisting sanitasi pada Sub Persampahan Domestik di Kecamatan Tampan Berdasarkan aspek aspek sanitasi pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018

No	Aspek	Aspek/Kriteria	Bobot	Nilai	Kondisi Eksisting	Penilaian (Skor)
A	Aspek Kelembagaan dan Peraturan	1. Regulasi pengelolaan sampah yang mengatur Penanganan sampah			Untuk regulasi pengelolaan sampah yang mengatur mengenai penanganan sampah di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota NO. 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dan Perizinan Usulan Pengelolaan Sampah (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru tahun 2019).	50
		a) Sudah lengkap, berupa Peraturan Daerah atau peraturan walikota	10	5		
		b) Sudah namun hanya mengatur retribusi saja, Peraturan Daerah atau peraturan Walikota		3		
		c) Belum ada atau sedang dalam penyusunan (rancangan)		1		
	Aspek Kelembagaan dan Peraturan	2. Bentuk Kelembagaan Pengelola penanganan sampah			Pengangkutan sampah di kota Pekanbaru terbagi menjadi 3 Zona wilayah dengan kerja sama pihak swasta atau pihak ke-3 yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah. Untuk kecamatan Tampan termasuk wilayah zona 1 yang terdiri dari Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Tampan, zona 1 merupakan wilayah yang di kelola oleh PT Godang Tua Jaya. Berdasarkan Perwako No. 95 tahun 2016 penanganan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (<i>Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019</i>), hanya saja dalam pengangkutan sampah, khususnya di kecamatan Tampan, pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kontrak kerjasama dengan pihak swasta yakni PT Godang Tua Jaya untuk bekerjasama dalam bidang persampahan dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, baik dengan sistem	24
		a) Terpisah dari regulatornya (minimal UPT).	8	5		
		b) Masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas terkait)		3		
		c) Belum diatur dalam tupoksi Dinas terkait		1		

					langsung maupun tidak langsung hal ini di dasari dengan nomor kontrak 02/KONTRAK-JAP1/ LELANG /DLHK/APBD/2018 untuk jasa pengangkutan sampah di kecamatan Tampan yang merupakan wilayah zona 1 di operasionalkan oleh pihak ke-3 (tiga) / pihak swasta yaitu PT. Godang Buah Jaya (Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2020).	
B	Aspek Peran Serta Stakeholders	3. Bentuk Peran serta investor atau pihak swasta			Untuk peran swasta dan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru sudah banyak pengepul yang malakukan pengumpulan sampah/barang bekas tapi data-data terkait pengepul masih belum bisa dikumpulkan (<i>Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019</i>). Sedangkan untuk peran swasta di kecamatan Tampan yang termasuk ke dalam wilayah zona 1 merupakan wilayah zona yang di kelola oleh PT Godang Tua Jaya. Jadi untuk bentuk peran serta pihak swasta dalam hal ini pihak ke-3 adalah PT Godang Buah Jaya yang memilki kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru ada di bidang persampahan yaitu dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, baik dengan sistem langsung maupun tidak langsung (<i>Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2020</i>).	18
		a) Sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana	6	5		
		b) Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan atau program pengelolaan sampah		3		
		c) Sebagai akselerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat		1		
	Aspek Peran Serta Stakeholders	4. Bentuk Peran serta masyarakat atau LSM			Untuk peran serta masyarakat dalam persampahan sudah banyak pengepul yang malakukan pengumpulan sampah/barang bekas, terdapat juga peran serta dari kelompok masyarakat lokal di kecamatan Tampan yang di beri nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Bersama untuk mengelola TPS 3R yang di sediakan oleh dinas DLHK Kota Pekanbaru. (<i>Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019</i>).	18
		a) Sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana	6	5		
		b) Sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan pembangunan		3		
		c) Sebagai akselerator dalam memberikan sumbangan ide, gagasan, dan inovasi yang dapat		1		

		diaplikasikan oleh masyarakat					
C	Aspek Peran Serta Stakeholders	5. Kegiatan kampanye sanitasi, mengenai sektor persampahan (khususnya) seperti penerapan praktek 3 R, Sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya, Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya, sosialisasi kebijakan persampahan				Kegiatan penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan Penerapan praktek 3-R dan membudayakan kembali sifat gotong royong masyarakat yang di lakukan pada tahun 2014-2018 oleh dinas DLHK Kota Pekanbaru. Sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya, Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya, sosialisasi kebijakan persampahan. (Sumber : Dokumen SSK Kota Pekanbaru, 2019).	40
		a) Ada, lebih dari 3 jenis kegiatan, sudah terjadwal terlaksana	8	5			
		b) Ada, 2-3 jenis kegiatan, sudah terjadwal dan terlaksana		3			
		c) Belum ada atau ada, namun masih bersifat insidental		1			
Aspek sistem pengelolaan	Teknis	6. Kondisi bangunan Tempat penampungan sementara (TPS)				Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Paekanbaru dan melalui hasil observasi yang di lakukan, di Kecamatan Tampan terdapat 15 titik lokasi bangunan TPS yang menyebar dan sebanyak 11 TPS yang statusnya tidak resmi (illegal) dan TPS yang resmi (legal) hanya berjumlah 4 TPS dengan kondisi bangunan baik dan beroperasi.	30
		a) Bangunan Baik, beroperasi	6	5			
		b) Bangunan rusak, beroperasi		3			
		c) Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1			
Aspek sistem pengelolaan	Teknis	7. Sistem kegiatan pengumpulan sampah				Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu narasumber di DLHK Kota Pekanbaru, untuk sistem kegiatan pengumpulan sampah di Kecamatan Tampan menggunakan pola individual langsung yang mana pengumpulan sampah dengan mengambil sampah yang berada di tempat sampah depan rumah oleh petugas dalam hal ini PT Godang Tuah Jaya sebagai jasa angkutan sampah zona 1 (satu) kemudian diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan (Wawancara, 11 november 2020).	30
		a) Pola individual langsung	6	5			
		b) Pola individual tak langsung		3			
		c) Pola komunal langsung dan tak langsung		1			

Aspek sistem pengelolaan	Teknis	8. Jumlah truk pengangkut sampah yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional baik	6	5	Di Kecamatan Tampan, untuk kegiatan operasional pengangkutan sampah dikelola oleh PT Godang Tua Jaya yang merupakan pihak ke tiga (3) yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoperasikan kegiatan pengangkutan sampah. terdapat 5 jenis sarana pengangkutan yang di operasikan di kecamatan tampan yaitu tronton (dump truk besar), dump truck (dump truk kecil, arm roll, pick up, dan becak motor. sedangkan untuk jumlah truk pengangkut sampah yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional baik sebanyak 9 unit Kendaraan Truk (Dump Truk - R6) yang beroperasi di Kecamatan Tampan.	30
		a) Lebih dari 1 (satu) unit				
		b) 1 (satu) unit				
		c) Belum punya, atau semua semua unit yang dimiliki rusak				
Aspek sistem pengelolaan	Teknis	9. Frekuensi pengangkutan sampah	6	5	Untuk frekuensi pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan di lakukan setiap hari dengan mencapai 66 ritasi pengangkutan dalam sehari dengan 3 kali shif yakni pagi, siang, dan malam menggunakan jenis sarana pengangkutan sampah meliputi Kendaraan Truk (dump truk - r6), kendaraan pick up, becak motor, arm roll, dan tronton. sedangkan untuk ritasi pengangkutan yang paling banyak di lakukan pada jenis sarana kendaraan truk (dump truk - r6) dengan kapasitas 8 m3 yang di kerahkan sebanyak 8 unit truk (dump truk - r6). (Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2020).	30
		a) Setiap hari				
		b) 2-3 seminggu				
		c) < 3 kali dalam seminggu				
Aspek sistem pengelolaan	Teknis	10. Peraturan perijinan pengangkutan sampah	8	5	Berdasarkan nomor kontrak 02/KONTRAK-JAPI/ LELANG /DLHK/APBD/2018 untuk jasa pengangkutan sampah di kecamatan Tampan yang merupakan wilayah zona 1 di operasionalkan oleh pihak ke-3 (tiga) / pihak swasta yaitu PT. Godang Tuah Jaya. Pihak swasta/pihak ke 3 dalam hal	40
		a) Sudah diatur, termonitoring dan terealisasi baik				
		b) Sudah diatur, namun belum ada monitoring				

		c) Belum ada perijinan, hanya informasi non formal		1	ini PT. Godang Tuah jaya memiliki kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam bidang persampahan yaitu dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, baik dengan sistem langsung maupun tidak langsung. Untuk Peraturan perijinan pengangkutan sampah ada Peraturan Walikota N0. 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dan Perizinan Usulan Pengelolaan Sampah.	
Aspek sistem pengelolaan	Teknis	11. Keberadaan tempat pengolahan sampah (TPS 3R)			Berdasarkan observasi di kecamatan Tampan hanya terdapat satu (1) unit Pengolahan sampah Komunal dengan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) atau TPS 3R yang berlokasi di jalan Damai Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan. TPS 3R ini di beri nama unit pengolahan TPS 3 R KSM Mandiri Bersama yang di dirikan dari tahun 2015 dan hingga sekarang masih berfungsi. TPS 3 R KSM Mandiri Bersama berdasarkan SK/BH nomor 02/BAST-TPS3R/DLHK/1/2017 di kelola oleh lembaga lokal di Kecamatan Tampan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Bersama yang mana ketuanya saat ini yaitu bapak Tri Joko Waluyo, TPS 3 R KSM Mandiri Bersama memiliki jumlah nasabah mencapai 2800 orang.	24
		a) Lebih dari 2 (dua) TPS 3 R	8	5		
		b) 1 - 2 TPS 3 R		3		
		c) Tidak ada/ Tidak ada data		1		
Aspek sistem pengelolaan	Teknis	12. Kondisi Bangunan dan operasional tempat pengolahan sampah			Berdasarkan hasil observasi, Pengolahan sampah Komunal / TPS 3R KSM Mandiri Bersama di Kecamatan Tampan, untuk Kondisi Bangunan dan operasional tempat pengolahan sampah pada TPS 3 R KSM Mandiri Bersama masih dalam kondisi bangunan yang baik dan beroperasi. TPS 3 R KSM	40
		a) Bangunan Baik, beroperasi	8	5		
		b) Bangunan rusak, beroperasi		3		

		c) Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1	Mandiri Bersama memiliki ruang pemilah yang di gunakan untuk memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya, lalu sampah tersebut di masukan kedalam ruang penyangga sesuai dengan jenis sampah dan warna pada ruangan tersebut, terdapat juga gudang yang di gunakan sebagai penyimpanan sampah yang masih bisa di gunakan/dimanfaatkan serta masih bernilai ekonomis, serta memiliki mesin pencacah / penggiling yang masih berfungsi dengan baik.	
Aspek Teknis sistem pengelolaan	13. Kondisi Bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)				Berdasarkan hasil literature, observasi dan wawancara dari narasumber di DLHK Kota Pekanbaru Kondisi bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar bangunan masih dalam keadaan baik dan beroperasi. Kondisi yang di maksud dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang ada di TPA Muara Fajar seperti adanya peralatan dan perlengkapan yang berfungsi atau digunakan dalam proses pengolahan sampah di TPA Muara Fajar. Kondisi TPA Muara Fajar menggunakan sistem sanitary landfill (sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup).	40
	a) Bangunan Baik, beroperasi	8	5			
	b) Bangunan rusak, beroperasi		3			
	c) Bangunan baik atau rusak, tidak beroperasi		1			
D	Aspek Keuangan	14. Alokasi biaya operasional operasi dan pemeliharaan pengangkutan sampah			Di Kecamatan Tampan, untuk kegiatan operasional pengangkutan sampah di kelola oleh PT Godang Tua Jaya yang merupakan pihak ke tiga (3) yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoperasikan kegiatan pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan hal ini didasarkan pada nomor kontrak 02/KONTRAK-JAP1/LELANG /DLHK/APBD/2018 untuk jasa pengangkutan sampah di kecamatan Tampan yang merupakan wilayah zona 1 di operasionalkan oleh pihak ke-3 (tiga) / pihak swasta yaitu PT. Godang Tuah Jaya.	-
		a) Lebih dari 0,03% dari total APBD	6	5		
		b) 0,01% - 0,03% dari total APBD		3		
		c) Kurang dari 0,01% dari total APBD		1		

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.22 hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Tampan dengan memperhatikan kondisi eksisting berdasarkan aspek-aspek sanitasi pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sektor persampahan yang meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan dan aspek keuangan, di ketahui bahwa kondisi eksisting sanitasi kecamatan Tampan berdasarkan aspek-aspek sanitasi tersebut masuk dalam kategori baik dengan nilai 414. Bahwa ada sub indikator yang dinilai sedang seperti pada indikator aspek kelembagaan dan perataturan yang mana bentuk kelembagaan pengelola penanganan sampah masih melekat pada tupoksi regulator (di bawah Dinas terkait). Lalu pada indikator aspek peran serta stakeholders dinilai sedang, bentuk peran pihak swasta dan masyarakat/LKM sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan atau program persampahan. Selain itu indikator aspek teknis sistem pengelolaan pada sub indikator Keberadaan tempat pengolahan sampah (TPS 3R) di nilai sedang karena hanya terdapat 1-2 TPS 3R di Kecamatan Tampan.

5.3 Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

Deskripsi hasil penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada 100 masyarakat di tiga (3) kelurahan di kecamatan Tampan yang meliputi kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sialang Mungu dan kelurahan Tobek Godang, pemilihan lokasi sampel didasarkan pada peta area beresiko sanitasi yang terdapat pada dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru tahun 2014-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif deskriptif, maka data yang diperoleh tidak hanya berbentuk kalimat dari hasil wawancara dan pertanyaan dari hasil penyebaran kuesioner, melainkan ditampilkan dalam bentuk angka yang kemudian diolah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota pekanbaru di Kecamatan Tampan melalui kegiatan dan program yang terdapat di dalamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang terdiri dari 5 (lima) indikator yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sub indikator yang diuraikan peneliti, kemudian peneliti menguraikannya kedalam 24 pertanyaan. Didalam kuesioner juga terdapat 22 kegiatan dan program dari dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan. Pada sub sektor air limbah domestik terdapat 10 kegiatan dan program sedangkan pada sub sektor persampahan terdapat 12 kegiatan dan program yang nantinya akan digunakan sesuai dengan pertanyaan pada kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *skala Likert* dengan mengajukan 5 (lima) pilihan

jawaban yang memiliki bobot nilai yang berbeda. Pilihan jawaban pernyataan tersebut adalah jawaban Sangat Setuju (SS) yang memiliki bobot nilai 5 (lima), jawaban Setuju (S) memiliki bobot nilai 4 (empat), jawaban kurang setuju memiliki bobot 3 (tiga), jawaban Tidak Setuju (TS) memiliki bobot nilai 2 (dua), jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki bobot nilai 1 (satu).

Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai seberapa besar Efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota pekanbaru di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, peneliti menguraikannya dalam bentuk Tabel disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban responden dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada para responden, yaitu sebagai berikut.

5.3.1 Pemahaman Program

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok individu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap program dan kegiatan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan. Dalam indikator pemahaman program ini, terdapat 2 (dua) sub indikator dan 6 (enam) pernyataan. Agar lebih jelas, berikut tabel 5.23 indikator pemahaman program dan kegiatan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di Kecamatan Tampan.

Tabel 5.23 Indikator pemahaman program terhadap pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan.

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	jawaban Responden		Frekuensi Skor	
1	Pemahaman program / kegiatan	Pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru	Pertanyaan 1.				
			Mengetahui adanya pelaksanaan kegiatan dan program yang terdapat pada SSK Pekanbaru	SS (5)	2	10	
				S (4)	52	208	
				KS (3)	38	114	
				TS (2)	8	16	
				STS (1)	0	0	
			Skor				348
			% Skor				69,6 %
			Pertanyaan 2.				
			Mengetahui secara jelas kegiatan dan program yang telah di laksanakan pada SSK Pekanbaru	SS (5)	1	5	
				S (4)	36	144	
				KS (3)	37	111	
		TS (2)		26	52		
		STS (1)		0	0		
		Skor				312	
		% Skor				62,4 %	
		Pertanyaan 3.					
		Mengetahui adanya sosialisasi / penyuluhan mengenai kegiatan dan program SSK Pekanbaru	SS (5)	2	10		
			S (4)	13	52		
			KS (3)	56	168		
			TS (2)	29	58		
			STS (1)	0	0		
		Skor				288	
		% Skor				57.6 %	
Sumber informasi tentang pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru	Pertanyaan 4.						
	Pernah mencari informasi mengenai pelaksanaan SSK Pekanbaru	SS (5)	1	5			
		S (4)	11	44			
		KS (3)	45	135			
		TS (2)	41	82			
		STS (1)	2	2			
	Skor				268		
% Skor				53.6 %			
Total = \sum Skor					1216		
Persentase = $\frac{1216}{2000} \times 100 \%$					60,8 %		

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Keterangan :

Sangat Setuju (SS)	= 5
Setuju (S)	= 4
Cukup setuju (CS)	= 3
Tidak Setuju (TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1

$$\text{Skor Aktual} = \text{Kelas} \times \text{Jumlah Frekuensi}$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan pada Indikator Pemahaman Program :

1. Apakah terdapat pelaksanaan program dan kegiatan dari Strategi sanitasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tampan ?

$$\text{Skor aktual} = \text{Kelas} \times \text{jumlah frekuensi}$$

Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
= 5 x 2	= 4 x 52	= 3 x 38	= 2 x 8	= 1 x 0
= 10	= 208	= 114	= 16	= 0
Total Skor Aktual = 348				

$$\begin{aligned}
 \% \text{ skor aktual} (\%) &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{348}{500} \times 100 \% \\
 &= 69,9 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 5.23 untuk indikator pemahaman program dan kegiatan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan bahwa masyarakat yang mengetahui bahwa terdapat pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tampan dengan skor 348 atau 69,6 %, berdasarkan jawaban responden sebagian besar memilih jawaban setuju yaitu sebanyak 52 responden dengan mengetahui 6 sampai 10 kegiatan dan program yang beroperasi di Kecamatan Tampan. Selanjutnya,

masyarakat yang mengetahui secara jelas program dan kegiatan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru di Kecamatan Tampan dengan skor 312 atau 62,4 %, berdasarkan jawaban responden sebagian besar memilih jawaban kurang setuju yaitu sebanyak 37 responden dengan alasan mengetahui secara jelas 3 sampai 5 kegiatan dan program yang beroperasi di Kecamatan Tampan. Lalu, untuk masyarakat yang mengetahui adanya sosialisasi mengenai program dan kegiatan dari pelaksanaan SSK Pekanbaru yang beroperasi di Kecamatan Tampan dengan skor sebesar 288 atau 57,6 %, berdasarkan jawaban responden sebagian besar memilih jawaban kurang setuju yaitu sebanyak 56 responden dengan mengetahui 3 sampai 5 sosialisasi pelaksanaan SSK Pekanbaru yang beroperasi di Kecamatan Tampan dan masyarakat yang mencari tau informasi mengenai pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tampan dengan skor sebanyak 268 atau 53,6 %, berdasarkan jawaban responden sebagian besar memilih jawaban kurang setuju yaitu sebanyak 45 responden pernah mencari informasi mengenai pelaksanaan SSK Pekanbaru yaitu 3 sampai 5 program dan kegiatan saja.

Dari hasil perhitungan skor masing-masing pertanyaan tersebut, maka selanjutnya dilakukan penjumlahan antar seluruh skor pertanyaan agar dapat di ketahui jumlah skoring dalam satu (1) indikator/kriteria dan berapa besar persentasenya. Untuk memperoleh pesentase indikator/kriteria pemahaman program dan kegiatan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan pada variabel dapat di lakukan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{persentase skor aktual (\%)} &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{1216}{2000} \times 100\% \\
 &= 60,8\%
 \end{aligned}$$

Kemudian, pada tahap berikutnya adalah menentukan interval untuk mengetahui dimanakah total skor berada dalam interval skor ideal yang akan di tentukan terhadap penilaian dampak untuk kriteria pemahaman program dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan, adapun perhitungannya dapat diurai sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Indek minimal} &= 1 \times 4 \times 100 = 400 \\
 \text{Indeks maksimal} &= 5 \times 4 \times 100 = 2000 \\
 \text{Interval:} &= \frac{I_{max} - I_{min}}{\text{jumlah indeks}} \\
 &= \frac{2000 - 400}{5} \\
 &= 320
 \end{aligned}$$

Tabel 5.24 Skor Gabungan Kriteria Pemahaman Program Dan Kegiatan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan

Interval skor ideal	Indikator Pemahaman Program	Skor Gabungan
400 - 720	Sangat Tidak Berhasil	1216
720 - 1.040	Kurang Berhasil	
1.040 – 1.360	Cukup Berhasil	
1.360 – 1.680	Berhasil	
1.680 - 2.000	Sangat Berhasil	
Persentase Skor Gabungan Hasil Penelitian Terhadap Skor Gabungan Ideal		60,8 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.24 di atas, bahwa total skor yang di peroleh dari Kriteria pemahaman program dalam menilai dampak pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan

adalah sebesar 60,8 % yang berada pada kategori cukup berhasil dengan total skor yang di peroleh 1216. Setelah diketahui skor gabungan untuk kriteria pemahaman program, maka tahap berikutnya adalah menyimpulkan kriteria pemahaman program dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan dengan menggunakan metode *Skala likert* sebagai berikut



Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.3.2 Indikator Tepat Sasaran

Tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan atau dengan kata lain berarti mengenai apa yang dikehendaki. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan melalui program dan kegiatannya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Apakah kegiatan dan program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak. Sehingga indikator ini penting digunakan untuk mengetahui efektivitas program suatu kegiatan.

Dalam indikator tepat sasaran ini, ada 2 sub indikator, yaitu ketepatan penerima manfaat dan kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam 2 sub indikator tersebut memiliki masing- masing pernyataan. Agar lebih jelas, berikut tabel 5.25 indikator tepat sasaran pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan.

Tabel 5.25 Indikator Tepat Sasaran dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan.

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	jawaban Responden		Frekuensi Skor		
2	Tepat sasaran	Ketepatan penerima manfaat	Pertanyaan 5.					
			Pernah berpartisipasi / terlibat mengikuti kegiatan dan program pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru	SS (5)	1	5		
				S (4)	33	132		
				KS (3)	49	147		
				TS (2)	16	32		
				STS (1)	1	1		
			Skor					317
			% Skor					63,7 %
			Pertanyaan 6.					
			Mendapatkan keuntungan dari kegiatan dan program pada SSK Pekanbaru yang telah di laksanakan	SS (5)	1	5		
				S (4)	15	60		
		KS (3)		44	132			
		TS (2)		39	78			
		STS (1)		1	1			
		Skor					276	
		% Skor					55,2 %	
		Kesesuaian kegiatan dan program dengan kebutuhan dan harapan masyarakat	Pertanyaan 7.					
			Kegiatan dan program SSK Pekanbaru yang telah di laksanakan sesuai dengan kebutuhan	SS (5)	0	0		
				S (4)	6	24		
				KS (3)	44	132		
				TS (2)	45	90		
				STS (1)	5	5		
			Skor					251
% Skor					50,2 %			
Pertanyaan 8.								
Kegiatan dan program SSK Pekanbaru yang telah dilaksanakan sudah memenuhi harapan / keinginan	SS (5)		0	0				
	S (4)		6	24				
	KS (3)	40	120					
	TS (2)	50	100					
	STS (1)	4	4					
Skor					248			
% Skor					49,6 %			
Total		$= \sum \text{Skor}$			1092			
Persentase		$= \frac{1092}{2000} \times 100 \%$			54,6 %			

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Keterangan :

Sangat Setuju (SS)	= 5
Setuju (S)	= 4
Cukup setuju (CS)	= 3
Tidak Setuju (TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1

$$\text{Skor Aktual} = \text{Kelas} \times \text{Jumlah Frekuensi}$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan pada Indikator Tepat Sasaran :

1. Apakah pernah berpartisipasi / terlibat mengikuti kegiatan dan program dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan ?

$$\text{Skor aktual} = \text{Kelas} \times \text{jumlah frekuensi}$$

Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
= 5 x 1	= 4 x 33	= 3 x 49	= 2 x 16	= 1 x 1
= 4	= 132	= 147	= 32	= 2
Total Skor Aktual = 317				

$$\begin{aligned}
 \% \text{ skor aktual} (\%) &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{317}{500} \times 100 \% \\
 &= 63,4 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 5.25 untuk indikator tepat sasaran dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di Kecamatan Tampan bahwa masyarakat pernah berpartisipasi atau mengikuti kegiatan dan program dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan dengan persentase skor sebesar 64.4 % atau 317, berdasarkan jawaban responden sebanyak 49 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan 2-3 kegiatan dan program

masyarakat pernah berpartisipasi mengikuti kegiatan dan program dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan. Selanjutnya, masyarakat yang merasa mendapatkan keuntungan dari kegiatan dan program pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan adalah sebanyak 276 atau 55,2 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 44 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan hanya 3-5 kegiatan dan program saja mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan SSK Pekanbaru yang dilaksanakan di Kecamatan Tampan. Lalu, untuk masyarakat yang merasa kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan telah sesuai dengan kebutuhan adalah sebanyak 251 atau 50,2 %. berdasarkan jawaban responden sebanyak 45 responden yang mendominasi memilih jawaban tidak setuju dengan alasan hanya 0-3 kegiatan dan program yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dan sebanyak 248 atau 49,6 % masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan dan program dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan telah memenuhi harapan/keinginan, berdasarkan jawaban responden sebanyak 50 responden yang mendominasi memilih jawaban tidak setuju dengan alasan hanya 0-3 Kegiatan dan program SSK Pekanbaru yang telah di laksanakan sudah memenuhi harapan/keinginan

Kemudian dilakukan penjumlahan antar keseluruhan skor pertanyaan agar dapat di ketahui scoring dalam satu (1) indikator/kriteria dan persentasenya. Sedangkan untuk mengetahui persentase indikator/kriteria tepat sasaran dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di

Kecamatan Tampan pada variable efektivitas dilakukan perhitungan (Nariwati dalam Ramadhani, 2018) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{persentase skor aktual (\%)} &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{1092}{2000} \times 100 \% \\
 &= 54,6 \%
 \end{aligned}$$

Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan interval untuk mengetahui dimanakah total skor dalam variabel efektivitas untuk indikator tepat sasaran dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan, adapun perhitungan dapat di urai sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Indek minimal} &= 1 \times 4 \times 400 = 400 \\
 \text{Indeks maksimal} &= 5 \times 4 \times 100 = 2000 \\
 \text{Interval:} &= \frac{I_{max} - I_{min}}{\text{jumlah indeks}} \\
 &= \frac{2000 - 400}{5} \\
 &= 320
 \end{aligned}$$

Tabel 5.26 Skor Gabungan Indikator Tepat Sasaran pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

Interval skor ideal	Indikator Tepat Sasaran	Skor Gabungan
400 - 720	Sangat Tidak Berhasil	1092
720 - 1.040	Kurang Berhasil	
1.040 – 1.360	Cukup Berhasil	
1.360 – 1.680	Berhasil	
1.680 - 2.000	Sangat Berhasil	
Persentase Skor Gabungan Hasil Penelitian Terhadap Skor Gabungan Ideal		54,6 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.26 di atas, bahwa total skor yang di peroleh dari Indikator tepat sasaran dalam menilai dampak pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan adalah sebesar 43,68 % yang berada pada kategori cukup berhasil dengan total skor yang di

peroleh 1216. Setelah diketahui skor gabungan untuk kriteria Tepat Sasaran, maka tahap berikutnya adalah menyimpulkan untuk indikator tepat sasaran dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan dengan menggunakan metode *Skala likert* sebagai berikut



Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.3.3 Indikator Ketepatan Waktu

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian suatu kegiatan dengan target waktu yang direncanakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Dalam indikator tepat waktu ini, terdapat 2 (dua) sub indikator dan 4 (empat) pernyataan. Agar lebih jelas, berikut tabel 5.27 indikator tepat waktu dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan :

Tabel 5.27 Indikator Tepat Waktu dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan.

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	jawaban Responden		Frekuensi Skor	
3	Tepat Waktu	Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana dari kegiatan/program yang telah ditetapkan	Pertanyaan 9.				
			Pelaksanaan SSK Pekanbaru di lakukan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan sebelumnya	SS (5)	0	0	
				S (4)	25	100	
				KS (3)	58	174	
				TS (2)	17	34	
				STS (1)	0	0	
		Skor				308	
		% Skor				61,6 %	
		Keberlanjutan Program	Pertanyaan 10.				
		Kegiatan dan	SS (5)	0	20		

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	jawaban Responden		Frekuensi Skor	
			program pada SSK Pekanbaru sub sektor air limbah domestik di laksanakan secara berkala dan terus menerus	S (4)	8	32	
				KS (3)	44	132	
				TS (2)	43	86	
				STS (1)	5	5	
			Skor			255	
			% Skor			51 %	
			Pertanyaan 11.				
			Kegiatan dan program pada SSK Pekanbaru sub sektor persampahan di laksanakan secara berkala dan terus menerus	SS (5)	0	0	
				S (4)	15	60	
				KS (3)	61	183	
				TS (2)	24	48	
				STS (1)	0	0	
			Skor			291	
			% Skor			58,2 %	
Total \sum Skor						854	
Persentase $= \frac{854}{1500} \times 100 \%$						56,9 %	

Sumber : Hasil Analisi, 2020

Keterangan :

- Sangat Setuju (SS) = 5
 Setuju (S) = 4
 Cukup setuju (CS) = 3
 Tidak Setuju (TS) = 2
 Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

$$\text{Skor Aktual} = \text{Kelas} \times \text{Jumlah Frekuensi}$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan pada Indikator Tepat Waktu :

1. Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya ?

$$\text{Skor aktual} = \text{Kelas} \times \text{jumlah frekuensi}$$

Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
= 5 x 0	= 4 x 25	= 3 x 58	= 2 x 17	= 1 x 0
= 0	= 100	= 174	= 34	= 0
Total Skor Aktual = 351				

$$\begin{aligned}
 \% \text{ skor aktual } (\%) &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{308}{500} \times 100\% \\
 &= 61,6\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 5.27 untuk indikator tepat waktu dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan bahwa untuk Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana dari kegiatan dan program yang telah ditetapkan diberi skor 308 atau 61,6%, berdasarkan jawaban responden sebanyak 58 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan hanya 3 sampai 5 kegiatan dan program saja yang sesuai dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk kegiatan dan program dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan pada sub sektor air limbah domestik dilakukan secara berkala dan terus menerus diberi skor 255 atau 51 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 44 responden mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan 3-5 kegiatan dan program pada SSK Pekanbaru sub sektor air limbah domestik di laksanakan secara berkala dan terus menerus. Sedangkan untuk kegiatan dan program pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan pada sub sektor persampahan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus diberi skor 291 atau 58,2 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 61 responden mendominasi memilih jawaban

kurang setuju dengan alasan 3-5 kegiatan dan program pada SSK Pekanbaru sub sektor persampahan di laksanakan secara berkala dan terus menerus.

Setelah hasil perhitungan skor masing-masing pertanyaan, maka selanjutnya, dilakukan penjumlahan terhadap seluruh skor pertanyaan pada tabel 5.27 agar dapat diketahui skoring dalam satu (1) kriteria/indikator dan persentasinya. Untuk memperoleh persentase indikator tepat waktu dalam efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan dilakukan perhitungan (Ridwan dalam Ramadhani, 2018) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{persentase skor aktual (\%)} &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{854}{1500} \times 100\% \\
 &= 56,9\%
 \end{aligned}$$

Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan interval untuk mengetahui dimanakah total skor dalam variabel efektivitas untuk indikator tepat waktu dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan, adapun perhitungan dapat diurai sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Indek minimal} &= 1 \times 3 \times 100 = 300 \\
 \text{Indeks maksimal} &= 5 \times 3 \times 100 = 1500 \\
 \text{Interval:} &= \frac{I_{min} - I_{maks}}{\text{jumlah indeks}} \\
 &= \frac{1500 - 300}{5} \\
 &= 240
 \end{aligned}$$

Tabel 5.28 Skor Gabungan Indikator Tepat waktu dalam pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

Interval skor ideal	Kriteria Pemahaman Program	Skor Gabungan
300 - 540	Sangat Tidak Berhasil	854
540 - 780	Kurang Berhasil	
780 – 1.020	Cukup Berhasil	
1.020 – 1.260	Berhasil	
1.260 - 1.500	Sangat Berhasil	
Persentase Skor Gabungan Hasil Penelitian Terhadap Skor Gabungan Ideal		56,9 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.28 diatas, bahwa total skor yang diperoleh dari indikator tepat waktu dalam menilai efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan adalah sebesar 56,9% berada pada kategori cukup berhasil dengan total skor yang diperoleh 854. Setelah diketahui skor gabungan untuk indikator tercapainya tujuan, maka tahap berikutnya adalah menyimpulkan indikator tepat waktu untuk menilai efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan dengan menggunakan metode *Skala likert* sebagai berikut.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.3.4 Indikator Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dari program dan kegiatan dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru dilihat dari tercapainya tujuan atau visi dan misi sanitasi dalam hal ini pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan. Tujuan dari pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru pada sub sektor air limbah domestik yaitu untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih

melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga serta menyediakan sarana dan prasarana air limbah. Sedangkan Tujuan dari pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru pada sub sektor persampahan meningkatkan lingkungan Kota Pekanbaru yang bersih, sehat dan mandiri melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu untuk meminimalisir timbulan, mengurangi dampak negative dan memberikan manfaat serta nilai ekonomi sampah.

Dalam indikator tentang tercapainya tujuan terdapat 1 (satu) sub indikator dan 7 (tujuh) pertanyaan. Agar lebih jelas, berikut tabel 5.29 indikator tercapainya tujuan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan :

Tabel 5.29 Indikator Tercapainya Tujuan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru Di kecamatan Tampan

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	Jawaban Responden		Frekuensi Skor		
4	Tercapainya tujuan	Tercapainya sasaran pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 sub sektor air limbah domestik pada masyarakat di Kecamatan Tampan	Pertanyaan 12.					
			Memiliki jamban bertangki septik individual	SS (5)	4	20		
				S (4)	84	336		
				KS (3)	12	36		
				TS (2)	0	0		
				STS (1)	0	0		
			Skor				392	
			% Skor				78.4%	
			Pertanyaan 13.					
			Cakupan sistem komunal (Ipal komunal atau truk tinja) membantu memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	SS (5)	0	0		
				S (4)	5	20		
				KS (3)	61	183		
				TS (2)	31	62		
				STS (1)	3	3		
Skor				268				
% Skor				53.6%				

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	Jawaban Responden		Frekuensi Skor	
			Pertanyaan 14.				
			Melakukan penyedotan tangki septik pribadi secara berkala 2-3 tahun sekali.	SS (5)	0	0	
				S (4)	2	8	
				KS (3)	52	156	
				TS (2)	41	82	
				STS (1)	5	5	
			Skor			251	
			% Skor			50.2 %	
			Pertanyaan 15.				
			Layanan persampahan (sarana pengangkut sampah, fasilitas TPS,TPSR,Bank Sampah) membantu memberikan pelayanan pengelolaan persampahan.	SS (5)	5	25	
				S (4)	49	196	
				KS (3)	38	114	
				TS (2)	8	16	
				STS (1)	0	0	
			Skor			351	
			% Skor			70.2	
			Pertanyaan 16.				
		Tercapainya sasaran pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru 2014-2018 sub sektor persampahan pada masyarakat di Kecamatan Tampan		SS (5)	0	0	
				S (4)	9	36	
				KS (3)	52	156	
				TS (2)	37	74	
				STS (1)	2	2	
				Skor			268
			% Skor			53.6 %	
			Pertanyaan 17.				
			Kegiatan gotong royong sudah di budayakan kembali di lingkungan	SS (5)	0	0	
				S (4)	34	136	
				KS (3)	47	141	
				TS (2)	19	38	
				STS (1)	0	0	
			Skor			315	
			% Skor			63%	
			Pertanyaan 18.				
			fasilitas pengurangan sampah seperti pengolahan komunal (TPS 3R) sudah cukup	SS (5)	0	0	
				S (4)	11	44	
				KS (3)	30	90	
				TS (2)	57	114	
				STS (1)	2	2	
			Skor			250	

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	jawaban Responden	Frekuensi Skor
			% Skor		50 %
Total	$\sum \text{Skor}$				2095
Persentase	$\frac{2095}{3500} \times 100 \%$				59,85 %

Sumber : Hasil Analisi, 2020

Keterangan :

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Cukup setuju (CS) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

$$\text{Skor Aktual} = \text{Kelas} \times \text{Jumlah Frekuensi}$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan pada Indikator Tercapainya Tujuan:

2. Cakupan sistem komunal (Ipal komunal) membantu memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik ?

$$\text{Skor aktual} = \text{Kelas} \times \text{jumlah frekuensi}$$

Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
= 5 x 4	= 4 x 84	= 3 x 12	= 2 x 0	= 1 x 0
= 20	= 336	= 36	= 0	= 0
Total Skor Aktual = 392				

$$\begin{aligned} \% \text{ skor aktual} (\%) &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{268}{500} \times 100 \% \\ &= 53,6 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 5.29 untuk indikator tercapainya tujuan dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan bahwa masyarakat yang telah memiliki jamban bertangki septik individual diberi skor 392 atau 78,4 %, berdasarkan jawaban responden

sebanyak 84 responden yang mendominasi memilih jawaban setuju dengan alasan sudah memiliki jamban bertangki septik individual. Kemudian untuk cakupan sistem komunal (Ipal komunal) yang membantu memberikan layanan dalam pengelolaan air limbah domestik dilingkungan diberi skor 268 atau 53,6%, berdasarkan jawaban responden sebanyak 61 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan berdasarkan kondisi eksisting ada 13 pembangunan Ipal Komunal yang tersebar di Kecamatan Tampan, namun Ipal Komunal yang terletak dilokasi sampel penelitian yaitu hanya di Kelurahan Tuah Karya berjumlah 4 unit Ipal Komunal, sehingga dianggap belum membantu memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dilingkungan masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat yang telah melakukan penyedotan tangki septik individual (pribadi) secara berkala 2-3 tahun sekali diberi skor 251 atau 50,2 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 52 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan penyedotan dilakukan lebih dari 2-3 tahun sekali. Lalu dalam hal pelayanan sampah, untuk layanan persampahan seperti tersedianya sarana pengangkut sampah, adanya fasilitas TPS Sampah, TPS 3R, dan Bank Sampah yang telah membantu dalam memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat diberi skor 351 atau 70,2% berdasarkan jawaban responden sebanyak 49 responden yang mendominasi memilih jawaban setuju dengan alasan berdasarkan kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor persampahan layanan persampahan seperti sarana pengangkut sampah di Kecamatan Tampan ada lebih dari 25 unit, fasilitas TPS sampah milik swasta 4 unit, TPS 3R 1 unit, dan Bank Sampah ada 2 unit, sehingga telah membantu dalam memberikan pelayanan pengelolaan persampahan

kepada masyarakat. Untuk masyarakat yang melakukan penerapan praktek 3R (reduce, reuse, dan recycle) secara rutin sebanyak 268 atau 53,6%. Sedangkan, kegiatan gotong royong sebanyak 315 atau 63 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 47 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan layanan gotong royong dilakukan lebih dari sebulan sekali. Dan untuk fasilitas pengurangan sampah seperti TPS 3R, masyarakat yang menyatakan bahwa fasilitas pengolahan sampah TPS 3 R sudah cukup sebanyak 250 atau 50 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 57 responden yang mendominasi memilih tidak setuju dengan alasan berdasarkan kondisi eksisting fasilitas TPS 3R hanya 1 unit saja di Kelurahan Tuah Karya.

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan terhadap seluruh skor pertanyaan pada tabel 5.29 agar dapat diketahui skoring dalam 1 indikator dan persentasinya. Untuk memperoleh persentase indikator tercapainya tujuan dalam efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan dilakukan perhitungan (Ridwan dalam Ramadhani, 2018) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{persentase skor aktual (\%)} &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{2095}{3500} \times 100 \% \\ &= 59,85 \% \end{aligned}$$

Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan interval untuk mengetahui dimanakah total skor dalam variabel efektivitas untuk indikator tercapainya tujuan dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan, adapun perhitungan dapat di urai sebagai berikut.

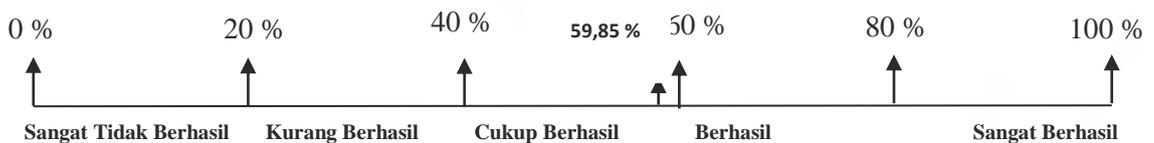
$$\begin{aligned} \text{Indek minimal} &= 1 \times 7 \times 100 = 700 \\ \text{Indeks maksimal} &= 5 \times 7 \times 100 = 3500 \\ \text{Interval:} &= \frac{I_{max} - I_{min}}{\text{jumlah indeks}} \\ &= \frac{3500 - 700}{5} \\ &= 560 \end{aligned}$$

Tabel 5.30 Skor Gabungan Indikator Tercapainya Tujuan pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

Interval skor ideal	Kriteria Pemahaman Program	Skor Gabungan
700 - 1.260	Sangat Tidak Berhasil	2095
1.260 - 1.820	Kurang Berhasil	
1.820 - 2.380	Cukup Berhasil	
2.380 - 2.940	Berhasil	
2.940 - 3.500	Sangat Berhasil	
Persentase Skor Gabungan Hasil Penelitian Terhadap Skor Gabungan Ideal		59,85 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.30 di atas, bahwa total skor yang diperoleh dari indikator tercapainya tujuan dalam menilai efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan adalah sebesar 59,85 % yang berada pada kategori cukup berhasil dengan total skor yang di peroleh 2095. Setelah diketahui skor gabungan untuk indikator tercapainya tujuan, maka tahap berikutnya adalah menyimpulkan indikator tercapainya tujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan dengan menggunakan metode *Skala likert* sebagai berikut.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.3.5 Indikator Perubahan Nyata

Indikator ini digunakan untuk melihat perubahan kualitas lingkungan dan kebermanfaatan program dan kegiatan bagi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 selesai yang dioperasikan di Kecamatan Tampan. Dalam indikator tentang perubahan nyata ini, terdapat 2 (dua) sub indikator dan 6 (lima) pertanyaan. Agar lebih jelas, berikut tabel 5.31 indikator perubahan nyata dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan :

Tabel 5.31 Indikator Perubahan Nyata Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru Di kecamatan Tampan

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	jawaban Responden		Frekuensi Skor	
5	Perubahan nyata	Perubahan kualitas lingkungan	Pertanyaan 19				
			Adanya peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih melalui sistem pengelolaan air limbah domestik sebelum dan sesudah pelaksanaan SSK Pekanbaru	SS (5)	0	0	
				S (4)	10	40	
				KS (3)	61	183	
				TS (2)	27	54	
				STS (1)	2	2	
			Skor				279
			% Skor				55.8%
			Pertanyaan 20				
			Adanya peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih melalui pengelolaan persampahan sebelum dan sesudah pelaksanaan SSK Pekanbaru	SS (5)	0	0	
		S (4)		36	144		
		KS (3)		53	159		
		TS (2)		11	22		
		STS (1)		0	0		
		Skor				325	
		% Skor				65 %	
		Kebermanfaatan kegiatan dan	Pertanyaan 21				
Kegiatan sosialisasi,	SS (5)		0	0			

No	Indikator	Sub Indikator	No item instrumen	jawaban Responden		Frekuensi Skor	
		program bagi masyarakat	Penyuluhan maupun kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	S (4)	16	64	
				KS (3)	58	174	
				TS (2)	26	52	
				STS (1)	0	0	
				Skor			290
				% Skor			58 %
				Pertanyaan 22			
			Adanya IPAL komunal saat ini telah mampu menciptakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat semakin baik	SS (5)	0	0	
				S (4)	13	52	
				KS (3)	61	183	
				TS (2)	25	50	
				STS (1)	1	1	
				Skor			286
				% Skor			57.2%
				Pertanyaan 23			
			Layanan persampahan oleh pemerintah(sarana pengangkut sampah, TPS,TPS 3R,Bank Sampah) membantu pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan mampu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan	SS (5)	2	10	
				S (4)	43	172	
				KS (3)	49	147	
				TS (2)	6	12	
				STS (1)	0	0	
				Skor			341
				% Skor			68.2%
				Pertanyaan 24			
			ketersediaan fasilitas pengurangan sampah (TPS 3 R) memberikan manfaat	SS (5)	0	0	
		S (4)		11	44		
		KS (3)		52	156		
		TS (2)		36	72		
		STS (1)		1	1		
			Skor			273	
			% Skor			54.6 %	
			Total			1794	
			Persentase	$\frac{\sum \text{Skor}}{3000} \times 100 \%$		59,8 %	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Keterangan :

Sangat Setuju (SS)	= 5
Setuju (S)	= 4
Cukup setuju (CS)	= 3
Tidak Setuju (TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1

$$\text{Skor Aktual} = \text{Kelas} \times \text{Jumlah Frekuensi}$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan pada Indikator Perubahan Nyata :

1. Apakah ada peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih melalui sistem pengelolaan air limbah domestik sebelum dan sesudah pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan ?

Skor aktual = Kelas x jumlah frekuensi

Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
= 5 x 0	= 4 x 10	= 3 x 61	= 2 x 27	= 1 x 2
= 0	= 40	= 183	= 54	= 2
Total Skor Aktual = 279				

$$\begin{aligned}
 \% \text{ skor aktual} (\%) &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{279}{500} \times 100 \% \\
 &= 55,8 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 5.31, untuk indikator perubahan nyata dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan, bahwa adanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat melalui sistem pengelolaan air limbah domestik sebelum dan sesudah pelaksanaan Straregi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 dengan skor 279 atau 55,8 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 61 responden yang mendominasi memilih jawaban tidak setuju dengan alasan sistem

pengelolaan air limbah domestik belum memberkan peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih karena berdasarkan lokasi sampel penelitian hanya di Kelurahan Tuah Karya yang terdapat Ipal Komunal berjumlah 4 Ipal Ipal Komunal. sedangkan, untuk sub sektor persampahan, bahwa adanya peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih melalui pengelolaan persampahan sebelum dan sesudah pelaksanaan Straregi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 dengan skor 325 atau 65 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 53 responden yang mendominasi memilih jawaban tidak setuju dengan alasan berdasarkan kondisi eksisting Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dinas DLHK Kota Pekanbaru belum menyediakan fasilitas TPS di Kecamatan Tampan dan hanya memiliki 1 TPS 3R pada lokasi sampel di Kelurahan Tuah Karya. Selanjutnya, untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan / kampanye yang mendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik seperti meningkatkan masyarakat untuk melakukan penyedotan tangki septik individual (pribadi) dengan skor 290 atau 58 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 58 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan setelah dilakukan penyuluhan/kampanye pada masyarakat namun masyarakat berpartisipasi dalam penyedotan tangki septik pribadi dilakukan lebih dari 2-3 tahun sekali. Kemudian untuk pembangunan IPAL Komunal yang telah dibangun saat ini yang mampu menciptakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) pada masyarakat di Kecamatan Tampan semakin baik dengan skor 286 atau 57, 2 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 61 responden yang mendominasi memilih jawaban Kurang setuju dengan alasan berdasarkan konidisi eksisting pembangunan IPAL komunal dilokasi sampel penelitian hanya dapat ditemukan

di Kelurahan Tuah Karya dengan 4 Ipal Komunal sehingga belum mampu menciptakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat semakin baik dan merata. Sedangkan dalam layanan persampahan oleh pemerintah seperti tersedianya sarana pengangkutan sampah, fasilitas TPS, TPS 3R, dan Bank Sampah dalam membantu pelayanan pengelolaan persampahan serta mampu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan diberi skor 341 atau 68,2 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 49 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan berdasarkan kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor persampahan pemerintah kota Pekanbaru belum menyediakan fasilitas TPS di Kecamatan Tampan, dilokasi sampel TPS 3R hanya 1 unit terletak di Kelurahan Tuah Karya, dan 2 unit Bank Sampah dilokasi sampel yaitu terletak di Kelurahan Tuah Karya. Selanjutnya, masyarakat yang merasa bahwa ketersediaan fasilitas pengurangan sampah dalam hal ini ketersediaan TPS 3R telah memberikan manfaat yaitu sebesar 273 atau 54,6 %, berdasarkan jawaban responden sebanyak 52 responden yang mendominasi memilih jawaban kurang setuju dengan alasan berdasarkan kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor persampahan ketersediaan TPS 3R dilokasi sampel hanya 1 unit TPS 3R terletak di Kelurahan Tuah Karya.

Maka selanjutnya, dilakukan penjumlahan terhadap seluruh skor pertanyaan pada tabel 5.31 agar dapat di ketahui skoring dalam satu (1) kriteria/indikator dan persentasinya. Untuk memperoleh persentase indikator tercapainya tujuan dalam efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di kecamatan Tampan dilakukan perhitungan (Ridwan dalam Ramadhani, 2018) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{persentase skor aktual (\%)} &= \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{1794}{3000} \times 100\% \\
 &= 59,8\%
 \end{aligned}$$

Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan interval untuk mengetahui dimanakah total skor dalam variabel efektivitas untuk indikator perubahan nyata dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan, adapun perhitungan dapat di urai sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Indek minimal} &= 1 \times 6 \times 100 = 600 \\
 \text{Indeks maksimal} &= 5 \times 6 \times 100 = 3000 \\
 \text{Interval:} &= \frac{I_{max} - I_{min}}{\text{jumlah indeks}} \\
 &= \frac{3000 - 600}{5} \\
 &= 480
 \end{aligned}$$

Tabel 5.32 Skor Gabungan Indikator Perubahan Nyata pelaksanaan Strategi SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan

Interval skor ideal	Kriteria perubahan nyata	Skor Gabungan
600 - 1.080	Sangat Tidak Berhasil	1794
1.080 - 1.560	Kurang Berhasil	
1.560 - 2.040	Cukup Berhasil	
2.040 - 2.520	Berhasil	
2.520 - 3.000	Sangat Berhasil	
Persentase Skor Gabungan Hasil Penelitian Terhadap Skor Gabungan Ideal		59,8 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.32 di atas, bahwa total skor yang di peroleh dari Indikator peubahan nyata dalam menilai efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 205-2019 yang beroperasi di kecamatan Tampan adalah sebesar 59,8 % yang berada pada kategori cukup berhasil dengan total skor yang di peroleh 1794. Setelah diketahui skor gabungan untuk indikator

tercapainya tujuan, maka tahap berikutnya adalah menyimpulkan indikator perubahan nyata untuk menilai efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan dengan menggunakan metode *Skala likert* sebagai berikut.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.4 Tingkat Pencapaian Efektivitas Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan

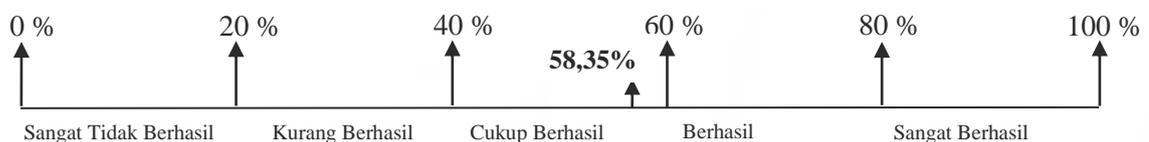
Berdasarkan uraian mengenai 5 indikator yang menilai sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru di kecamatan Tampan, yang mana indikator dari efektivitas tersebut terdiri dari : pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata sehingga dapat disimpulkan untuk menilai sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru yang beroperasi di Kecamatan Tampan melalui 5 indikator ini diperoleh hasil secara menyeluruh. Sesuai dengan hasil dari analisis masing-masing indikator, maka untuk lebih jelasnya di lakukan rekapitulasi hasil dari ke 6 (enam) indikator menilai efektivitas dari pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di kecamatan Tampan sebagai berikut :

Tabel 5.33 Rekapitulasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan Berdasarkan Skala Likert

No	Indikator	Persentase (%)	Penilaian Tingkat Pencapaian Efektivitas (Skala Likert)
1	Pemahaman Program	60,8 %	Cukup berhasil
2	Tepat Sasaran	54,6 %	Cukup berhasil
3	Tepat Waktu	56,9 %	Cukup berhasil
4	Tercapainya Tujuan	59,85 %	Cukup berhasil
5	Perubahan Nyata	59,8 %	Cukup berhasil
Rata-rata		58,35 %	Cukup Berhasil

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel 5.48 Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di kecamatan Tampan yang relative stabil hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa indikator yang berada dalam kategori cukup berhasil. Ada empat (4) indikator yang memiliki nilai 41-60 % dengan kategori cukup berhasil yaitu indikator tepat sasaran, indikator tepat waktu, indikator tercapainya tujuan dan indikator perubahan nyata. Sementara itu, untuk indikator pemahaman program juga berada dalam kategori cukup berhasil namun sedikit diatas nilai 60 %. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas dari pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di kecamatan Tampan, maka dilakukan perhitungan rata-rata dari ke lima (5) indikator variabel efektivitas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Hasil rata-rata dari ke Lima (5) indikator efektivitas dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang beroperasi di

kecamatan Tampan berada pada kategori cukup berhasil dengan skor gabungan 58,35 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan program yang terdapat pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan dilakukan dengan cukup baik, sehingga dengan adanya kegiatan dan program pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru pada sub sektor air limbah domestik selalu dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga serta memiliki sarana dan prasarana air limbah yang memadai, sedangkan program dan kegiatan yang terdapat didalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru pada sub sektor persampahan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan mandiri melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu untuk meminimalisir timbulan, mengurangi dampak negatif dan memberikan manfaat serta nilai ekonomi sampah.

Disamping itu, tingkat efektivitas yang berada pada kategori cukup berhasil diatas juga didukung melalui temuan dalam penilaian kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan di Kecamatan Tampan yang meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan dan aspek keuangan, dimana berdasarkan hasil penemuan untuk kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik pada aspek-aspek sanitasi tersebut masuk dalam kategori cukup baik sedangkan untuk kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor persampahan masuk dalam kategori baik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang terdiri dari pengenalan program, Pengembangan kelembagaan dan peraturan, Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan pelaksanaan/implementasi. Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru diawali dengan pengenalan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diikuti oleh SKPD dan pihak-pihak yang terkait dalam hal urusan sanitasi setelah itu diteruskan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum Penyehatan Air Minum dan Lingkungan (AMPL) Kota Pekanbaru yang didasarkan pada surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 420.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Pekanbaru.

Pokja AMPL yang telah dibentuk selanjutnya bertanggungjawab dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018. Pada tahun 2015 dokumen ini dirangkum menjadi satu dokumen yang dinamakan dengan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru pemuktahiran. Implementasi program dan kegiatan yang telah diatur didalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) selanjutnya akan ditangani oleh masing-masing SKPD / dinas-dinas terkait dalam hal urusan sanitasi yang didasarkan pada 4 (empat) aspek cakupan sanitasi yang

meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, aspek peran stakeholders, aspek teknis sistem pengelolaan dan aspek keuangan.

Kemudian, aspek-aspek sanitasi tersebut dijadikan indikator dalam penilaian kondisi eksisting sanitasi di Kecamatan Tampan pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan. Berdasarkan hasil penelitian untuk penilaian kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah domestik di Kecamatan Tampan masuk dalam kategori cukup baik dengan total skor penilaian 258 dimana hasil skor tersebut didasarkan pada kriteria dari aspek-aspek sanitasi meliputi (1) regulasi pengelolaan air limbah domestik masih dalam penyusunan (rancangan), (2) bentuk kelembagaan pengelolaan IPALD Komunal terpisah dari regulatornya, (3) bentuk kelembagaan pengelolaan IPLT belum diatur dalam tupoksi dinas terkait, (4) peran serta pihak swasta sebagai fasilitator dalam bentuk dukungan dana, (5) peran serta masyarakat atau LSM sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah, (6) ada 2-3 jenis kegiatan kampanye sanitasi mengenai air limbah domestik yang sudah terjadwal dan terlaksana (7) kondisi bangunan pengolahan setempat skala komunal (IPALD Komunal) baik dan beroperasi, (8) jumlah truk penyedot tinja yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional baik yaitu belum punya, (9) frekuensi penyedotan tangki septik individual > 3 tahun sekali tidak secara berkala, (10) keberadaan perusahaan layanan sedot tinja lebih dari 2 perusahaan, (11) peraturan perijinan usaha sedot tinja belum ada perijinan hanya informasi non formal, (12) kondisi bangunan dan operasional IPLT tidak beroperasi, (13) alokasi biaya untuk pembangunan IPAL Komunal/MCK Kurang dari 0,5 % dari total APBD untuk sanitasi. Berkaitan dengan hasil penilaian kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor air limbah

domestik di Kecamatan Tampan terdapat kriteria yang dinilai rendah seperti pada regulasi pengelolaan air limbah domestik masih dalam penyusunan rancangan dan bentuk kelembagaan pengelolaan IPLT belum diatur dalam tupoksi. Selain itu kriteria yang dinilai rendah yaitu belum tersedianya truk penyedot tinja dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru, peraturan perijinan usaha sedot tinja yang belum tersedia serta kondisi bangunan dan operasional IPLT yang tidak beroperasi

Lalu, hasil penelitian untuk penilaian kondisi eksisting sanitasi pada sub sektor persampahan di Kecamatan Tampan masuk dalam kategori baik dengan total skor penilaian 414 dimana hasil skor tersebut didasarkan pada kriteria dari aspek-aspek sanitasi meliputi (1) regulasi pengelolaan sampah yang mengatur penanganan sampah sudah lengkap (2) bentuk kelembagaan pengelola penanganan sampah masih melekat pada tupoksi regulator (dibawah dinas terkait), (3) bentuk peran serta pihak swasta sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan atau program pengelolaan sampah, (4) bentuk peran serta masyarakat atau LSM sebagai implementer dalam bentuk mitra pemerintah ikut dalam kegiatan pembangunan, (5) ada lebih dari 3 jenis kegiatan, sudah terjadwal terlaksana dalam kegiatan kampanye sanitasi pada sub sektor persampahan, (6) kondisi bangunan TPS baik dan beroperasi, (7) sistem kegiatan pengumpulan sampah menggunakan pola individual langsung, (8) jumlah truk pengangkut sampah yang dimiliki pengelola dan dalam kondisi operasional baik lebih dari 1 unit, (9) frekuensi pengangkutan sampah setiap hari (10) peraturan perijinan pengangkutan sampah sudah diatur, termonitoring dan terealisasi baik, (11) keberadaan TPS 3R ada 2 unit, (12) kondisi bangunan dan operasional tempat pengolahan sampah baik dan beroperasi, (13) kondisi bangunan TPA baik dan

beroperasi. Berkaitan dengan hasil penilaian terhadap kondisi eksisting santiasi pada sub sektor persampahan di Kecamatan Tampan terdapat kriteria yang dinilai rendah yaitu bentuk kelembagaan pengelola penanganan sampah masih melekat pada tupoksi regulator (dibawah Dinas terkait).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dari pencapaian tingkat efektivitas dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 di Kecamatan Tampan pada umumnya tingkat efektivitas pelaksanaannya cukup berhasil sesuai dengan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan Perubahan nyata. Adapun hasil penelitian dalam indikator efektivitas secara keseluruhan adalah 58,35 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan program yang terdapat pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan dilakukan dengan cukup baik, sehingga dengan adanya pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru pada sub sektor air limbah domestik melalui kegiatan dan program nya selalu dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih melalui pengelolaan air limbah domestik dan memiliki sarana dan prasarana air limbah yang memadai, sedangkan pada sub sektor persampahan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan mandiri melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu untuk meminimalisir timbulan, mengurangi dampak negatif dan memberikan manfaat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 pada sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan dilaksanakan dengan cukup baik, hendaknya pencapaian tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Tampan saja tapi juga dirasakan diseluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru
2. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih giat dalam melakukan koordinasi, sosialisasi, pemantauan serta pembinaan dalam Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru ini agar berjalan dengan semestinya. Karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan swasta sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing dalam Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pekanbaru.
3. Dengan segala keterbatasan terhadap penulisan peneltiian ini, maka disarankan kepada peneliti yang lain agar dapat mengangkat topik pembahasan tentang pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru sehingga penelitian selanjutnya memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas lagi mengenai pelaksanaan SSK Kota Pekanbaru demi terwujudnya sanitasi Kota Pekanbaru yang berkualitas menuju Smart City Madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Putra. PLP Riau Wujudkan Sanitasi Layak Melalui PPSP. (Diakses pada Minggu, 24 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB) URL : (<http://ciptakarya.pu.go.id/water/post.php?q=3709-PLP-Riau-Wujudkan-Sanitasi-Layak-Melalui-PPSP.html>)
- Faizan Dalilla dkk. 2017. *Estimasi Kandungan Degadable Organic Carbon (DOC) pada Sampah Padat Kota yang masuk ke TPA Tanjung Belit di Kota Pasir Pangaraian Provinsi Riau*. Jurnal Teknik Sipil. Vol 1 No. 1 Maret 2017. Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru.
- Joanne Chong, etal. 2016. *Strengthening local governance arrangements for sanitation: case studies of small cities in Indonesia*. Aquatic Procedia 6 (2016) 64-73. Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: ITB.
- Juniar, Midia. 2013. *Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Airlangga. Surabaya : Skripsi.
- Kiky, Suryadi, Imam Hanafi. 2003. *Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Kota Blitar)*. Jurnal Administrasi Publik. (JAP),Vol. 3, No. 12 Hal. 2003-2007. Universitas Brawijaya, Malang.
- Keputusan Walikota Pekanbaru No 420.a Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Pekanbaru.
- Mardianto, Anna Rumia, Febby Asteriani, dan Puji Astuti. 2017. *Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan persampahan di Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Program Doktor Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. ISBN 978-602-51349-0-6.
- Manual Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). 2014. (Diakses pada Minggu, 24 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB) URL : www.sanitasi.or.id.

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nur'arif, Mohamad. 2017. *Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Kasus Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)*. Program Studi Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang : Skripsi.
- Nindyarosita. Pendekatan Metode Evaluasi Outcome Dengan Skala Likert Dalam Teknik Perencanaan. (Diakses pada Minggu, 24 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB). URL : <https://nindyarosita.wordpress.com/2013/06/13/pendekatan-metode-evaluasi-outcome-dengan-skala-likert-dalam-teknik-evaluasiperencanaan/>
- Ramadhani, Fajar. 2016. *Strategi Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Tahun 2015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016. Universitas Riau.
- Sari, Diyan, Mailita. 2013. *Analisis Pelaksanaan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)*. Jurnal Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Siregar, Tety, Juliany. 2010. *Kepedulian Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Matahalasan Kota Tanjungbalai*. Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang : Skripsi.
- Silaen, David. 2017. *Evaluasi Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Di Kabupaten Sukoharjo*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta : Skripsi.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung Alfabet.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Utami, Aprilia, Resty. 2018. *Dampak Sanitasi Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Agung*. Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- World Health Organisation. (Diakses pada Minggu, 24 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB) URL : (<https://sanitariankit.id/sanitasi-indonesia-terburuk-ketiga/>).

- _____ Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018*. Pekanbaru.
- _____ Badan Pusat Statistik. 2018. *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018*. Pekanbaru.
- _____ Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1993 SPAL Yang Memenuhi Syarat Kesehatan.
- _____ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. *Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)*.
- _____ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2018. *Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)*.
- _____ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. *Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)*.
- _____ Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2014. *Buku E Panduan Perencanaan Pelayanan Lumpur Tinja*.
- _____ Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru Tahun 2014-2018. Pekanbaru
- _____ Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. *Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)*.
- _____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- _____ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 04 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- _____ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- _____ Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- _____ Standar Nasional Indonesia (SNI) No 19-2454-2002 Kriteria Pewadahan Individual.
- _____ Undang-Undang No 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.